ISBN 978-623-198-033-5

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Penulis :

- Afriansyah
- Afdhal
- Ahmad Mustanir
- Annisa Ilmi Faried
- Aksal Mursalat
- Iwan Henri Kusnadi
- Rusydi Fauzan
- Amruddin
- Duwi Siswanto
- Rina Widiyawati
- Abdurohim

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Afriansyah
Afdhal
Ahmad Mustanir
Annisa Ilmi Faried
Aksal Mursalat
Iwan Henri Kusnadi
Rusydi Fauzan
Amruddin
Duwi Siswanto
Rina Widiyawati
Abdurohim

PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Penulis :
Afriansyah
Afdhal
Ahmad Mustanir
Annisa Ilmi Faried
Aksal Mursalat
Iwan Henri Kusnadi
Rusydi Fauzan
Amruddin
Duwi Siswanto
Rina Widiyawati
Abdurohim

ISBN : 978-623-198-033-5

Editor : Afriansyah, S.Psi., S.Sos., S.P., M,Si., M.H., M.Agr., CIIQA
Penyunting : Aulia Syaharani, S.Tr.Kes.
Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Trianisa, S.Pd

Penerbit : PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI
Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :
Jl. Pasir Sebelah No. 30 RT 002 RW 001
Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah
Padang Sumatera Barat
Website : www.globaleksekutifteknologi.co.id
Email : globaleksekutifteknologi@gmail.com

Cetakan pertama, 4 Februari 2023
Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT dalam segala kesempatan. Sholawat beriring salam dan doa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis telah menyelesaikan Buku Pemberdayaan Masyarakat ini.

Proses penulisan buku ini berhasil diselesaikan atas kerjasama tim penulis. Demi kualitas yang lebih baik dan kepuasan para pembaca, saran dan masukan yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Terutama pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah mempercayakan mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Penulis, Februari 2023
Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR GAMBAR ..... **vi**
DAFTAR TABEL ..... **vii**
BAB 1 PENGERTIAN DAN KONSEP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT **1**
1.1 Pendahuluan 1
1.3 Konsep Pemberdayaan Masyarakat 5
1.4 Peran Pemberdayaan Masyarakat 7
1.5 Corak Pemberdayaan Masyarakat 8
1.6 Penerapan Pendekatan dalam Pemberdayaan Masyarakat 9
1.7 Karakteristik Kemampuan dan Kemandirian Pemberdayaan Masyarakat 10
1.8 Fase dalam Pemberdayaan Masyarakat 14
DAFTAR PUSTAKA 17
BAB 2 TEORI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT **21**
2.1 Pendahuluan 21
2.2 Teori-Teori Pemberdayaan Masyarakat 23
2.2.1 Teori ACTORS 23
2.2.2 *The Ladder of Participation Theory* 26
2.3 Prinsip Utama Pemberdayaan Masyarakat 28
2.4 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 30
DAFTAR PUSTAKA 32
BAB 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN **35**
3.1 Pendahuluan 35
3.2 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 37
3.3 Tujuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan dan Perkotaan 38
3.4 Prinsip Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan dan Perkotaan 40

3.5 Sasaran Program Nasional Pemberdayaan Masyaraka Mandiri Pedesaan dan Perkotaan 42
3.6 Bentuk Kegiatan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan dan Perkotaan 43
3.7 Pelaku Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ... 47
3.8 Strategi Program Pemberdayaan Masyarakat 50
3.8.1 Strategi Transformasi Sosial Masyarakat 50
3.8.2 Strategi Penguatan Kemandirian Pemerintahan Kabupaten/Kota 54
DAFTAR PUSTAKA 55
BAB 4 POLA PEMBERDAYAAN 59
4.1 Pendahuluan 59
4.2 Pertumbuhan Pembangunan Berbasis Human Capital ... 61
4.3 Pembangunan Melalui Perencanaan Partisipatif Masyarakat 63
BAB 5 PRINSIP-PRINSIP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 73
5.1 Pendahuluan 73
5.3 Partisipatif 77
5.4 Keswadayaan atau Kemandirian 78
5.5 Berkelanjutan 79
DAFTAR PUSTAKA 81
BAB 6 STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 85
6.1 Pendahuluan 85
6.2 Pengertian Strategi Pemberdayaan Masyarakat 86
6.3 Tujuan Strategi Pemberdayaan Masyarakat 89
6.4 Proses dalam Strategi Pemberdayaan Masyarakat 91
6.5 Keberhasilan Strategi Pemberdayaan Masyarakat 92
DAFTAR PUSTAKA 97
BAB 7 ANALISIS TINGKAT KEBERDAYAAN MASYARAKAT 99
7.1 Pendahuluan 99

7.2 Tingkat Keberdayaan Masyarakat 100
7.2.1 Tingkatan Pertama : Terpenuhinya Kebutuhan Dasar 100
7.2.2 Tingkatan Kedua : Akses Terhadap Sumber Daya ... 101
7.2.3 Tingkatan Ketiga : Kesadaran Terhadap Potensi Diri 101
7.2.4 Tingkatan Keempat : Partisipasi Aktif Dalam Kegiatan Masyarakat 102
7.2.5 Tingkatan Kelima : Menjadi Manajer yang mengembangkan lingkungannya 102
7.3 Dimensi Pemberdayaan Masyarakat 102
7.3.1 Indikator Dalam Pemberdayaan Masyarakat 103
7.3.2 Elemen Pemberdayaan Masyarakat 104
7.4 Pendekatan dan Metode Pemberdayaan Masyarakat 105
7.4.1 Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat 106
7.4.2 Metode Pemberdayaan Masyarakat 107
7.5 Pendamping dan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat 108
7.5.1 Sikap dan Kualitas Pendamping dan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat 108
7.5.2 Peran Pendamping dan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat 109
DAFTAR PUSTAKA 112
BAB 8 PROGRAM-PROGRAM PEMBERDAYAAN PETANI 115
8.1 Pendahuluan 115
8.2 Ruang Lingkup Pemberdayaan Petani 116
8.3 Program Pemberdayaan Petani 118
DAFTAR PUSTAKA 122
BAB 9 METODE PEMBERDAYAAN DALAM PENYULUHAN 123
9.1 Pendahuluan 123
9.2 Pendekatan kepada Petani, Langkah Awal Pemberdayaan dan Penyuluhan 125

9.3 Teknik dan Metode Penyuluhan Pertanian 127
9.4 Hal yang perlu Diperhatikan dalam Memilih Metode 131
9.5 Indikator Keberhasilan 133
DAFTAR PUSTAKA 135
BAB 10 MEDIA PENYULUHAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 137
10.1 Pendahuluan 137
10.2 Tujuan dan Peranan Media Penyuluhan 140
10.3 Syarat-syarat Media Penyuluhan 140
10.4 Keterbatasan Media Penyuluhan 141
10.5 Jenis Media Penyuluhan 142
10.6 Dasar Pemilihan Media Penyuluhan 146
10.7 Pembuatan Media Penyuluhan Pertanian 149
10.7.1 Persiapan Pembuatan Media Penyuluhan 149
10.7.2 Membuat Media Penyuluhan Pertanian Siaran Radio 151
DAFTAR PUSTAKA 154
BAB 11 MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 155
11.1 Pendahuluan 155
11.2 Kriteria Utama Dalam Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi 158
11.3 Implementasi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat 160
11.4 Klasifikasi Monitoring Dan Evaluasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat 161
11.5 Pelaporan Atas Monitoring dan Evaluasi dalam Pemberdayaan Masyarakat 162
DAFTAR PUSTAKA 165
BIODATA PENULIS

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Kerangka Kerja Teori ACTORS 24
Gambar 3.1 : Strategi Transformasi Sosial Masyarakat..... 53
Gambar 3.2 : Strategi Penguatan Kemandirian Pemerintahan Kabupaten/Kota..... 54
Gambar 8.1 : Pemberdayaan untuk Kemandirian Masyarakat..... 116
Gambar 8.2 : Pemberdayaan Kelompok Tani..... 119
Gambar 9.1 : Alur Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 126
Gambar 10.1 : Kerucut Pengalaman Edgar Dale..... 138
Gambar 11.1 : Proses Pelaksanaan Project 157
Gambar 11.2 : Proses kegiatan Monitoring dan Evaluasi Proyek..... 159
Gambar 11.3 : Proses Implementasi Monitoring dan Evaluas 164

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 : Kelompok Sasaran PNPM Mandiri Perkotaan 43
Tabel 9.1 : Media yang digunakan dalam proses Penyuluhan Pertanian 128
Tabel 9.2 : Ragam Karakteristik Metode Pemberdayaan Masyarakat 132

BAB 1
PENGERTIAN DAN KONSEP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Oleh Afriansyah

1.1 Pendahuluan

Masalah pembangunan merupakan masalah yang kompleks, pembangunan di era Society 5.0 saat ini telah bergerak ke arah perspektif *people centered development* di mana masyarakat menjadi fokus dan aktor utama dalam pembangunan, ada perubahan posisi masyarakat yang semula lebih diposisikan sebagai obyek pembangunan menjadi subyek pembangunan, agar bersifat efektif perlu dicarikan berbagai alternatif strategi yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat.

Dari sisi bidang yang yang harus dibangun juga memiliki aspek kehidupan yang sangat luas. Aspek kehidupan itu mencakup kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya serta pertahanan dan keamanan. Perspektif ini dalam implementasinya menggunakan pemberdayaan masyarakat menjadi pendekatan utama dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan yang berada dan melibatkan masyarakat. Pemberdayaan (*empowerment*) adalah sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan masyarakat. Untuk memahami konsep pemberdayaan secara tepat memerlukan upaya pemahaman latar belakang kontekstual yang melahirkannya. Pendekatan pemberdayaan masyarakat digunakan karena sumber masalah kemiskinan,

keterbelakangan, ketimpangan, ketidakadilan adalah ketidakberdayaan masyarakat (Soetomo, 2011).

Sedangkan dari sisi manajemen secara filosofis, pendekatan pemberdayaan masyarakat adalah pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai fokus-nya. Dimana harus dilakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, mulai dari tingkat komunitas terbawah diberikan peluang dan kewenangan dalam pengelolaan pembangunan, mulai dari proses pengambilan keputusan, perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan. Termasuk dalam kegiatan di atas adalah identifikasi masalah, identifikasi kebutuhan, perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi serta menikmati hasil pembangunan (Soetomo, 2011).

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan sumberdaya manusia atau masyarakat itu sendiri dalam bentuk penggalian kemampuan pribadi, kreatifitas, kompetensi, dan daya pikir serta tindakan yang lebih baik dari waktu sebelumnya. Pemberdayaan masyarakat merupakan tindakan yang mulia, sebab, program ini tidak hanya membantu masyarakat untuk memperbaiki kehidupannya secara mandiri, tetapi juga berpengaruh pada pembangunan nasional. Pemberdayaan masyarakat sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Pemberian layanan publik (kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi dan sebagainya) kepada masyarakat tentu merupakan tugas (kewajiban) negara secara *given*. Kemandirian disini yaitu tingkat kemajuan yang harus dicapai sehingga masyarakat dapat membangun, memelihara kelangsungan hidupnya dan berpartisipasi menjaga lingkungan dimana mereka berada. Jadi secara garis besar pemberdayaan masyarakat merupakan proses menciptakan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, untuk mampu secara mandiri

mengatasi segala persoalan yang dihadapinya, dan berkuasa atas segala aspek yang terkait dengan kehidupannya.

1.2 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah sebagai upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah upaya untuk menguatkan kelembagaan masyarakat agar mereka memiliki kemampuan dalam mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan. Ada banyak pengertian pemberdayaan masyarakat menurut para ahli, antara lain sebagai berikut;

1. Britha, Mikkelsen (2011). pemberdayaan masyarakat adalah sekumpulan praktek dan kegiatan yang diungkapkan dalam bentuk simbol simbol. Simbol simbol tersebut kemudian mengomunikasikan kekuatan yang tangguh untuk untuk mengubah hal hal yang terkandung dalam diri kita (*inner space*), orang orang lain yang dianggap penting serta masyarakat kita.
2. Ife, Jim & Tesoriero, Frank (2016), definisi pemberdayaan masyarakat ialah memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depan mereka sendiri dan berpartisipasi pada upaya mempengaruhi kehidupan dari kelompoknya.
3. Chambers, Robert (1995), menyatakan bahwa pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil (*equitable sharing of power*), sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil - hasil pembangunan.
4. Gitosaputro, S & Rangga K.K (2015), pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan yang membuat

masyarakat berinisiatif untuk memulai kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri.

5. Menurut Suharto (2005), pemberdayaan masyarakat juga dimaknai sebagai sebuah proses serangkaian kegiatan untuk memperkuat kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Dan sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti kepercayaan diri, menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas kehidupannya.
6. Fahrudin, Adi (2012), menjelaskan pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai upaya untuk membangun potensi dengan memberikan motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta upaya untuk mengembangkannya.
7. Sumodiningrat (1997), mengartikan pemberdayaan masyarakat adalah agenda konsep dan pembangunan yang mendukungan kemampuan masyarakat. Tujuan yang diharapkan dalam pemberdayaan ini ialah mencipatakan kehidupan masyarakat yang mandiri, baik dalam bidang ekonomi, arti pendidikan, ataupun dalam bidang industri.
8. Mardikanto dkk (2014), menjelaskan pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang

bersangkutan sehingga bertujuan untuk menemukan alternatif-alternatif baru dalam pembangunan masyarakat

1.3 Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah kata benda, sedangkan actionnya adalah kata kerja yaitu memberdayakan. Memberdayakan masyarakat adalah usaha meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sebelumnya tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan daya (*empowerment*) atau kekuatan (*strenghtening*) kepada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dapat dikatakan sebagai usaha memandirikan, mengembangkan, menswadayakan, dan memperkuat posisi tawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan melalui pengalihan pengambilan keputusan kepada masyarakat agar mereka terbiasa dan mampu bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang dipilihnya. ini berarti bahwa pemberdayaan masyarakat adalah usaha memandirikan dan memampukan dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran terhadap potensi yang dimilikinya untuk lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Dalam konteks impelementasi, konsep pemberdayaan sering pula dipersamakan artinya dengan pengembangan komunitas/masyarakat (*community development*) atau dikalangan organisasi masyarakat sipil ataupun NGO sering menggunakan terminologi CD dalam memberikan pendampingan atau penguatan masyarakat dalam berbagai kegiatan, baik yang berhubungan proses pengembangan masyarakat yang bertujuan memampukan masyarakat memenuhi kebutuhan sendiri, serta memutuskan apa yang terbaik bagi dirinya. Dalam konteks pembangunan, konsep pemberdayaan memiliki perspektif lebih luas. Dalam arah praksis, pemberdayaan masyarakat sering dirancukan dengan pendekatan

partisipatif. Sebagai contoh, pembangunan yang melibatkan masyarakat sering disebut dengan pendekatan partisipatif.

Dalam pendekatan ini masyarakat tidak hanya dijadikan obyek pembangunan tetapi dijadikan subyek yang ikut menentukan keberhasilan sebuah program pembangunan yang dilaksanakan. Masyarakat diberi kewenangan dan otoritas untuk merencanakan dan menentukan pilihan-pilihan secara aktif dalam proses yang dcvijalankan termasuk terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian hingga pemanfaatan hasil.

Dalam proses pemberdayaan, bukan hanya membuat masyarakat manjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian karena pada dasarnya setiap apa yang dimiliki harus dihasilkan atas jerih payahnya sendiri, yang hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain. Menurut Moelijarto bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Sehingga pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun potensi, memberikan motivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Pemberdayaan pada dasarnya berusaha untuk membangun potensi yang ada pada diri seseorang dengan memberikan motivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya mengembangkan potensi yang ada sebagai proses belajar mengajar yang merupakan usaha yang terencana dan sistematis. serta pemberdayaan dapat dilihat dari setiap masyarakat yang memiliki potensi untuk dikembangkan.

Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Pasal 1, ayat (8)). Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat bersifat inklusif, dalam arti lain turut melibatkan masyarakat sasaran program. Keberhasilan program

tidak hanya bergantung pada pihak yang melakukan pemberdayaan, tetapi juga oleh keaktifan pihak yang diberdayakan.

1.4 Peran Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat berperan untuk mengubah perilaku masyarakat agar mampu berdaya sehingga bisa meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya. Mardikanto, dkk (2014), menjelaskan peran dari pemberdayaan masyarakat antara lain sebagai berikut:

1. Perbaikan kelembagaan (*Better Institution*). Dengan memperbaiki kegiatan yang dilakukan, diharapkan dapat memperbaiki kelembagaan. Kelembagaan yang baik akan mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan.
2. Perbaikan Usaha (*Better Business*). Perbaikan kelembagaan diharap akan memperbaiki bisnis yang dilakukan sehingga mampu memberikan manfaat kepada anggota lembaga tersebut dan masyarakat yang ada di sekitarnya.
3. Perbaikan Pendapatan (*Better Income*). Perbaikan bisnis diharap dapat memperbaiki pendapatan seluruh anggota lembaga, termasuk masyarakat. Sehingga dibutuhkan perbaikan dalam hal penerimaan keuangan masyarakat.
4. Perbaikan Lingkungan (*Better Environment*). Perbaikan pendapatan diharap dapat memperbaiki lingkungan fisik dan sosial karena kerusakan lingkungan kerap disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.
5. Perbaikan Kehidupan (*Better Living*). Pendapatan dan lingkungan yang baik akan memperbaiki standar kehidupan masyarakat. Ini dapat dilihat dari tingkat kesehatan, pendidikan, dan daya beli. Kemampuan ekonomi akan membuat kehidupan masyarakat lebih baik.

6. Perbaikan Masyarakat (*Better Community*). Jika setiap keluarga mempunyai kehidupan yang baik, akan tercipta kehidupan masyarakat yang lebih baik pula, sehingga dibutuhkan pebaikan masyarakat.

1.5 Corak Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai kemandirian bidang sosial dan ekonomi dan untuk mencapai kesuksesan program tersebut, memiliki banyak corak dalam pemberdayaan masyarakatnya. Berikut ini terdapat beberapa corak dari pemberdayaan masyarakat, antara lain terdiri atas:

1. *Community leader,* Sebagai contoh komunitas leader yaitu petugas kesehatan melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat atau pemimpin terlebih dahulu seperti camat, lurah, kepala adat, ustad, dan sebagainya.
2. *Community organization*, merupakan potensi yang dapat dijadikan mitra kerja dalam upaya pemberdayaan masyarakat, komunitas organisasi dapat berupa PKK, karang taruna, majlis taklim dan lainnnya.
3. *Community Fund*, dapat berupa dana sehat atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) yang dikembangkan dengan prinsip gotong royong sebagai salah satu prinsip pemberdayaan masyarakat.
4. *Community material*, setiap daerah memiliki potensi tersendiri yang dapat digunakan untuk memfasilitasi pelayanan kesehatan. Misalnya, desa dekat kali pengahsil pasir memiliki potensi untuk melakukan pengerasan jalan untuk memudahkan akses ke puskesmas.
5. *Community knowledge*, disini pemberdayaan bertujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan berbagai penyuluhan kesehatan yang menggunakan pendekatan *community based health education*.

6. *Community technology*, pada komunitas teknologi sederhana di komunitas dapat digunakan untuk pengembangan program kesehatan misalnya penyaringan air dengan pasir atau arang

1.6 Penerapan Pendekatan dalam Pemberdayaan Masyarakat

Dalam melaksanakan pemberdayaan perlu dilakukan melalui berbagai pendekatan. Suharto (2005), menjelaskan penerapan pendekatan pemberdayaan dapat dilakukan melalui 5P yaitu: pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pemungkinan, menciptakan suasana atau iklim yang membuat potensi masyarakat berkembang optimal.
2. Penguatan, memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.
3. Perlindungan, melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang antara yang kuat dan lemah, serta dapat mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah.
4. Penyokongan, memberikan dukungan dan bimbingan agar masyarakat mampu menjalankan perannya dan tugas-tugas kehidupannya.
5. Pemeliharaan, memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat, hakikatnya merupakan gerakan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Menurut Suyono (2011), gerakan masyarakat berbeda dengan membuat

model percontohan secara ideal, selanjutnya setelah teruji baru disebarluaskan.

1.7 Karakteristik Kemampuan dan Kemandirian Pemberdayaan Masyarakat

Karakteristik yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat harus dapat membangung masyarakat, dimana sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Model dan strategi pemberdayaan masyarakat, ditempuh melalui jangkauan kepada masyarakat seluas-luasnya atau sebanyak-banyaknya. Benih pemberdayaan ditebar kepada berbagai lapisan masyarakat. Masyarakatnya akhirnya akan beradaptasi, melakukan penyempurnaan dan pembenahan yang disesuaikan dengan potensi, permasalahan dan kebutuhan, serta cara/pendekatan mereka. Dengan demikian model atau strategi pemberdayaan masyarakat akan beragam, menyesuaikan dengan kondisi masyarakat lokal (Anwas, 2014). Berikut ini Model dan Perwujudan Strategi Kemampuan dan Kemandirian Pemberdayaan Masyarakat:

1. Menciptakan Iklim, Memperkuat Daya, dan Melindungi. Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi sebagai berikut:
    a. *Enabling*, yaitu proses menciptakan iklim atau suasana yang membuat potensi masyarakat dapat berkembang. Dimana prinsipnya setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan.
    b. *Empowering* yaitu meningkatkan kapasitas atau daya dengan cara memperkuat potensi yang telah dimiliki masyarakat. Upaya yang amat pokok yaitu peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, pasar,

prasarana dan sarana serta ketersediaan Lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran.

c. *Protecting,* yaitu membuat sistem perlindungan yang dapat melindungi masyarakat sebagai subjek pengembangan. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi tambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

2. Program Pembangunan Pedesaan, pemerintah di negara-negara berkembang termasuk Indonesia telah mencanangkan berbagai macam program pedesaan, antara lain sebagai berikut :

   a. Program pembangunan pertanian, merupakan usaha meningkatkan output dan pendapatan para petani. Juga untuk menjawab keterbatasan pangan di pedesaan, bahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar industri kecil dan kerumahtanggaan, serta untuk memenuhi kebutuhan ekspor produk pertanian bagi negara maju. Program industrialisasi pedesaan, tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan industri kecil dan kerajinan. Pengembangan Industrialisasi pedesaan, merupakan alternatif menjawab persoalan semakin sempitnya rata-rata pemilikan dan penguasaan lahan dan lapangan kerja dipedesaan.

   b. Program pembangunan masyarakat desa yang terpadu, tujuannya untuk meningkatkan produktivitas, dengan memperbaiki kualitas hidup penduduk dan memperkuat kemandirian. Ada enam unsur dalam

pembangunan masyarakat terpadu, yaitu: pembangunan pertanian dengan padat karya, memperluas kesempatan kerja, intensifikasi tenaga kerja dengan industri kecil, mandiri dan meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan, mengembangkan perkotaan yang dapat mendukung pembangunan pedesaan, membangun kelembagaan yang dapat melakukan koordinasi proyek multisektor.

c. Program pusat pertumbuhan, merupakan sebuah usaha alternatif untuk menentukan jarak ideal antara pedesaan dengan kota, sehingga kota benar-benar berfungsi sebagai pasar atau saluran distribusi hasil produksi. Cara yang ditempuh dalam membangun pasar dekat desa. Pasar ini difungsikan sebagai pusat penampungan hasil produksi desa, dan pusat informasi tentang hal-hal berkaitan dengan kehendak konsumen dan kemampuan produsen. Pusat pertumbuhan diupayakan agar secara sosial tetap dekat dengan desa, tetapi secara ekonomi mempunyai fungsi dan sifat-sifat seperti kota.

3. Pembangunan gotong royong. Disini terlihat masyarakat sebagai sistem sosial. Dimana masyarakat terdiri dari atas bagian-bagian yang saling bekerjasama untuk mewujudkan tujuan bersama. Gotong royong dipercaya membawa perubahan-perubahan masyarakat, dapat diwujudkan melalui partisipasi luas dari segenap komponen dalam masyarakat. Prosedur dalam gotong royong bersifat demokratis, dilakukan di atas kekuatan sendiri dan kesukarelaan.
4. Teknikal-Profesional, dalam memecahkan berbagai masalah kelompok masyarakat dengan cara mengembangkan norma, peranan, prosedur baru untuk menghadapi situasi baru yang selalu berubah.

Dalam strategi ini peranan agen-agen pembaharuan sangat penting. Peran yang dilakukan agen pembaharuan terutama dalam menentukan program pembangunan, menyediakan pelayanan yang diperlukan, dan menentukan tindakan yang diperlukan dalam merealisasikan program pembangunan tersebut. Agen pembaharuan merupakan kelompok kerja yang terdiri atas beberapa warga masyarakat yang terpilih dan dipercaya untuk menemukan cara-cara yang lebih kreatif sehingga hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program pembangunan dapat diminimalisir.

5. Konflik, melihat dalam kehidupan masyarakat dikuasai oleh segelitir orang atau sejumlah kecil kelompok kepentingan tertentu. Oleh karena itu, strategi ini menganjurkan perlunya mengorganisir lapisan penduduk miskin untuk menyalurkan permintaan mereka atas sumber daya dan tas perlakuan yang lebih adil dan lebih demokratis. Strategi konflik menaruh tekanan perhatian pada perubahan organisasi dan peraturan (struktur) melalui distribusi kekuasaan, sumber daya dan keputusan masyarakat.
6. Pembelotan kultural, menekankan pada perubahan tingkat subyektif individual, mulai dari perubahan nilai-nilai pribadi menuju gaya hidup baru yang manusiawi. Yaitu gaya hidup cinta kasih terhadap sesama dan partisipasi penuh komunitas orang lain. Dalam bahasa Pancasila adalah *humanis-religius*. Strategi ini merupakan reaksi (pembelotan) terhadap kehidupan masyarakat modern industrial yang berkembang berlawanan dengan pengembangan potensi masyarakat.

7. Tradisional, dimana menyarankan agar masyarakat mengetahui dan memilih kepentingan terbaik secara bebas dalam berbagai keadaan. Dengan kata lain semua pihak bebas menentukan kepentingan bagi kehidupan mereka sendiri dan tidak ada pihak lain yang mengganggu kebebasan setiap pihak.
8. *Direct-action*, disini membutuhkan dominasi kepentingan yang dihormati oleh semua pihak yang terlibat, dipandang dari sudut perubahan yang mungkin terjadi. Pada strategi ini, ada pihak yang sangat berpengaruh dalam membuat keputusan.
9. Transformatif. Terlihat disini menunjukan bahwa pendidikan massa dalam jangka panjang dibutuhkan sebelum pengindentifikasian kepentingan diri sendiri.

1.8 Fase dalam Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Sumodiningrat (1997), fase pemberdayaan masyarakat tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, dan kemudian dilepas untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jauh lagi. Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar, hingga mencapai status mandiri. Meskipun demikian dalam rangka menjaga kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi, dan kemampuan secara terus-menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi (Sulistyani, 2004). Adapun tahapan pemberdayaan yang harus dilalui adalah meliputi:

1. Tahapan penyadaran dan pembentukan prilaku menuju prilaku sadar dan peduli sehinggga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
2. Tahapan tranformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan sampai keterampilan agar

terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran didalam pembangunan.

3. Tahapan peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan sampai keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

Menurut Soekanto (1987), dalam menjalankan tahapan pemberdayaan masyarakat, ada tujuh langkah yang bisa dilakukan, yaitu:

1. Persiapan**,** yang bisa dilakukan dalam tahap persiapan, yakni pnyimpanan petugas yang berarti tenaga pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan oleh *community worker* dan penyiapan wadah yang berusaha dilakukan dengan arahan tak langsung.
2. Pengkajian (*asessment*), dimana proses pengkajian dapat dilakukan secara individu atau melalui kelompok-kelompok di masyarakat. Pada tahap ini, petugas harus bisa mengidentifikasi persoalan kebutuhan yang dirasakan (*feel neds*) dan sumber daya.
3. Perencanaan alternatif program, disini petugas yang memegang peran sebagai agen perubahan (*agent of change*) berpartisipasi melibatkan masyarakat untuk berpikir tentang persoalan yang dihadapi serta solusi atas persoalan tersebut. Masyarakat dalam konteks ini diharapkan mempunyai beberapa alternatif program yang bisa dijalankan.
4. Performalisasi rencana aksi, disini agen perubahan membantu kelompok-kelompok dalam merumuskan serta menetapkan program yang bisa dijalankan sebagai solusi persoalan yang ada. Selain itu, agen pun membantu dalam proses formalisasi ide ke dalam tulisan terebih jika ada pembuatan proposal untuk donatur dana.

5. Implementasi program, masyarakat sebagai kader diharapkan bisa menjaga kelangsungan program yang sudah dikembangkan. Sinergi petugas dan masyarakat adalah hal penting di tahap ini sebab kondisi di lapangan bisa jadi berbeda dengan rencana awal.
6. Evaluasi, dimana akan berjalan baik jika melibatkan masyarakat sebab akan bisa terbentuk sistem komunitas masyarakat yang mampu memanfaatkan sumber daya yang ada.
7. Terminasi, pada tahap ini terjadi pemutusan hubungan formal dengan komunitas target dan proyek sudah harus segera dihentikan.

DAFTAR PUSTAKA

Anwas, M Oos. 2014. Pemberdayaan Masyarakat di Era Global. Bandung: Alfabet Adisasmita,

Agusta, I. 2002. Metode Evaluasi Program Pemberdayaan. Bandung: Humaniora Utama Press.

Britha, Mikkelsen. 2011. Metode Partisipatoris dan Upaya Pemberdayaan: Pandangan Bagi Praktis Lapangan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Chambers, Robert. 1995. Poverty and Livelihoods : Whose Reality Counts? People: From Impoverishment to Empowerment. New York: New York University Press.

Fahrudin, Adi. (2012). Pemberdayaan, Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat. Bandung: Humaniora.

Gitosaputro, S & Rangga K.K. 2015. Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat; Konsep, Teori dan Aplikasinya di Era Otonomi Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Hikmat, Harry. 2006. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Humaniora.

Harmet, Hari. 2001. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Humaniora Utama Pers.

Ife, Jim & Tesoriero, Frank. 2016. *Community Development:* Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

J. Nasikun. 1995. Mencari Suatu Strategi Pembangunan Masyarakat Desa Berparadigma Ganda, dalam Jafta Leibo, Sosiologi Pedesaan, Yogyakarta : Andi Offset.

Kartasasmita, G. 1996. Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerintahan. Jakarta: CIDES.

Kutut, Suwondo. 2005. Civil Society Di Aras Lokal: Perkembangan Hubungan Antara Rakyat dan Negara di Pedesaan Jawa, Yogyakarta : Pustaka Pelajar & Percik.

Mardikanto, Totok. 2014. CSR (Corporate Social Responsibility)(Tanggungjawab Sosial Korporasi). Bandung: Alfabeta.

Mardikanto, Totok & Soebiato poerwoko. 2017. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Persepektif Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Mitchell, Bruce. 2003. Pengelolaan Sumber daya dan lingkungan. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.

Najiati, Sri, dkk. 2005. Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut. Bogor: Wetlands International.

Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Fokus Media.

Soekanto, Soerjono. 1987. Sosial Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali press.

Soetomo. 2011. Pemberdayaan masyarakat : mungkinkah muncul antitesisnya ?. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Suharto, Edi. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerja Sosial. Bandung: PT. Refika Aditama

Sulistyani, Ambar Teguh. 2004. Kemitraan dan model-model pemberdayaan. Yogyakarta: Gaya Media.

Suman, Agus dan Yustika A. Erani. 2007. Perspektif Baru Pembangunan di Indonesia, PT. Danar Wijaya. Malang: Brawijaya University Press.

Sumodiningrat. 1997. Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: PT, Bina Rena Pariwara.

Sunyoto, Usman. 2004. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sutoro, Eko 2002. Pemberdayaan Masyarakat Desa, Materi Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang diselenggarakan Badan Diklat Provinsi Kaltim, Samarinda, Desember 2002.

Suyono, Haryono' 2022. Pemberdayaan masyarakat "Mengantar Manusia Mandiri, Demokratis, dan Berbudaya. Malang: Khananta.

Todaro, Michael P. 2004. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga (Edisi Kedelapan). Jakarta: Erlangga.

BAB 2
TEORI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Oleh Afdhal

2.1 Pendahuluan

Pemberdayaan dan pembangunan masyarakat merupakan suatu konsep yang saling berkaitan satu sama lain. Pembangunan masyarakat dilaksanakan apabila kondisi masyarakat yang tidak layak untuk kehidupan. Kondisi tersebut dapat berupa kemiskinan, rendahnya pendidikan, rendahnya pendapatan, pengangguran, diskriminasi, ketimpangan sosial, dan lain sebagainya (Lee, 2001a; Nesbitt-Ahmed, 2017). Pada lain pihak, konsep pemberdayaan masyarakat yang dalam bahasa inggrisnya disebut sebagai *empowerment* lahir ketika pembangunan yang ada tidak memihak kepada masyarakat. Sejatinya, pemberdayaan masyarakat merupakan upaya pemandirian suatu masyarakat yang lemah (*powerless*) melalui potensi yang mereka miliki (Fleischman, 2018; Lee, 2001b; Wise, 2005). Dalam pelaksanaannya, pemberdayaan itu dilaksanakan oleh dua kelompok yang saling , yaitu kelompok yang diberdayakan dan kelompok yang memberdayakan.

Pemberdayaan dapat dikatakan sebagai suatu konsep yang menjelaskan cara dan upaya untuk memperkuat posisi seseorang dengan cara menumbuhkan kesadaran dan kemampuannya dalam mengidentifikasi persoalan serta mencari solusinya (Sedai et al., 2020). Dengan kata lain, dalam melakukan pemberdayaan sejatinya harus melibatkan masyarakat yang diberdayakan. (Porter, 2013; Seibert et al., 2004).

Pelibatan masyarakat yang diberdayakan merupakan syarat pemberdayaan karena ini berkaitan dengan ketepatan solusi dan keandalan dari cara-cara pemberdayaan. Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan merupakan sebuah kegiatan yang menekankan pada proses dan tujuan. Sebagai suatu proses, pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan (Christens, 2013; Weresh, 2019). Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu: masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya (Yip, 2004).

Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan tidak hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti: kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggung-jawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan. Demikian pula dengan pembaharuan institusi-institusi sosial dan peng-integrasiannya ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya (Gray, 2020; Spreitzer, 1995). Yang terpenting disini adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya (Batliwala, 2007).

Pada bab ini, penulis akan mendeskripsikan tentang teori-teori pemberdayaan masyarakat. Teori yang akan dideskripsikan antara lain teori *ACTORS* (Coburn & Gormally, 2017) dan *the ladder*

of participation theory (Albrecht, 1988; Bryson et al., 2013; Funk et al., 2012; Mbeche, 2017).

Pada sub bagian berikutnya akan dijelaskan tentang prinsip pemberdayaan masyarakat. Kemudian akhiri dengan pembahasan tahapan dan strategi pemberdayaan masyarakat.

2.2 Teori-Teori Pemberdayaan Masyarakat

Para teoritisi banyak yang mendeskripsikan tentang teori pemberdayaan masyarakat. Ada yang mengatakan bahwa teori pemberdayaan berupa teori sistem, teori konflik, teori ketergantungan, teori partisipasi, teori berkelanjutan, teori keterpaduan, teori keuntungan sosial dan ekonomi, dan teori -teori lainnya. Namun dalam bab yang singkat ini, penulis ingin mendeskripsikan teori ACTORS dan *the ladder of participation theory* sebagai teori pemberdayaan masyarakat.

2.2.1 Teori *ACTORS*

Teori "*ACTORS*" tentang pemberdayaan yang dikemukakan oleh Sarah Cook dan Steve Macaulay (1997) lebih memandang mayarakat sebagai subyek yang dapat melakukan perubahan dengan cara membebaskan seseorang dari kendali yang kaku dan memberi orang tersebut kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-ide, keputusan-keputusannya, dan tindakan-tindakannya. Pemberdayaan yang dimaksudkan oleh Cook dan Macaulay lebih mengarah pada pendelegasian secara sosial dan etika/moral, antara lain: (a) mendorong adanya ketabahan; (b) mendelegasikan wewenang sosial; (c) mengatur kinerja; (d) mengembangkan organisasi (baik lokal mapun eksteren); (e) menawarkan kerjasama; (f) berkomunikasi secara efesien; (g) mendorong adanya inovasi; dan (h) menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi.

Kerangka kerja pemberdayaan dapat dilihat dari akronim "ACTORS" antara lain terdiri dari:

A= *authority* (wewenang) dengan memberikan kepercayaan
C= *confidence and competence* (rasa percaya diri dan kemampuan)
T= *trust* (keyakinan)
O= *oppurtinities* (kesempatan)
R= *responsibilities* (tanggung jawab)
S = *support* (dukungan)

Gambarannya lebih jelas dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

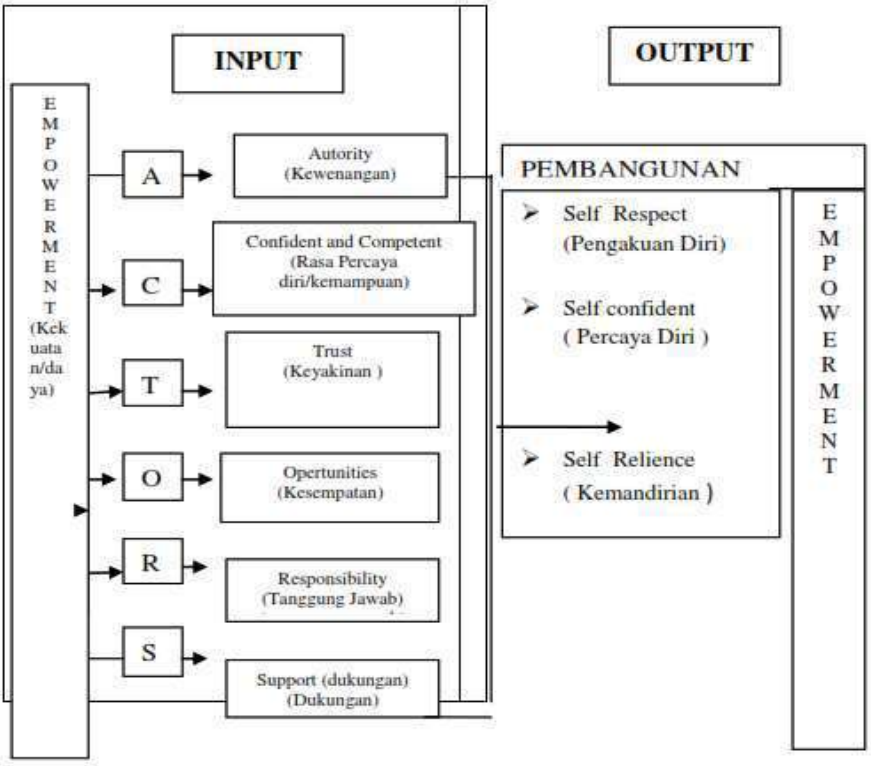

Gambar 2.1 : Kerangka Kerja Teori ACTORS

Dengan menggunakan konsep pemberdayaan yang ditawarkan Cook dan Macaulay ini, maka perubahan yang akan dihasilkan merupakan suatu perubahan yang bersifat terencana karena input yang akan digunakan dalam perubahan telah diantisipasi sejak dini sehingga output yang akan dihasilkan mampu berdayaguna secara optimum. Kajian pengelolaan pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan kerangka kerja "ACTORS" adalah sebagai berikut:

1. *Authority*, kelompok/masyarakat diberikan kewenangan untuk merubah pendirian atau semangat (etos kerja) menjadi sesuatu yang menjadi sesuatu milik mereka sendiri. Dengan demikian mereka merasa perubahan yang dilakukan adalah hasil produk dari keinginan mereka untuk menuju perubahan yang lebih baik.
2. *Confidence* and competence, menimbulkan rasa percaya diri dengan melihat kemampuan mereka untuk dapat merubah keadaan.
3. *Trust*, menimbulkan keyakinan bahwa mereka mempunyai potensi untuk merubah dan mereka harus bisa (mampu) untuk merubahnya.
4. *Oppurtunities*, memberikan kesempatan pada masyarakat untuk memilih apa yang menjadi keinginannya sehingga mereka dapat mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang ada di diri masyarakat.
5. *Responsibilities*, dalam melakukan perubahan harus melalui pengelolaan sehingga dilakukan dengan penuh tanggung jawab untuk berubah menjadi lebih baik; dan
6. *Support*, perlu adanya dukungan dari berbagai pihak untuk menjadikan lebih baik. Dalam hal ini dukungan yang diharapkan selain dari sisi ekonomis, sosial dan budaya juga dukungan dari berbagai stakeholders yang dilakukan secara simultan tanpa didominasi oleh salah satu pihak/faktor.

Dengan menggunakan kerangka kerja ACTORS tersebut, guna menumbuhkan keberdayaan masyarakat, akan dapat dilakukan dengan mengacu pada pemberdayaan yang berasal dari inner dan inter masyarakat. Di mana pemerintah dan organisasi non pemerintah sebagai aktornya. Di negara-negara berkembang peranan pemerintah sangatlah penting karena pemerintah berperan: (1) menggali, menggerakkan, dan mengombinasikan faktor sumber daya yang tersedia seperti tenaga kerja, biaya, peralatan, partisipasi dan kewenangan yang sah. Pemerintah memegang peran sentral dalam pembangunan masyarakat yaitu dengan menetapkan kebijakan yang bersifat strategis, operasional, dan teknis; (2) pemerintah berperan memberi bimbingan dan bantuan teknis kepada masyarakat dengan maksud agar pada suatu saat masyarakat mampu melakukannya sendiri, misalnya dalam hal perencanaan, awalnya pemerintah melakukan perencanaan untuk masyarakat (*planning for the community*), kemudian perencanaan bersama masyarakat (*planning with the community*), dan akhirnya perencanaan oleh masyarakat (*planning by the community*); dan (3) pemerintah dapat juga melakukan pembinaan terhadap organisasi masyarakat yang dapat berfungsi memudahkan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dan melakukan hal-hal lain guna meningkatkan keberhasilan pembangunan.

2.2.2 The Ladder of Participation Theory

Arnstein (1969) menawarkan suatu teori yang disebut dengan teori The Ladder of Participation yaitu suatu gradasi atau pentahapan partisipasi masyarakat. Ia menjelaskan delapan tingkatan partisipasi masyarakat dari yang tertinggi sampai terendah. Delapan tingkatan tersebut merupakan tangga atau jenjang peran serta atau disebut juga tangga partisipatif (*A Ladder of Citizen Participation*) yang menunjukkan tingkatan partisipatif.

Kedelapan tingkatan tersebut adalah: Kontrol sosial (*Citizen Control*), Pendelegasian (*Delegated Power*), Kemitraan (*Partnership*), Penentraman (*Placation*), Konsultasi (*Consultation*), Informasi (*Informing*), Terapi (*Therapy*), dan Manipulasi (*Manipulation*). Delapan tahapan partisipasi Arnstein tersebut, dapat dikategorikan menjadi 3 yaitu: *Non Participation, Tokenism,* dan *Citizen Power*. Termasuk dalam kategori *Non Participation* adalah *therapy* dan *manipulation*. *Placation, Consultation*, dan *Informing* masuk dalam kategori *Tokenism*. Sisanya masuk dalam kategori *Citizen Power* yaitu: *Citizen Control, Delegated Power, dan Partnership*.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan merupakan sebuah kegiatan yang menekankan pada proses dan tujuan. Sebagai suatu proses, pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu: masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya (Coburn & Gormally, 2017).

Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan tidak hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti: kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan.

Demikian pula dengan pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasiannya ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya. Yang terpenting disini adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya (Dwivedi, 1998; Mishra & Spreitzer, 1998).

2.3 Prinsip Utama Pemberdayaan Masyarakat

Dalam melakukan kegiatan pemberdayaan, hendaknya memegang teguh prinsip pemberdayaan, baik itu pemberdayaan dilakukan pada ranah individu, organisasi, dan komunitas, ataupun pembedayaan dilakukan di desa mapun di kota. Realitasnya, memnag banyak masyarakat yang membutuhkan pertolongan melalui pemberdayaan, walaupun mereka mempunyai potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di sekitarnya. Untuk kesuksesan pemberdayaan tersebut, seorang fasilitator dalam pemberdayaan harus memegang prinsip kesetaraan, partisipatif, swadaya, berkelanjutan, transparansi, dan akuntabilitas (Albrecht, 1988).

Kesetaraan, yaitu semua masyarakat mempunyai kedudukan yang sama dengan lembaga dan pemangku kepentingan baik pria maupun wanita dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Setara berarti sejajar atau sederajat. Dinamika yang dibangun adalah mengembangkan dan berbagi pengalaman, pengetahuan, serta keahlian masing-masing yang kemudian digunakan secara bersama. Masing-masing pihak saling menghargai dan belajar bersama (Stromquist, 2015).

Partisipatif, merupakan suatu dorongan mental dan emosional dari seseorang atau sekelompok orang yang menggerakkan mereka secara bersama untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan ikut bertanggungjawab di dalamnya.

Pembangunan yang efektif membutuhkan partisipasi masyarakat dan pembuat kebijakan (stakeholders) dalam

menyusun rancangan program sampai pelaksanaan kegiatan. Swadaya, merupakan kekuatan sendiri. Prinsip swadaya yaitu mengutamakan kemampuan masyarakat dan sumberdaya lokal dalam melaksanakan pembangunan. Masyarakat mempunyai kemampuan, keterampilan, pengetahuan tentang kendala dan masalah yang dihadapi, mengetahui keadaan lingkungannya, serta mampu bekerja secara mandiri dalam mengatasi masalahnya, karena masyarakat mempunyai kemauan, tenaga kerja dan budaya yang sudah lama dipatuhi. Hal ini harus diimplementasikan dan dijadikan modal dasar untuk proses pemberdayaan. Bantuan dari pihak lain yang bersifat materil hanya dijadikan penunjang bukan sebagai prioritas.

Berkelanjutan, kegiatan pemberdayaan didesain untuk terus berjalan, meskipun awalnya kedudukan atau peran pendamping lebih berpengaruh dibanding masyarakat, akan tetapi secara perlahan, peran pendamping akan semakin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah bisa mengelola kegiatannya sendiri. Akuntabilitas merupakan prinsip pemberdayaan yang bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Responsibilitas dapat diartikan sebagai kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas diartikan sebagai pertanggungjawaban yang harus dicapai. Dalam pemberdayaan, seorang fasilitator hendaknya memperhatikan sikap akuntabilitas dalam melaksanakan tugasnya seperti: 1) akuntabilitas sebuah hubungan, 2) akuntabilitas berorientasi pada hasil, 3) akuntabilitas adanya laporan, 4) akuntabilitas memerlukan konsekuensi, serta 5) akuntabilitas memperbaiki kinerja. Akuntabilitas pada sasarnya memiliki tiga fungsi utama, yaitu pertama, untuk menyediakan kontrol demokratis (peran demokrasi); kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan (peran konstitusional); ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas (peran belajar).

2.4 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Selain itu, Christens (2013) dan Yip (2004) yang mengemukakan bahwa paling tidak tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dalam 7 (tujuh) kegiatan:

1. Penyadaran, yaitu kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menyadarkan masyarakat tentang "keberadaanya", baik keberadaanya sebagai individu dan anggota masyarakat, maupun kondisi lingkunganya yang menyangkut linkungan fisik/teknis, sosial-budaya, ekonomi, dan politik.
2. Menunjukkan, adanya masalah, yaitu kondisi yang tidak diinginkan yang kaitannya dengan : keadaan sumberdaya (alam, manusia saranaprasarana, kelembagaan, budaya, dan aksebilitas), lingkungan fisik/ teknis, sosial-budaya, dan politis.
3. Membantu pemecahan masalah, analisis akar-masalah analisis alternatif pemecahan masalah, serta pilihan alternatif pemecahan terbaik yang dapat dilakukan sesuai kondisi internal (kekuatan, kelemahan) maupun kondisi eksternal (peluang, ancaman) yang dihadapi.
4. Menunjukkan pentingnya perubahan, yang akan dan sedang terjadi dilingkungannya, baik lingkungan organisasi dan masyarakat (lokal, nasional, regional, dan global).
5. Melakukan pengujian dan demonstrasi, sebagai bagian dan implementasi perubahan terencana yang berhasil dirumuskan.
6. Memproduksi dan pubilkasi informasi, baik yang berasal dari "luar" (penelitian, kebijakan, produsen/pelaku bisnis, dll) maupun yang berasal dari dalam (pengalaman, *indegenuous technology*, maupun kearifan tradisional dan nilai-nilai adat yang lain).
7. Melaksanakan pemberdayaan/atau penguatan kapasitas, yaitu pemberian kesempatan pada kelompok lapisan bawah (*grassroot*) untuk bersuara dan menentukan sendiri

pilihanpilihannya (*voice and choice*) kaitannya dengan : aksesibilitas informasi, keterlibatan dala pemenuhan kebutuhan, serta partisipasi dalam keseluruhan proses pembangunan, bertanggunggugat (*akuntabilitas public*), dan penguatan kapasitas lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Albrecht, J. 1988. Towards a Theory of Participation in Architecture: An Examination of Humanistic Planning Theories. *Journal of Architectural Education (1984-)*, *42*(1), 24–31. https://doi.org/10.2307/1424997

Batliwala, S. 2007. Taking the Power out of Empowerment: An Experiential Account. *Development in Practice*, *17*(4/5), 557–565. http://www.jstor.org/stable/25548253

Bryson, J. M., Quick, K. S., Slotterback, C. S., & Crosby, B. C. 2013. Designing Public Participation Processes. *Public Administration Review*, *73*(1), 23–34. http://www.jstor.org/stable/23355431

Christens, B. D. 2013. In Search of Powerful Empowerment. *Health Education Research*, *28*(3), 371–374. http://www.jstor.org/stable/45111084

Coburn, A., & Gormally, S. 2017. Understanding Power And Empowerment. *Counterpoints*, *483*, 93–109. http://www.jstor.org/stable/45177773

Dwivedi, R. S. 1998. Empowerment: Theoretical Perspectives and Applications in Indian Organisations. *Indian Journal of Industrial Relations*, *34*(2), 164–182. http://www.jstor.org/stable/27767584

Fleischman, J. 2018. *Women's Economic Empowerment And Women's Health Services*. Center for Strategic and International Studies (CSIS). http://www.jstor.org/stable/resrep23938

Funk, A., Borek, N. Van, Taylor, D., Grewal, P., Tzemis, D., & Buxton, J. A. 2012. Climbing the "Ladder of Participation": Engaging Experiential Youth in a Participatory Research Project. *Canadian Journal of Public Health / Revue Canadienne de Santé Publique*, *103*(4), e288–e292. http://www.jstor.org/stable/canajpublheal.103.4.e288

Gray, R. C. 2020. Annual HUD Secretary's Opportunity and Empowerment Award. *Cityscape*, *22*(3), 311–316. https://www.jstor.org/stable/26967204

Lee, J. A. B. 2001a. Empowerment Groups. In *The Empowerment Approach to Social Work Practice* (2nd ed., pp. 321–350). Columbia University Press. http://www.jstor.org/stable/10.7312/lee-11548.16

Lee, J. A. B. 2001b. The Empowerment Group Approach. In *The Empowerment Approach to Social Work Practice* (2nd ed., pp. 290–320). Columbia University Press. http://www.jstor.org/stable/10.7312/lee-11548.15

Mbeche, R. 2017. Climbing the Ladder of Participation. *Conservation and Society*, *15*(4), 426–438. http://www.jstor.org/stable/26393312

Mishra, A. K., & Spreitzer, G. M. 1998. Explaining How Survivors Respond to Downsizing: The Roles of Trust, Empowerment, Justice, and Work Redesign. *The Academy of Management Review*, *23*(3), 567–588. https://doi.org/10.2307/259295

Nesbitt-Ahmed, Z. 2017. *Cash Transfers During Urban Crises*. International Institute for Environment and Development. http://www.jstor.org/stable/resrep02645

Porter, E. 2013. Rethinking Women's Empowerment. *Journal of Peacebuilding & Development*, *8*(1), 1–14. https://www.jstor.org/stable/48603437

Sedai, A. K., Nepal, R., & Jamasb, T. 2020. *Electrification and Socio-Economic Empowerment of Women in India*. Energy Policy Research Group, University of Cambridge. http://www.jstor.org/stable/resrep30486

Seibert, S. E., Silver, S. R., & Randolph, W. A. 2004. Taking Empowerment to the Next Level: A Multiple-Level Model of Empowerment, Performance, and Satisfaction. *The Academy of Management Journal*, *47*(3), 332–349. https://doi.org/10.2307/20159585

Spreitzer, G. M. 1995. Psychological Empowerment in the Workplace: Dimensions, Measurement, and Validation. *The Academy of Management Journal*, *38*(5), 1442–1465. https://doi.org/10.2307/256865

Stromquist, N. P. 2015. Women's Empowerment and Education. *European Journal of Education*, *50*(3), 307–324. https://www.jstor.org/stable/26609280

Weresh, M. H. 2019. Assessment, Collaboration, and Empowerment. *Journal of Legal Education*, *68*(2), 303–337. https://www.jstor.org/stable/26891017

Wise, J. B. 2005. Empowerment Then and Now. In *Empowerment Practice with Families in Distress* (pp. 19–55). Columbia University Press. http://www.jstor.org/stable/10.7312/wise12462.6

Yip, K. 2004. The Empowerment Model: A Critical Reflection of Empowerment in Chinese Culture. *Social Work*, *49*(3), 479–487. http://www.jstor.org/stable/23721085

BAB 3
PROGRAM PEMBERDAYAAN

Oleh Ahmad Mustanir

3.1 Pendahuluan

Pemerintah telah banyak mengeluarkan Program Pemberdayaan Masyarakat khususnya program-program yang berkaitan dengan masyarakat miskin. Program-program Pemberdayaan yang pernah dijalankan antara lain(Karya, 2012) :

1. Program Keluarga Harapan (PKH)
2. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
3. Program Bantuan Siswa Miskin (BSM)
4. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS)
5. Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN)
6. PNPM Mandiri Perdesaan
7. PNPM Perdesaan R2PN (Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pulau Nias)
8. PNPM Mandiri Agribisnis/SADI (Smallholder Agribusiness Development Initiative)
9. PNPM Generasi Sehat Dan Cerdas
10. PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan (PNPM-LMP)
11. Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (P2SPP)
12. PNPM Mandiri Respek (Rencana Strategis Pengembangan Kampung) Bagi Masyarakat Papua
13. PNPM Mandiri Perkotaan
14. PNPM Mandiri Infrastruktur Perdesaan
15. Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW)

16. Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)
17. PNPM-Mandiri Daerah Tertinggal Dan Khusus/Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Khusus (P2DTK)
18. PNPM Mandiri Kelautan Dan Perikanan (PNPM Mandiri-KP)
19. PNPM-Mandiri Pariwisata
20. PNPM-Mandiri Perumahan dan Permukiman (PNPM-Mandiri Perkim)
21. Program Perluasan Dan Pengembangan Kesempatan Kerja/Padat Karya Produktif
22. Kredit Usaha Rakyat (KUR)
23. Kredit Usaha Bersama (KUBE)

Serta masih banyak lagi program-program pemberdayaan lainnya. Berikut kita akan lebih fokuskan dalam pemaparan program pemberdayaan masyarakat yang 'cukup fenomenal' termasuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri pedesaan dalam rangka meningkatkan pemberdayaan dalam hal ini adalah masyarakat di pedesaan. Semenjak tahun 2007 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) telah dimulai yang meliputi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri khusus desa dan wilayah tertinggal, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri pedesaan, serta Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri perkotaan.

Pemberdayaan masyarakat bertujuan menanggulangi masyarat miskin secara terpadu mulai dari pemerintahan di pusat sampai dengan pemerintahan di wilayah-wilayah dengan melewati tahapan-tahapan yang saling berkelanjutan merupakan sebuah bentuk dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan.

Kegiatan dalam negeri untuk memberdayakan rakyat secara mandiri di daerah pedesaan adalah salah satu pendekatan untuk pengembangan Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang telah dinilai berhasil sampai sekarang.

Terdapat hasil-hasil dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yaitu dapat terjadi efisien dan efektivitas kegiatan, menyediakan lapangan pekerjaan dan pendapatan bagi masyarakat miskin, serta berhasil menumbuhkan partisipasi dan kebersamaan masyarakat. Lanjutan dari Program Pengembangan Kecamatan (PKK) yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, namun kedua program ini memiliki perbedaan yaitu masalah antara pusat dan yang menyangkut *sharing* dana, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri saling berbagi antara daerah dan pusat, sedangkan Program Pengembangan Kecamatan (PKK) murni anggaran pusat, serta Program Pengembangan Kecamatan pemberdayaannya tidak lebih tampak (Karya, 2015) (Karya, 2014).

3.2 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri merupakan kerangka dari terwujudnya program-program dalam negeri sebagai acuan dan dasar kebijakan dilaksanakannya program-program untuk menanggulangi ketidakmampuan rakyat dengan memberdayakan rakyat. PNPM mandiri dilaksanakan dengan prosedur serta mekanisme program serta mengembangkan dan mengharmonisasikan sistem, penyediaan pendampingan, dan mendorong inovasi dan prakarsa masyarakat dengan pendanaan stimulant dalam usaha menanggulangi kemiskinan yang berkelanjutan (Mustanir, 2019) (B, Sofyan and Mustanir, 2022).

Pemberdayaan masyarakat adalah usaha agar kapasitas masyarakat dapat diciptakan/ditingkatkan, terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan serta kemandiriannya dengan memecahkan persoalan-persoalan yang ada, baik secara individu maupun berkelompok. Diperlukan lebih banyak keikutsertaan dari aparat-aparat pemerintahan di daerah dan pihak-pihak dalam pemberdayaan masyarakat untuk menjamin dan membagikan peluang kepada hasil yang sudah dicapai (Mustanir, Hamid and Syarifuddin, 2019) (Mustanir *et al.*, 2020).

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) adalah kerangka bagi kegiatan untuk memberdayakan rakyat yang meliputi kondolisasi program-program untuk menanggulangi kemiskinan. Program-program tersebut berupaya untuk meningkatkan efektivitas dalam meningkatkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat, mempercepat penganggulangan ketidakmampuan. Pemberdayaan masyarakat berbasis pendekatan melalui tahap keberlanjutan pembentukan kelompok masyarakat, tahap kemandirian masyarakat, serta tahap pembelajaran masyarakat. Modal ekonomi mendukung penguatan modal sosial dengan kemandirian masyarakat, mengharmoniskan program-program untuk memberdayakan warga dan merubah dari "skema proyek" ke kerangka kegiatan yang sangat diperlukan oleh modal SDM (fasilitator/ penggerak pemberdayaan masyarakat) (Kemkominfo, 2011).

3.3 Tujuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan dan Perkotaan

Tujuan secara luas PNPM Mandiri Pedesaan yaitu melakukan peningkatan dalam penyediaan sarana serta prasarana sosial dasar ekonomi, serta peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah lokal dengan mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan.

Selain itu, untuk meningkatkan kesempatan masyarakat dan kesejahteraan warga-warga yang tidak mampu di desa-desa melalui dukungan dukungan secara mandiri ketika pengelolaan pembangunan dan penentuan hasil akhir (Karya, 2015).

Adapun hal-hal yang ingin dicapai secara luas oleh PNPM Mandiri perkotaan adalah "Menjadi lebih sejahtera serta peluang–peluang pekerjaan rakyat-rakyat tidak mampu dengan independen". Tujuan spesifik PNPM Mandiri Pedesaan, meliputi:

1. Khusus rakyat-rakyat yang miskin, dilakukan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian pembangunan, pelaksanaan, pengambilan keputusan perencanaan, dan pemantauan.
2. Mendayagunakan sumber daya lokal untuk melembagakan pengelola pembangunan partisipatif.
3. Memfasilitasi pengelolaan pembangunan parsitipatif dalam mengembangkan kapasitas pemerintah lokal.
4. Menyediakan sarana prasarana yang diprioritaskan masyarakat, contohnya sosial dasar dan ekonomi.
5. Pengelolaan pembangunan untuk mendorong berkembangnya dan terbentuknya Badan Kerja Sama Antara Desa (BKAD).
6. Upaya penanggulangan kemiskinan di pedesaan harus bisa dikembangkan kerjasama antara pemangku kepentingannya.

Sedangkan tujuan khusus PNPM Mandiri Perkotaan adalah "Memberikan bantuan bagi rakyat-rakyat yang tidak mampu di kota-kota di desa/kelurahan dan pihak-pihak yang ikut serta dalam kegiatan mendapat hasil dari meningkatnya keadaan kawasan serta cara-cara menjalankan pemerintahan dengan optimal."

3.4 Prinsip Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan dan Perkotaan

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan sesuai dengan pedoman ketentuan-ketentuan dan prinsip yang mendasari untuk dijadikan acuan dan landasan keputusan yang diputuskan yang tergolong ke dalam rangkaian ketika menjalankan sebuah program PNPM Mandiri Pedesaan. Tujuan terwujudnya nilai-nilai dasar PNPM Mandiri Pedesaan (Karya, 2014). Prinsip-prinsip tersebut yaitu:

1. Transparansi serta akuntabilitas.
   Warga patut mampu mengetahui info-info yang memiliki akses serta mekanisme keputusan pengutipan agar kegiatan untuk mengelola bisa berjalan dengan tidak tertutup serta dipertanggung gugatkan dengan amanah, administratif, teknik, dan resmi.
2. Memberikan wewenang (Desentralisasi).
   Wewenang yang diberikan pada kegiatan untuk mengelola peningkatan yang dibangun dan pemerintahan kewilayaan sepenuhnya diberikan pada wilayah itu sendiri dan berdasarkan kapasitas masyarakat.
3. Berorentasi terhadap rakyat yang tidak mampu (miskin).
   Seluruh kepentingan program yang sedang dijalankan selalu menjadikan keperluan sekelompok warga yang tidak mampu sebagai hal yang utama.
4. Kemandirian (Otonom).
   Ketika menjalankan PNPM, masyarakat diberi wewenang yang harus dilakukan sendiri untuk berpartisipasi dalam mengelolah serta menentukan program untuk membangun dengan mandiri.
5. Partisipasi / Pelibatan Masyarakat.
   Setiap proses pengambilan keputusan gotong royong dalam menjalankan pembangunan masyarakat terlibat secara aktif.

6. Prioritas.
   Masyarakat dan pemerintah harus memprioritaskan kebutuhan pemenuhan pengetasan kemiskinan dengan berbagai sumber daya yang terbatas dan mendaya gunakannya secara optimal.
7. Keadilan Gender dan Kesetaraan.
   Perempuan dan laki-laki mempunyai kesetaraan dalam perannya dengan setara menikmati kegunaan dari program dalam rangka membangun disetiap tahapannya.
8. Kolaborasi.
   Seluruh kelompok yang memiliki kepentingan yang untuk menanggulangi masalah masyarakat tidak mampu diharuskan agar memangku kepentingan untuk dapat terwujudnya sinergi serta kerja sama untuk menanggulangi masalah masyarakat tidak mampu.
9. Keberlanjutan.
   Untuk mengambil ketentuan patut mementingkan hal-hal yang penting untuk menyejahterakan rakyat bukan cuma sekarang tapi juga dimasa yang akan mendatang sambil memelihara keasrian alam.
10. Demokrasi.
    Semua ketentuan yang diputuskan dalam membangun harus dengan mufakat dan musyawarah dan selalu mengarah pada kebutuhan rakyat-rakyat yang tidak mampu.
11. Bertumpu pada Pembangunan Manusia.
12. Pelaksanaan PNPM harus bertumpu pada martabat manusia seutuhnya dan peningkatan harkat.
13. Sederhana.
    Semua mekanisme, aturan dan prosedur dalam pelaksanaan PNPM harus dapat dipertanggung jawabkan oleh masyarakat, fleksibel, mudah dipahami, mudah dikelola dan sederhana.

3.5 Sasaran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan dan Perkotaan

Tempat yang dijadikan target (PNPM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan termasuk semua Pedesaan serta daerah-daerah kecamatan yang ada di Negara kita ini ketika dilakukannya pelaksanaan dengan tahap-tahapannya. Pada tahun 2008, tempat yang dipilih penentuan target berdasarkan hal-hal berikut (Karya, 2012) (Karya, 2015):

1. "Kecamatan bermasalah dalam PPK" adalah daerah-daerah kecamatan tapi tidak tergolong kedalam kelompok.
2. Pemerintah di daerah kecamatan yang dikemukakan dengan skema konstribusi pendanaan yang terdapat di daerah.

Sedangkan tempat target PNPM Mandiri Perkotaan, yaitu kawasan yang telah ditentukan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) selaku kawasan yang dapat diberikan dorongan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Tempat yang dapat dijadikan target PNPM Mandiri di daerah kota terdapat dan dijelaskan dalam pesan penentuan tempat atau kawasan BLM PNPM Mandiri yang dikemukakan Menkokesra.

Kelompok Sasaran PNPM Mandiri Pedesaan.

1. (RTM) Rumah Tangga Miskin di Pedesaan,
2. Lembaga Masyarakat di Pedesaan,
3. Lembaga Pemerintah Lokal

Tabel 3.1 : Kelompok Sasaran PNPM Mandiri Perkotaan

Uraian Kelompok Sasaran	Bantuan Teknik/ Pendampingan	Bantuan Dana BLM
Masyarakat	▪ Masyarakat warga kelurahan/desa peserta PNPM MP,terutama masyarakat miskin, laki-laki dan perempuan.	Dana BLM diprioritaskan kepada warga miskin, laki-laki dan perempuan, dan/atau kelompok masyarakat miskin, dengan syarat sbb: • Warga miskin terdaftar dalam data Pemetaan Swadaya , yang terinci dalam lembar PS 2 terkini yang telah disepakati warga. • Kelompok masyarakat miskin yang ditetapkan dalam PJM Pronangkis.
Pemerintah Propinsi, Kota/Kabupaten	Perangkat pemerintahan propinsi, kota/kabupaten, s/d kelurahan/desa yang terkait dengan pelaksanaan PNPM MP.	-
Para Pemangku Kepentingan terkait	Kelompk peduli penanggulangan kemiskinan.	-

3.6 Bentuk Kegiatan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan dan Perkotaan

Kegiatan perbaikan prasarana dan pembangunan sarana yang bisa membagikan kegunaan memberikan dampak positif untuk ekonomi dengan langsung bagi keluarga-keluarga yang tidak mampu.

Aktivitas Non fisik PNPM Mandiri Pedesaan

1. Peningkatan kegiatan pelayanan bidang yang mendidik serta menyehatkan, dengan melatih kesehatan serta terampil dalam pengembangan rakyat atau bisa dikatakan mendidik secara tidak resmi.
2. Permodalan penambahan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP).

Sedangkan dengan detail bentuk-bentuk aktivitas untuk mengembangkan PNPM Mandiri Perkotaan antara lain:

1. Perjamuan-perjamuan/mufakat/mendiskusikan, serta hal lainnya pada bagian pihak pihak pemerintahan di lurah/pedesaan serta daerah-daerah camat baik itu mengambil ketentuan atau bagaimana cara agar info-info yang ada dapat disebar luaskan.
2. Melatih atau membimbing, yakni dengan menyediakan sarana untuk melakukan kegiatan pelajaran.
3. Melakukan survey swadaya, yaitu dengan meneliti pihak-pihak yang akan dibantu, menganalisis, membuat rencana serta menuliskan keterangan.
4. Melakukan kolaborasi untuk menyusun kegiatan-kegiatan untuk membangun dalam periode waktu kurang lebih 3 tahun dan membuat rencana untuk menanggulangi masalah masyarakat miskin.
5. Mengawasi dan mengevaluasi perencaan dalam menanggulangi masyarakat yang tidak mampu dengan melakukan investasi.

Aktivitas yang seharusnya diberi suntikan dana oleh BLM PNPM Mandiri Perkotaan secara umum bisa digolongkan menjadi 2 bentuk aktivitas yang mencakup:

1. Aktivitas skala besar. Aktivitas yang menanggapi banyak wilayah, adalah program untuk membangun yang telah ditemui/dikenal sejak SDM banyak dipetakan. Aktivitas itu banyak menanggapi wilayah atau daerah seperti desa atau daerah kelurahan, tertuang pada PJM Pronangkis, ditentukan pada perencanaan mekanisme yang lain dan dapat dijadikan perencanaan ketika melakukan invest serta bisa dijalankan pengielola yang sudah ditunjuk oleh Badan Keswadayaan Masyarakat lalu disinkronisasi oleh UPL. Pengelola melewati UPL untuk mempertanggung jawabkan BKM/ LKM.
2. Aktivitas skala kecil. Aktivitas yang tidak mempertanggung jawabkan banyak wilayah, merupakan aktivitas yang dikemukakan oleh KSM dengan kegiatan yang diusulkan oleh KSM berdasarkan indikasi yang telah menjadi rencana pada PJM Pronangkis. Investasi yang tidak terlalu besar ini memiliki sifat yang dijalankan KSM yang berkaitan. Contohnya membangun 20 WC umum, tapi tempatnya belum ditetapkan. Pemberian usulan pembangunan WC umum itu sangat dibutuhkan oleh KSM.

Tahap Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kemandirian

1. Tahap Pembelajaran. Langkah-langkah pengajaran (untuk pemuda serta masyarakat agar dapat mengerti pembangunan dengan mengelola secara partisipatif). Stimulan mesti memiliki sifat, BLM sangat berperparan dalam melakukan aktivitas awal untuk merencanakan dan banyak yang ikut berpartisipasi kedalam pengintegrasian system pembangunan perencanaan regular. Peran (pasilitator/konsultan) pendamping sangat diperlukan

dalam prakarsa dan inisiatif. Dalam waktu sekitar dua tahun, kesiapan masyarakat tergantung kondisi wilayah.

2. Tahap Kemandirian.
   Konsultan, pemerintah daerah, masyarakat, serta fasilitator adalah rekan kerja yang sama dan selaras. Pemda dengan masyarakat bisa mendapatkan akses ke darimana dana-dana tersebut berasal. Partisipatif untuk merencanakan sudah ditentukan oleh peraturan daerah. Konsultan atau memerankan sebagai fasilitator berfokus untuk lebih menguatkan daya muat supervise/rakyat yang rela membantu dengan sukarela diwilayah, memerlukan masa selama kurang lebih 2 tahun (Mustanir, 2019).
3. Tahap berkelanjutan
   Warga harus bisa di dalam agar dapat dihasilkan ketentuan yang bisa meningkatkan pembangunan kerja sama bersama pihak-pihak lain. Pengangaran atau kebijakan pemda semakin *pro-poor* (Mustanir, Razak and Mursalat, 2021). Adanya konsultasi/fasilitator berdasarkan permintaan rakyat atau pemerintah daerah yang berdasarkan kebutuhan dan ilmu. Kerja sama antar warga, pihak-pihak yang memiliki kepedulian dan pemerintah daerah. langsung pada energy selaku yang menggerakkan dan membangun. Dan itu memerlukan periode kurang lebih 1 tahun lamanya. Strategi atau tujuan yakni terbetuknya kelompok warga yang bisa mendapatkan akses ke beragam kegiatan atau masyakat mandiri yang dibutuhkan di kurun waktu tahun 2007-2015 (Kemkominfo, 2011) (Karya, 2014).

3.7 Pelaku Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan dan Perkotaan

Rumah tangga miskin terutama masyarakat desa adalah sasaran (PNPM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan juga pelaku utama dari setiap pelaksanaan tahapan (PNPM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan. Langkah awalnya yaitu merencanakan, melaksanakan, sampai melestarikan. Sedangkan pelaku-pelaku konsultan di tingkat desa dan dari aparat, kabupaten, kecamatan-kecamatan, serta yang paling penting yaitu orang yang memfasilitasi, pembina atau pembimbing sehingga kebijakan, nilai-nilai, tujuan tata cara (PNPM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan bisa terlaksana serta tercapai dengan konsisten atau benar.

Ada pihak-pihak pelaksanaan yang ikut serta pada (PNPM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan yaitu (Karya, 2015) (Karya, 2012):

1. Kepala Desa

   Kepala desa selaku yang membina dan mengendalikan keberhasilan dan kelancaran dilaksanakannya program Nasional Pemberdayaan Pelaksanaan Masyarakat Mandiri di daerah pedesaan-pedesaan. Kepala desa dengan Badan Permusyawaratan rakyat melakukan penyusunan aturan-aturan didesa yang efisien serta berlakulah mekanisme lembega-lembaga dan nilai-nilai yang mendorong tata cara bekerjanya PNPM Mandiri Pedesaan selaku cara untuk membangun sehingga banyak pihak yang berpartisipasi, dan pengembangan serta melestarikan saham PNPM Mandiri Pedesaan yang sudah terdapat di desa-desa. Sebagai perwakilan desa sebagai pemeran dalam pembentukan lembaga-lembaga kemitraan antara desa-desa laionnya juga merupakan tugas dari kepala desa.

2. Badan Permusyawarahan Desa (BPD)
   Pada PNPM menjalankan sendiri kegiatannya di daerah desa-desa, BPD (dan bisa disebutkan dengan nama yang lain) selaku lembaga yang memerankan serta yang menjadi pengawas dalam mekanisme semua langkah-langkah PNPM Mandiri di daerah desa-desa, Perencanaan, pelestarian didesa, mengsosialisasikan termasuk, dan melaksanakan. BPD berperan pula untuk melegalkan dan meresmikan aturan-aturan yang ada di desa yang berhubungan untuk melestarikan PNPM Mandiri di daerah desa-desa dan lembaga-lembaga. BPD ditugaskan pula untuk menjadi wakil dari rakyat dengan kepala desa yang disetujui untuk membentuk lembaga-lembaga kemitraan antar desa-desa lainnya.
3. Tim Pengelola Kegiatan (TPK)
   TPK adalah rakyat tertentu yang ditentukan lewat mufakat desa secara umum memiliki kegunaan serta peran agar pengelolaan dan pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan. TPK sebagai kepala yang menanggung jawabi operasional dilapangan aktivitas dan membantu ketua bendahara TPK dan mengutamakan permasalahan yang terjadi di keuangan serta administrasi.
4. Tim Penulis Usulan (TPU)
   TPU adalah rakyat tertentu yang ditentukan lewat mufakat desa, TPU berperan mempersiapkan serta kegiatan menyusun usulan-usulan yang sudah ditetapkan pada mufakat desa serta dan mufakat desa terkhusus wanita sudah jadi gagasan didesa. Aparat-aparat dari TPU ditentukan rakyat dengan melihat banyaknya ilmu serta keterampilan-keterampilan berdasarkan bentuk-bentuk kegiatan yang diusulkan rakyat.

5. Tim Pemantau
   Kelompok monitoring merupakan masyarakat didesa yang dengan rela melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan aktivitas PNPM Mandiri Pedesaan yang dilaksanakan di desa. Banyak anggota kelompok aktivitas monitoring diumumkan disaat mufakat desa dan jika perlu diantara desa.

Pada PNPM Mandiri Perkotaan pihak-pihak penyelenggara yang kini dijelaskan hanyalah pihak-pihak yang menyelenggarakan PNPM MP berdasarkan bagan-bagan yang terdapat dalam lembaga yang dikendalikan oleh Pokja Pengendali PNPM Mandiri Nasional.

Ketika diselenggarakannya kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan tersebut, sangat dibutuhkan menteri-menteri yang melakukan pekerjaan umum selaku badan yang menyelenggarakan dan menugaskan Direktorat Jenderal Cipta Karya agar mereka menjalankan PNPM Mandiri Pekotaan

Melakukan pembentukan Elemen Pelaksana proyek dilakukan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya. Unit tersebut diketuai oleh Direktur Penataan Bangunan serta kawasan yang diberi amanah dan harus mempertanggung jawabkannya secara langsung terhadap Dirjen Cipta Karya ketika menjalankan aktivitas-aktivitas PNPM Mandiri Perkotaan.

Ketika melaksanaan kegiatan tersebut langsung dilapangan, PMU mengontrak Konsultan Manajemen Pusat (KMP) lewat satker. KMP akan bergerak mengatasnamakan PMU berdasarkan wewenang yang telah didapatkan dari PMU, Ketika menjalankan Manajemen Proyek dengan seluruh bentuknya yaitu dengan memasukkan nama manajemen konsultasi yang ditugaskan di masing-masing tempat bekerja. Pada semua tempat kerja itu dapat ditindaklanjuti oleh seorang Manajemen yang mengkonsultasikan wilayah yang terkait dan diketuai oleh seorang pemimpin. Begitupun pada setiap kota-kota atau kabupaten-kabupaten harus

diketuai oleh Koordinator Kota yang bertempat kerja di kabupaten/ kota yang terkait dengan diberkan bantuan oleh tenaga-tenaga yang memiliki keahlian yang dibutuhkan.

Pada bagian desa/lurah, kurang lebih ada 9 daerah lurah/ desa yang diberi pendampingan oleh pihak-pihak yang mengfasilitasi. Pihak-pihak yang memfasilitasi ini biasanya dilakukan pengontrakan oleh SNVT PBL daerah Provinsi ketika mereka dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya terhadap koordinator kota.

Selain itu pada setiap daerah desa atau kelurahan, rakyat didukung agar dapat menentukan sukarelawan minimal sebanyak 25 orang. Relawan relawan tersebut dilatih dengan eksklusif OC/ KMW yang dapat jadi perwakilan rakyat PNPM Mandiri Perkotaan ditugaskan untuk menjadi pihak yang membangun serta melakukan kemitraan dengan masyarakat selaku relawan agar dapat menyejahterakan rakyat di desa atau kelurahan, dan paling penting bagi masyarakat tidak mampu serta pihak-pihak warga yang belum sejahtera yang lain.

3.8 Strategi Program Pemberdayaan Masyarakat

3.8.1 Strategi Transformasi Sosial Masyarakat

Untuk dapat mewujudkan hal-hal yang ingin dicapai, sehingga seharusnya pemerintah melaksanakan strategi-strategi dibawah ini:

1. Mendukung mekanisme perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan rakyat yang tidak mampu menuju ke rakyat yang mampu. Strategi ini tentu saja harus melewati hal-hal berikut:
    a. Menerapkan nilai-nilai dalam dan ketentuan-ketentuan luar yang sering berlaku secara umum, sebuah cara untuk menginternalisasi aktivitas di tahap ini yaitu mempersiapkan rakyat, misalnya: Meneliti persiapan

rakyat, Merefleksi ketidakmampuan rakyat serta memetakan SDM (Mustanir and Darmiah, 2016).

b. Menguatkan badan-badan rakyat dengan mendekatkan dengan membangun hal yag berpokok terhadap sebuah pihak. Jenis Internalisasi aktivitas ditahap ini adalah membentuk dan membangun badan-badan rakyat yang dapat melakukan tugasnya dengan baik, dapat amanah dan diberi kepercayaan berdasarkan nama dari aparat Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) (Yunus, Suadi and Fadli, 2017).
c. TRIDAYA diterapkan dalam prinsip pengajaran untuk menanggulangi masalah masyarakat miskin. Jenis penindaklanjutan aktivitas di tahap ini merupakan menyusun perencanaan kegiatan rakyat dengan banyaknya partisipasi berdasarkan apa yang "dibutuhkan" dan tidak berdasarkan apa yang "diinginkan". File untuk merencanakan ini biasa disebut file untuk rencana Jangka Menengah Program Penanggulanan Kemiskinan (PJM Pronangkis) (Sulaeman, Mustanir and Muchtar, 2019) (Suharto, 2014).
d. Menguatkan pertanggung jawaban rakyat. Jenis perbaikan program di tahap ini adalah dengan melaksanakan aktivitas Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) berdasarkan Tridaya. Program ini adalah perwujudan dari perencanaan partisipatif untuk menumbuhkan dan mengembangkan seluruh rakyat agar dapat memiliki kepedulian serta mengawasi kegiatan kemasyarakatan dengan jujur agar dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan tersebut dapat terjamin (Karya, 2014) (Ibrahim *et al.*, 2020) (Latif, Irwan and Mustanir, 2019).

2. Mendukung mekanisme perubahan perubahan yang terjadi di lingkungan rakyat berasal dari rakyat yang mampu kemudian menjadi rakyat yang mampu berdiri sendiri dengan melalui hal-hal berikut:
    a. Pelajaran kerja sama antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam strategi. Jenis perbaikan aktivitas di tahap ini yaitu melaksanakan program untuk menanggulangi masyarakat miskin dan berfokus di mekanisme pengajaran kerja sama diantara pemerintahan yang ada di pusat, pemerintahan yang ada di daerah, rakyat, serta pihak-pihak yang memiliki kepedulian. Mekanisme untuk membangun kerjasama dan energi di usaha-usaha untuk menanggulangi masalah masyarakat miskin diantara pemerintah yang ada di pusat, pemerintah yang terdapat di daerah serta pihak-pihak yang ada didaerah tersebut dan memiliki kepedulian bisa ditindak lanjuti dengan baik, dilakukan sendiri, dan memiliki tindak lanjut (Jamal, Mustanir and Latif, 2020) (Fredian, 2015).
    b. Menguatkan hubungan antara pihak-pihak yang memiliki peran untuk membangun. Jenis perbaikan aktivitas di tahap ini yaitu melakukan aktivitas kerjasama. Dan memberi sikap peduli serta asal hubungan SDM dan mendukung keikut sertaan dari pihak-pihak yang memiliki peran untuk membangun lainnya, sehingga bisa dijalankan kemitraan dan dorongan fasilitas untuk menanggulangi masalah masyarakat miskin (Irwan, Latif and Mustanir, 2021).
3. Mendukung mekanisme terjadinya perubahan-perubahan di lingkungan rakyat yang dapat berdiri sendiri atau mandiri kemudian menjadi rakyat yang beradab. Perbaikan agar dapat diwujudkannya perubahan kemasyarakatan dari keadaan rakyat yang mampu mandiri kemudian

menjadi rakyat yang beradab difokuskan di mekanisme persiapan acuan-acuan yang kuat dengan menciptakan keadaan serta situasi yang efisien agar dapat berkembang dan tumbuhnya rakyat yang beradab. Jenis perbaikan dan penindaklanjutan pada kegiatan ini yaitu hanya kegiatan yang menyeluruh dan dapat mengorganisasikan pengelolaan pemerintah yang optimal. Hal itu dapat diwujudkan dengan kegiatan menata kawasan tempat tinggal yang berdasar pada organisasi (Karya, 2015) (Karya, 2012).

Gambar 3.1 : Strategi Transformasi Sosial Masyarakat
Sumber : (Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, Kementrian PU Dijten Cipta Karya, 2012)

3.8.2 Strategi Penguatan Kemandirian Pemerintahan Kabupaten/Kota

Searah pada usaha-usaha perbaikan dilaksanakan usaha-usaha untuk menguatkan agar masyarakat dapat mandiri pada tingkatan pemerintahan daerah dalam pengelolaan kegiatan-kegiatan untuk menanggulangi masalah masyarakat miskin di daerahnya masing-masing. Agar hal-hal yang harus diwujudkan dapat dicapai ketika menguatkan sifat mandiri di pemerintah daerah (Karya, 2015) (Kemkominfo, 2011), taktik yang bisa dilakukan yaitu sesuai dengan gambar dibawah ini:

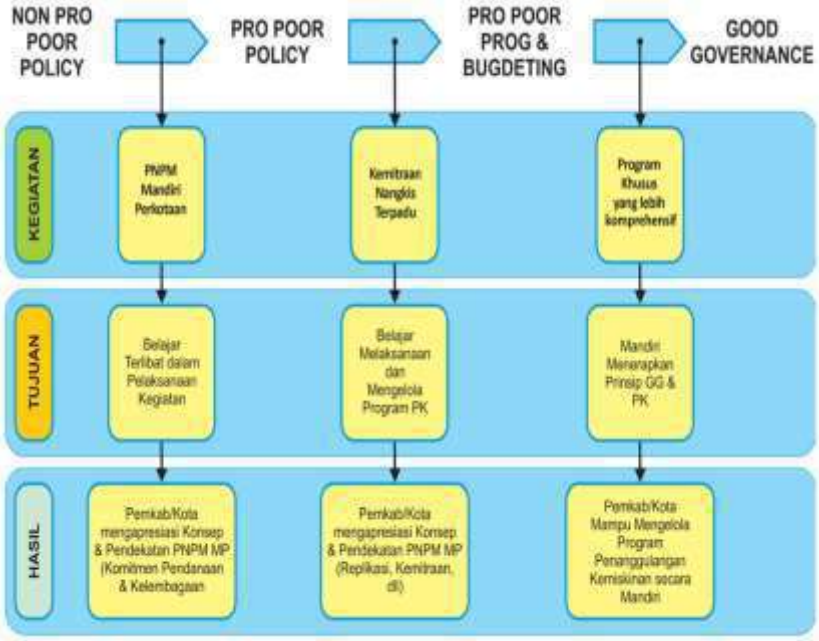

Gambar 3.2 : Strategi Penguatan Kemandirian Pemerintahan Kabupaten/Kota

Sumber : (Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, Kementrian PU Dijten Cipta Karya, 2012)

DAFTAR PUSTAKA

B, S., Sofyan, W. and Mustanir, A. 2022. *Strategi Pemberdayaan Obyek Wisata. Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasi*. Banyumas. Available at: https://penerbitbuku.id/.

Bahri, E. S. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat Berkemajuan*. Edited by Tim FAM Publishing. Kediri: FAM Publishing.

Fredian, T. N. 2015. *Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia IPB & Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Ibrahim, M. *et al.* 2020. 'Pengaruh Manajemen Pengelolan Badan Usaha Milik Desa terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Desa Bila Riase Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang', *Movere Journal*, 2(2), pp. 56–62. Available at: https://ojs.stie-tdn.ac.id/index.php/MV/article/view/118.

Irwan, I., Latif, A. and Mustanir, A. 2021. 'Pendekatan Partisipatif Dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang', *GEOGRAPHY Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan*, 9(2), pp. 137–151. Available at: https://journal.ummat.ac.id/index.php/geography/article/view/5153.

Jamal, Y., Mustanir, A. and Latif, A. 2020. *Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Aparatur Desa Dalam Pelayanan Publik Di Desa Ciro-Ciroe Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidenreng Rappang*, *PRAJA : Jurnal Ilmiah Pemerintahan*.

Karya, D. J. C. 2012. *Pedoman Teknis PPMK Peningkatan Penghidupan Masyarakat Berbasis Komunitas*. Jakarta: Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kementrian Pekerjaan Umum.

Karya, D. J. C. 2014. *PedomanTeknis Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP)*. Jakarta.

Karya, D. J. C. 2015. *Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan*, *Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kementrian Pekerjaan Umum*. Jakarta: Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kementrian Pekerjaan Umum.

Kemkominfo. 2011. *Program Penanggulangan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II*, *Kemkominfo*. Jakarta: Kementrian Komunikasi dan Informatika RI Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik.

Latif, A., Irwan, I. and Mustanir, A. 2019. 'Analisis Kepemimpinan Terhadap Optimalisasi Masyarakat Pada Perencanaan Pembangunan Di Enrekang', *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik)*, 5(2), pp. 1–20. doi: 10.20956/xxxxxx.

Mustanir, A. 2015/ 'Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Bina Desa', *OSF*.

Mustanir, A. 2019. 'Pemberdayaan Masyarakat Kewirausahaan', *OSF*. Available at: https://www.researchgate.net/publication/331311483_Pemberdayaan_Masyarakat_Kewirausahaan.

Mustanir, A. *et al.* 2020. *Pembangunan Partisipatif dan Pemberdayaan Masyarakat : Implementasi Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Desa*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.

Mustanir, A. and Darmiah. 2016. 'Implementasi Kebijakan Dana Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang', *Jurnal Politik Profetik*, 04(2), pp. 225–238. Available at: http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/2749.

Mustanir, A., Hamid, H. and Syarifuddin, R. N. 2019. 'Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional', in *Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat 2019*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, pp. 1606–1618. doi: DOI: 10.13140/RG.2.2.26012.85129.

Mustanir, A., Hamid, H. and Syarifuddin, R. N. 2020. *Perencanaan Partisipatif Pada Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Wanita Tani*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media. Available at: https://play.google.com/store/books/details/Ahmad_Mustanir_S_I_P_M_Si_PERENCANAAN_PARTISIPATIF?id=E1sAEAAAQBAJ.

Mustanir, A., Razak, M. R. R. and Mursalat, A. 2021. 'Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa Dengan Teknologi Informasi Dimasa Pandemi Covid-19 Dalam Pelayanan Publik Yang Less Contact Di Desa Sipodeceng Kabupaten Sidenreng Rappang', *Surat Pencatatan Ciptaan. Republik Indonesia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nomor Pencatatan 000273695*. Indonesia. Available at: https://e-hakcipta.dgip.go.id/index.php/c?code=YThmMTEyNGVmMzBiZWRjYjIyZmY0ZDg0YjdlMGY2ZWQK.

Suharto, E. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Edited by A. Gunarsa. Bandung: Refika Aditama.

Sulaeman, Z., Mustanir, A. and Muchtar, A. I. 2019. *Partisipasi Masyarakat Terhadap Perwujudan Good Governance di Desa Damai Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang*.

Yunus, S., Suadi, S. and Fadli, F. 2017. *Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu*. Edited by Y. Jamali. Banda Aceh.

BAB 4
POLA PEMBERDAYAAN

Oleh Annisa Ilmi Faried

4.1 Pendahuluan

Pergeseran ekonomi global memerlukan respons yang tepat waktu (Sipayung, *et al.*, 2022). Aspek paling mendasar dari setiap sistem ekonomi adalah sifat ideologis dari prinsip-prinsip dasarnya (Faried & Sembiring, 2019). Meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah prioritas, dan salah satu strategi yang diupayakan adalah pemberdayaan masyarakat. Dengan mengambil bagian dalam berbagai upaya yang berbeda, mulai dari meluncurkan lebih banyak proyek dan kelompok swadaya hingga menciptakan bisnis baru dan memperkuat industri lokal. Untuk berubah menjadi lebih baik dan beralih dari zona nyaman ke zona penuh tantangan dan peluang menuntut nyali (Hastuti, *et al.,* 2020). Ada sejumlah tujuan ekonomi yang, jika tercapai, dapat dianggap bermanfaat bagi status ekonomi suatu bangsa diantaranya termasuk efisiensi, pertumbuhan, kebebasan individu, dan kesetaraan (Hapsari, *et al.,* 2022). Otonomi ekonomi sangat penting mengingat fakta bahwa sejumlah daerah mengalami penurunan pendapatan (Hasanah, *et al.,* 2022).

Mencapai tujuan pembangunan nasional bukan hanya tanggung jawab dan peran utama pemerintah, tetapi melibatkan semua aspek publik dan swasta. (Sudarmanto, *et al.,* 2020). Meningkatkan pengetahuan, memperluas wawasan, dan meningkatkan aparatur sama pentingnya dengan pemberdayaan masyarakat (Mardikanto & Soebiato, 2013) untuk tujuan memberlakukan program sesuai dengan peran

dan profesi khusus mereka. Peluang bagi komunitas untuk menunjukkan kualitas komunitas yang mendukung dapat muncul sebagai hasil dari jenis pemberdayaan ini.

Ketika membahas pertanian, konsep pemberdayaan ekonomi mengacu pada kemampuan seseorang untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan meningkatkan pendapatannya melalui penjualan hasil pertanian. Ini menyiratkan bahwa petani yang mempraktikkan pertanian dapat mencapai banyak hal yang meningkatkan kehidupan mereka sendiri dan membawa mereka kebahagiaan sebagai hasil dari pekerjaan mereka. Selain manfaat yang diberikannya kepada petani, pertanian juga memberikan dukungan bagi perusahaan yang terlibat dalam manufaktur.

Bisnis manufaktur bergantung pada pertanian untuk penyediaan sumber daya mentah, yang tanpanya mereka tidak akan dapat membuat barang. Mereka memperoleh kemampuan mereka untuk memproduksi barang, yang kemudian mereka jual untuk menghasilkan kekayaan dari pertanian. Industri-industri ini juga mempekerjakan sejumlah besar orang di pabrik-pabrik, yang menghasilkan banyak uang dan, sebagai hasilnya, memperoleh otonomi ekonomi. Tidak diragukan lagi ada sejumlah besar manfaat penting yang dapat disumbangkan pertanian bagi perekonomian. Meskipun demikian, pertanian memiliki potensi untuk menjadi instrumen yang kuat dalam memerangi kemiskinan dan pengangguran. Membuatnya menarik bagi generasi muda adalah salah satu strategi untuk mencapai tujuan ini melalui program pendidikan di sekolah harus memberikan penekanan yang sama pada aspek teoretis dan praktis terkait dengan pertanian. Pemberdayaan akan meningkatkan kehidupan sejumlah besar orang. (Warren, *et al.,* 2015); (Fini & Fini, 2016); (Freedman, *et al.*, 2016).

4.2 Pertumbuhan Pembangunan Berbasis *Human Capital*

Dilema kesejahteraan, yang belum diperbaiki sampai saat ini (Faried, 2020). Salah satu strategi untuk membangun ekonomi kreatif yang kompetitif adalah melalui taktik kerja sama dan kemitraan (Hasanah, *et al.,* 2022). Pembangunan berkelanjutan meningkatkan ekonomi kreatif masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup (Faried, *et al.,* 2020). Keberlanjutan adalah global, nasional, masalah regional, komunitas dan rumah tangga (Faried, *et al.,* 2022). Manusia selalu berubah selama perkembangan (Gandasari, *et al.,* 2021). Agar suatu daerah dapat melihat pertumbuhan ekonomi, sangat penting bahwa sumber daya alam dan manusianya dimanfaatkan dengan cara yang efektif dan efisien. Kemampuan sumber daya serta ketersediaan sumber daya tersebut akan berfungsi sebagai penentu utama apakah dimungkinkan untuk mengalokasikan dan menggunakan sumber daya tersebut atau tidak (inventaris, yang mengacu pada faktor kuantitatif, dan kualitas sumber daya, yang mengacu pada fitur kualitatif).

Sangat penting bahwa penerapannya dibingkai dalam kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang mengutamakan kualitas, kesetaraan, keberlanjutan, dan dampak yang rendah terhadap lingkungan. Dalam rangka kegiatan yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, yang juga melibatkan pembangunan daerah, menjadi semakin jelas bahwa sumber daya manusia memainkan peran penting. Kegiatan tersebut meliputi pembangunan daerah. Kehadiran sumber daya manusia telah mengarah pada pengembangan cara berpikir baru mengenai penyelidikan teori-teori mengenai perluasan ekonomi. Cara berpikir yang segar ini menetapkan sumber daya manusia sebagai sistem pendukung utama untuk pertumbuhan ekonomi di semua tingkatan secara global, nasional, dan lokal.

Itulah mengapa penting untuk menemukan jawaban atas masalah dalam ekonomi informal (Nainggolan, *et al*., 2019). Berpikir kritis dan kemampuan untuk menemukan solusi untuk masalah adalah komponen penting dari proses kreatif (Sartika, *et al*., 2022).

Manusia adalah kekuatan pendorong di balik inovasi dan penciptaan produk baru, seperti yang telah ditetapkan sebagai fungsi utama bagi modal manusia. Fungsi modal manusia yang bernuansa dalam pertumbuhan ekonomi bukanlah sesuatu yang dapat dipelajari secara terpisah. Pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan dapat dipercepat dengan berinvestasi dalam kemampuan masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa, dan ketersediaan data tentang topik ini dapat membantu mengarahkan kebijakan publik (McGrath & Gu, 2016).

Konsep modal manusia dapat dilihat sebagai kekuatan pendorong di balik kedua subbidang ekonomi ini. Banyaknya input yang menghasilkan output ekonomi secara kolektif disebut sebagai modal. Modal menunjukkan faktor-faktor produksi yang bertanggung jawab atas generasi produk atau layanan dalam suatu ekonomi. Selama bertahun-tahun, aliran pemikiran ekonomi yang dominan berfokus pada pentingnya modal fisik dan nyata (mesin, sumber daya alam, pabrik, peralatan, dll.) sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi jangka pendek, dengan perubahan teknologi eksogen dan tidak dapat dijelaskan berfungsi sebagai kekuatan pendorong di balik pertumbuhan jangka panjang (McGrath & Gu, 2016). Meskipun Romer berpendapat bahwa ekonomi perlu berinvestasi dalam modal manusia sebelum mereka dapat menggunakan teknologi dan ide-ide baru (Nelson & Phelps, 1966), segala sesuatu di sekitar manusia yang berinteraksi (Sitorus, *et al.*, 2022).

Dalam sebagian besar teori pertumbuhan ekonomi, modal manusia dan kemajuan teknologi secara bergantian muncul sebagai pendorong utama ekspansi ekonomi (Gomes, 2002).

Sumber daya manusia adalah segala sesuatu yang meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Pengembangan sumber daya manusia menjadi komponen integral dari upaya menyeluruh untuk meningkatkan kinerja bisnis dan efektivitas biaya. Sebagai konsekuensi dari hal ini, bisnis memiliki tanggung jawab untuk memiliki pemahaman sumber daya manusia, karena hal itu akan meningkatkan kebahagiaan karyawan dan kinerja secara keseluruhan. Terlepas dari kepercayaan yang tersebar luas bahwa investasi dalam modal manusia memiliki dampak menguntungkan pada kinerja bisnis, konsep kinerja yang berkaitan dengan modal manusia sebagian besar masih belum teruji. Kecepatan dan optimalisasi pertumbuhan regional menentukan kapasitas sumber daya ekonomi. Membatasi sumber Kekuatan pembangunan yang buruk dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi regional.

4.3 Pembangunan Melalui Perencanaan Partisipatif Masyarakat

Sejauh mana suatu komunitas dapat memanfaatkan sumber daya secara efektif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perubahan, dinamika, dan kemajuan yang dibuat oleh suatu masyarakat. Agar masyarakat secara keseluruhan dapat menuai manfaat penuh dari sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), dan aset sosial dan budaya, anggotanya harus mampu mengelola dan memanfaatkan sumber daya tersebut secara efektif (terutama dalam hal kesejahteraan ekonomi).

Manfaat proses pemberdayaan yang hanya dijalankan sebagian dan tidak terintegrasi (program yang tidak terintegrasi) tidak terwujud. Proses pemberdayaan masyarakat terbatas pada program sosial, bukan ekonomi. Akibatnya, perhatian utama masyarakat terus menjadi kesejahteraan ekonominya. Pembangunan berkelanjutan adalah kunci bagi masyarakat yang sejahtera. Jika kemiskinan bisa diturunkan, kesejahteraan masyarakat juga bisa ditingkatkan. Pembangunan partisipatif

merupakan strategi untuk mengurangi kemiskinan. Ini adalah pendekatan pembangunan yang berfokus pada otonomi daerah dan memperluas dan mengembangkan masyarakat. Manfaat dari bentuk pembangunan ini bermanfaat bagi seluruh masyarakat, dan diselenggarakan secara sadar dan mandiri oleh masyarakat. Pembangunan partisipatif berpotensi mengentaskan kemiskinan.

Otoritas pemerintah merencanakan proyek pembangunan daerah secara terpusat (Maryam, 2015). Distribusi pembangunan ekonomi yang tidak merata dapat ditelusuri kembali, sebagian besar, ke kesenjangan yang melekat dalam ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Namun, ada sejumlah aspek lain yang juga sangat penting. Beberapa faktor lain ini termasuk perbedaan demografi, potensi kesenjangan lokasi, perbedaan aksesibilitas dan kekuatan (pengambilan keputusan), dan perbedaan potensi pasar. Ketidakadilan ini berakar dalam karena disebabkan oleh ketidakseimbangan antara kelimpahan sumber daya alam dan kekayaan sumber daya manusia. Memproduksi komoditas secara lokal dan menambah nilai bagi mereka adalah kunci untuk membuka ekonomi pasar yang sedang berkembang.

Konsep pemberdayaan masyarakat mengacu pada upaya yang dilakukan untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya manusia (SDM) yang tersedia secara lebih efektif di masyarakat pedesaan. Tujuan pemberdayaan adalah untuk meningkatkan kemampuan seseorang, khususnya kelompok lemah dan rentan, sehingga kelompok-kelompok tersebut memiliki kemampuan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: (1) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka dapat bebas dari kebutuhan dasar tersebut; (2) menunjukkan sumber daya produktif yang memungkinkan mereka untuk meningkatkan pendapatan mereka dan mendapatkan barang dan jasa yang mereka butuhkan; dan (3) berpartisipasi dalam proses pengembangan dan keputusan yang mempengaruhi mereka (Ahfan, *et al.,* 2015); (Sari, 2016); (Mustanir, *et al.,* 2018).

Penting untuk membentuk komunitas dalam membangun dan membentengi strukturnya menjadi kelompok yang mampu mengatur keberadaannya agar sesuai dengan persyaratan perkembangan ini. Ketika motivasi dan kapasitas aktor lokal diperkuat melalui inisiatif pembangunan, mereka lebih mampu merencanakan dan mengimplementasikan pembangunan menggunakan sumber daya mereka sendiri dan untuk memastikan bahwa itu berkelanjutan. Artinya bahwa, untuk mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan yang berkeadilan, mereka yang terlibat dalam pembangunan berbasis masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk mengelola partisipasi masyarakat secara efektif dalam pembangunan.

Partisipasi bagian dari perencanaan pembangunan yang dapat membantu memiliki rasa keterhubungan dan tanggung jawab masyarakat. Ini dapat membantu mereka yang terlibat dalam proses menciptakan rasa keterhubungan dan tanggung jawab komunitas. Melibatkan penduduk setempat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembangunan sangat penting untuk keberhasilan setiap inisiatif perbaikan masyarakat. Musrenbang merupakan wadah yang didirikan oleh pemerintah dengan tujuan melaksanakan perencanaan pembangunan. Keterlibatan ini dipermudah dengan terbentuknya forum (musyawarah perencanaan pembangunan). metode perencanaan yang bekerja dari bawah ke atas dan mendorong keterlibatan publik. Musrenbang ini dimulai dari tingkat pemerintahan lokal (desa) terendah dan naik melalui tingkat kecamatan dan kabupaten/kota hingga mencapai tingkat tertinggi.

Untuk menjamin bahwa metode pertumbuhan ekonomi yang diinginkan akan berkelanjutan, diperlukan pengelolaan yang menyeluruh, ketersediaan, serta kebijakan yang tepat dan relevan, serta berkonsentrasi pada pengembangan tatanan ekonomi daerah. Tanpa hal-hal ini, tidak akan mungkin untuk memastikan

bahwa proses pertumbuhan ekonomi yang diinginkan berkelanjutan.

Dinamika pembangunan ekonomi saat ini menunjukkan bahwa daerah yang melimpah sumber daya ekonomi maju pada tingkat yang lebih besar daripada daerah yang kekurangan sumber daya ekonomi. Dalam rangka mendorong, memacu, dan mengaktifkan kegiatan ekonomi masyarakat berkembang, pengembangan potensi lokal yang didasarkan pada komoditas merupakan kunci yang dapat digunakan. Pertumbuhan potensi lokal yang didasarkan pada produksi komoditas merupakan faktor penting yang dapat mendorong, memacu, dan mengaktifkan kegiatan ekonomi masyarakat berkembang (Handoko, 2019).

Masyarakat yang lebih mandiri dan sadar budaya adalah hasil dari pembangunan berbasis masyarakat. Swasembada dan pertumbuhan kolektif sangat penting bagi kemampuan masyarakat mana pun untuk berkembang dan membuat pembangunan ke depan. Masyarakat dalam komunitas yang diberdayakan kuat dalam segala hal: secara fisik, mental, akademis, fisik, dan budaya. Memotivasi lingkungan yang mandiri untuk mengadopsi praktik yang menumbuhkan lingkungan yang kondusif untuk mewujudkan potensi penuh masyarakat. Sebagian besar, pembangunan berbasis masyarakat dapat dipahami sebagai proses perubahan yang disengaja. Oleh karena itu, penting bagi administrator dan fasilitator untuk terlibat dalam kegiatan perencanaan sebelum pelaksanaan kegiatan pembangunan berbasis masyarakat. Kesadaran, persiapan, kemauan, dan kapasitas untuk terlibat dalam pencapaian tujuan adalah semua komponen yang diperlukan dari pembangunan berbasis masyarakat.

Pembangunan berbasis masyarakat akan membutuhkan kapasitas dan jumlah masyarakat untuk dilakukan agar dapat terjadi pertumbuhan di masyarakat. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa masyarakat hanya dapat tumbuh dan beradaptasi untuk menghadapi tantangan kehidupan modern melalui upaya kolektif,

dan pertumbuhan berbasis komunitas adalah bagian penting dari proses ini.

Perkembangan nasional mengasumsikan bahwa kebutuhan masyarakat sama atau setara dengan kebutuhan penyusun kebijakan. Inilah alasan mendasar masyarakat tidak dapat menggunakan pembangunan, sehingga membuang-buang sumber daya dan masyarakat mengabaikan pembangunan pemerintah. Nilai yang sudah melekat pada masyarakat dan otentik harus dilestarikan melalui upaya pemberdayaan masyarakat. Membangun cita-cita masyarakat tentang persatuan, keikhlasan, gotong royong, kejujuran, dan usaha keras agar mereka dapat berkembang dan menjadi lebih mandiri. Partisipasi dan pemberdayaan berbeda tetapi seringkali membingungkan. Fokusnya adalah pada individu dan perubahan yang mereka buat, apakah pemberdayaan adalah proses atau hasil. Partisipasi melibatkan institusi, gerakan, atau acara, bukan aktor. Tindakan yang bermakna. Partisipasi meningkatkan komitmen, kepemilikan, dan kekuasaan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahfan, R., Asrori & Sipahutar, H., 2015. Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Pnpm Mp, Desa Peradaban, CSR Dan Posdaya (Konteks Lahirnya UU NO. 6 TAHUN 2014). *Jurnal Bina Praja,* 1(7), pp. 89-100.

Faried, A. I., 2020. Analisis Meredam Angka Kemiskinan Melalui Pendekatan Ekonomi. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan,* 1(20), pp. 1-11.

Faried, A. I., Sebayang, S. & Sembiring, R., 2020. Optimalisasi Usaha Mikro Produksi Tempe Terhadap Kesejahteraan Ekonomi di Desa Sei Mencirim. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan,* 2(20), pp. 170-178.

Faried, A. I. & Sembiring, R., 2019. *Perekonomian Indonesia: Antara Konsep dan Realita Keberlanjutan.* Medan(Sumatera Utara): Indonesia.

Faried, A. I., Sembiring, R. & Hasanah, U., 2022. A Chicken Farm and Chilli Plants in Cingkes Village for Agricultural Development and Economic. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal) : Humanities and Social Sciences,* Agustus, 3(5), pp. 24208-24219.

Fini, F. M. & Fini, A. A. S., 2016. A Study on the Relationship between Communication Skills and Mental Health and Job Empowerment. *Journal of Exploratory Studies in Law and Management,* 2(3), p. 270–275.

Firth , C., Maye, D. & Pearson, D., 2011. Developing "community" in community gardens. *Local Environment,* Issue 6, pp. 555-568.

Freedman, D. A. et al., 2016. Systematic Review of Factors Influencing Farmers' Market Use Overall and among Low-Income Populations. *Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics,* 7(116), pp. 1136-1155.

Freedman, D. et al., 2016. Systematic Review of Factors Influencing Farmers' Market Use Overall and among Low-Income Populations. *Journal of the American Academy of Nutrition and Dietetics,* 7(116), p. 1136–1155.

Gandasari, D. et al., 2021. *Dasar-Dasar Ilmu Sosial.* Medan(Sumatera Utara): Yayasan Kita Menulis.

Gomes, O., 2002. Investment in Humans, Technological Diffusion And Economic Growth - An Optimal Control Interpretation. Pp. 74-84.

Grebitus, C., Printezis, I. & Printezis, A., 2017. Relationship between Consumer Behavior and Success of Urban Agriculture. *Ecological Economics,* 4(136), pp. 189-200.

Handoko, L. T., 2019. *Pengembangan Potensi Lokal untuk Pembangunan Ekonomi Masyarakat.* [Online] Available at: http://lipi.go.id/berita/pengembangan-potensi-lokal-untuk-pembangunan-ekonomi-masyarakat/21900

Hapsari, T. D. et al., 2022. Pengantar Ekonomi Makro. S.l.:PT. Global Eksekutif Teknologi.

Hasanah, U., Faried, A. I. & Sembiring, R., 2022. Perbandingan Model Pola Pengembangan dan Strategi Kemitraan UMKM Danau Siombak. *Jurnal Pendidikan dan Konseling,* 4(4), pp. 2579-2588.

Hasanah, U., Sari, W. I. & Faried, A. I., 2022. Peran Produktif Wanita Pesisir dalam Pengolahan Hakau Udang Desa Pahlawan Tanjung Tiram. *COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat,* 2(3), pp. 189-194.

Hastuti, P. et al., 2020. *Kewirausahaan dan UMKM.* Medan(Sumatera Utara): Yayasan Kita Menulis.

Mardikanto, T. & Soebiato, P., 2013. *Pemberdayaan Masyarakat: Dalam Perspektif Kebijakan Publik.* Bandung: ALFABETA.

Maryam, D., 2015. Perencanaan Partisipatif Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Desa Kebumen Kecamatan Sumberjo Kabupaten Tanggamus). *Ilmu Dakwah dan Pengembangan Komunitas,* 1(10), pp. 1-21.

McGrath , S. & Gu, Q., 2016. *Routledge Handbook of International Education and Development.* New York: Routledge.

Mustanir, A., Hamid, H. & Syarifuddin, R. N., 2018. Pengaruh Motivasi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Di Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. *Ilmiah Clean Government,* 1(2), pp. 27-39.

Nainggolan, L. E. et al., 2019. *Belajar dari Covid-19: Perspektif Ekonomi dan Kesehatan.* Medan(Sumatera Utara): Yayasan Kita Menulis.

Nelson, R. R. & Phelps, E. S., 1966. Investment in humans, technological diffusion, and economic growth. *American Economic Review,* 2(51), p. 69–75.

Sari, R., 2016. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Pariwisata (Meneropong usaha penginapan masyarakat Lokal dan Manca Negara di Desa Mon Ikeun Lhoknga).. *Al-Bayan,* 34(22).

Sartika, S. H. et al., 2022. *Ekonomi Kreatif.* Medan(Sumatera Utara): Yayasan Kita Menulis.

Sipayung, P. D. et al., 2022. *Hukum Ketenagakerjaan.* Medan: Yayasan Kita Menulis.

Sitorus, E. et al., 2022. *Pengantar Pengetahuan Lingkungan.* Medan(Sumatera Utara): Yayasan Kita Menulis.

Sudarmanto, E. et al., 2020. *Konsep Dasar Pengabdian Kepada Masyarakat: Pembangunan dan Pemberdayaan.* Medan: Yayasan Kita Menulis.

Warren, E., Hawkesworth, S. & Knai, C., 2015. Investigating the association between urban agriculture and food security,

dietary diversity, and nutritional status: A systematic literature review. *Food Policy,* Issue 53, pp. 54-66

BAB 5
PRINSIP-PRINSIP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Oleh Aksal Mursalat

5.1 Pendahuluan

Secara umum, lingkup pemberdayaan didasarkan pada berbagai bidang yang sering menjadi sasaran dalam pemberdayaan masyarakat. Menurut (Sany, 2019) pemberdayaan masyarakat merupakan cara dan metode yang digunakan individu, kelompok dan komunitas sehingga mereka menjadi mampu mengelola lingkungan dan mencapai tujuan mereka sendiri, dan dengan demikian mampu bekerja dan membantu satu sama lain untuk memaksimalkan kualitas hidup mereka. Menurut (Ndraha, 2003) lingkup pemberdayaan masyarakat terdiri dari 4 (empat) bidang yaitu bidang: 1) politik; 2) ekonomi; 3) sosial budaya; dan 4) lingkungan.

Pemberdayaan dalam ranah politik dirancang untuk memberikan masyarakat posisi tawar yang tinggi ketika berhadapan dengan dengan pihak-pihak terkait, baik pemerintah, LSM maupun swasta yang memiliki agenda dan proyek di wilayah masyarakat. Menurut (Rahmadi & Fitria, 2022) konsep partisipasi politik bertujuan untuk meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam politik. Selain menarik partisipasi masyarakat dalam lingkup politik, tujuannya untuk reformasi birokrasi dengan transparansi, intergritas, dan akuntabilitas dalam masyarakat.

Pemberdayaan dalam bidang ekonomi biasanya dikaitkan dengan kemandirian dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, upaya produktif yang dapat menjadi sumber pendapatan atau mata pencaharian tergantung pada fokusnya dalam lingkup pemberdayaan bidang ekonomi. Menurut (Mustanir et al., 2021) pemberdayaan dengan mengetahui potensi dan permasalahan yang ada di desa, diharapkan mampu memberikan solusi kepada masyarakat dalam meningkatkan nilai tambah secara sosial dan ekonomi. Selain itu, (Mursalat et al., 2022) mengemukakan bahwa dengan adanya kegiatan penyuluhan dalam kewirausahaan yang meliputi tanggungjawab, inovasi, militansi, dan berbagi dapat membangun kemandirian dan mempuyai kemampuan kreatif dalam mengembangkan ide untuk menciptakan peluang usaha.

Pemberdayaan sosial budaya berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, baik secara individu maupun kolektif. Orientasi dalam pemberdayaan di bidang sosial budaya ini berkisar pada penguatan solidaritas masyarakat, membuat masyarakat lebih rentan terhadap konflik, dan penguatan solidaritas sosial. Cakupan ini juga termasuk persepsi masyarakat tentang keadaan masyarakat yang majemuk baik dari segi suku, kepercayaan atau agama, maupun status sosial. Aspek pemberdayaan akan terkait dengan masalah-masalah sosial-budaya yang dianut oleh masyarakat itu sendiri, sehingga sebagai upaya masyarakat untuk mensinergikan pemberdayaan di suatu wilayah biasanya diperkuat dengan nilai-nilai lokalitas yang mewujudkan keharmonisan yang telah menjadi nilai kearifan lokal dalam kehidupan berkeluarga (Nugraha et al., 2019). Pemberdayaan lingkungan berfokus pada upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan untuk menjaga kelestariannya. Upaya tersebut hanya dapat dicapai jika masyarakat memahami dan peduli terhadap kondisi lingkungan dan kelestariannya.

Pemahaman dan minat masyarakat ini hanya dapat tumbuh dan berkembang melalui upaya pemberdayaan. Menurut (Subekti et al., 2018) pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan hidup merupakan konsep pemberdayaan yang memanfaatkan potensi alam yang ada disekitar masyarakat. Selain itu, (Yazid & Alhidayatillah, 2018) mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat bisa dimulai dari kepedulian masyarakat terhadap informasi lingkungan, baik manfaat maupun dampak sehingga menjadi sebuah pengetahuan tentang lingkungan yang sesuai dengan keinginan masyarakat dan bisa menjadi pendukung dalam setiap aktivitasnya.

Apabila lingkup pemberdayaan masyarakat didasarkan pada proses, dapat dikategorikan ke dalam 3 (tiga) hal, yakni: (1) pra pemberdayaan, yang berupa menciptakan ruang interaksi yang kondusif agar masyarakat merasa percaya diri dan mampu untuk menjadi pelaku pembangunan; (2) pelaksanaan pemberdayaan, yang menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan yang setara dengan pemangku kepentingan lainnya; dan (3) pasca pemberdayaan, dimaksudkan bahwa lingkup ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terus berproses dalam pemberdayaan meskipun keterlibatan pemangku kepentingan lain sudah berakhir, karena keterbatasan waktu, penganggaran dan kegiatan (Agussani, 2021).

Dalam konteks ini, pemangku kepentingan di luar masyarakat secara institusional tetap terlibat dalam mendukung dan memfasilitasi dalam proses-proses pemberdayaan masyarakat yang terus menerus berlangsung. Merujuk pada pendapat (Najiyati, 2014), terdapat empat prinsip yang sering digunakan dalam program pemberdayaan, yakni prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan atau kemandirian, dan keberlanjutan.

5.2 Kesetaraan

Kesetaraan berasal dari kata "setara" atau sederajat yang berarti sama tingkatan, kedudukan atau pangkatnya. Menurut (Meo & Boro, 2021) kesetaraan merupakan prinsip keadilan pertama (*first principle of justice*) yang berarti setiap orang memiliki hak yang sama untuk kebebasan dasar yang kompatibel sesuai dengan kebebasan yang diterima orang lain. Kesetaraan atau kesederajatan menunjukkan pada tingkat yang sama, pada posisi yang sama, dan tidak di atas atau di bawah satu sama lain. Kesetaraan ini merupakan salah satu prinsip dasar pemberdayaan masyarakat yang harus dipahami bersama. Dalam konteks ini yang dimaksud dengan kesetaraan antara masyarakat dengan lembaga pelaksana program pemberdayaan masyarakat, maupun pihak yang terlibat dalam program pembangunan. Semuanya dibangun dan dijalankan berdasarkan kesetaraan dan kedudukan. Menurut (Lesnussa, 2019) prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan.

Dinamika yang dibangun dalam hubungan yang setara dalah dengan mengembangkan mekanisme untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman dan keahlian. Setiap orang saling mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing sehingga terjadi proses saling belajar. Kesalahan umum dalam proses pemberdayaan adalah para pelaksana kegiatan biasanya memposisikan diri sebagai guru yang serba tahu. Sebaliknya, masyarakat dianggap sebagai murid yang perlu diberi pengetahuan yang beragam dengan mendengarkan apa yang diberikan kepada mereka dan melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka.

Hal ini sering terjadi karena fasilitator tidak memahami keterampilan dan kebutuhan masyarakat dan ingin cepat mentransfer pengetahuan yang mereka miliki tentang keterampilan mereka. Dalam banyak kasus, masyarakat telah hidup, menyadari, dan merasakan masalah yang muncul di desa mereka, sehingga mereka benar-benar memiliki pengetahuan yang baik tentang daerah mereka. Inilah yang biasa disebut kearifan lokal.

Dalam hal ini, kesetaraan berlaku untuk pria dan wanita, tua dan muda. Semua individu dalam masyarakat mempunyai kedudukan yang sama sehingga mempunyai hak, tugas dan tanggung jawab yang sama dalam melaksanakan kebijakan dan program pembangunan di masyarakat. Menurut (Haris et al., 2019) kesetaraaan gender ataupun keadilan gender merupakan suatu pandangan bahwa semua orang harus diperlakukan setara tanpa membedakan identitas gender mereka yang berlaku di semua bidang kehidupan, dimana interaksi antara perempuan dan laki-laki berlangsung, baik di lingkup domestik maupun di lingkup publik.

5.3 Partisipatif

Partisipatif merupakan pola pendekatan perencanaan pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat pada umumnya bukan saja sebagai obyek tetapi sekaligus sebagai subyek pembangunan, sehingga nuansa yang dikembangkan dalam perencanaan pembangunan benar-benar dari bawah (Rachmawati *et al.,* 2018). Pengembangan partisipatif dilakukan untuk mewujudkan masyarakat sebagai implementasi pembangunan (Azizah, 2020). Esensi dari pemberdayaan masyarakat adalah partisipasi.

Namun, partisipasi masyarakat belum dapat disebut sebagai pemberdayaan apabila belum ada unsur memberikan kewenanangan atau sebagian kewenangan dan memberikan

dorongan untuk lebih berdaya. Menurut (Dewi & Nulul, 2018) partisipasi masyarakat merupakan sebuah keputusan masyarakat sebagai individu yang melibatkan aktivitas komunikasi di dalamnya.

Selama ini praktik pemberdayaan masyarakat yang dilakukan belum memberikan kesempatan dan kebebasan penuh kepada masyarakat untuk menentukan nasibnya sendiri melalui program-program pembangunan yang mereka butuhkan. Sebagian besar program pembangunan yang diperkenalkan adalah yang dirancang dan ditetapkan oleh para pembuat kebijakan baik di pemerintahan maupun lembaga yang mendanainya. Keterlibatan masyarakat masih sebatas mobilisasi dan belum pada tahap partisipasi. Untuk meningkatkan partisipasi tersebut adalah dengan mengajak masyarakat untuk mengambil bagian dalam pengambilan keputusan karena merekalah yang lebih memahami apa yang dibutuhkan dalam meningkatkan kesejahteraan (Zainal & Sarwoprasodjo, 2018).

5.4 Keswadayaan atau Kemandirian

Keswadayaan merupakan salah satu prinsip menghargai serta mendahulukan kemampuan masyarakat dibandingkan bantuan dari pihak eksternal (Setiadi & Pradana, 2022). Banyak program pengembangan masyarakat yang hanya menyalurkan bantuan secara cuma-cuma. Dalam konteks ini, memang jauh lebih dominan daripada bantuan peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan kemandirian dan pemberdayaan. Hal ini bisa dikatakan bahwa bantuan yang bersifat langsung dapat dinikmati oleh anggota masyarakat yang mendapatkan bantuan.

Di sisi lain, dukungan peningkatan kapasitas merupakan proses yang lambat dan hasilnya tidak langsung terlihat. Dalam proses pemberdayaan, bantuan atau dukungan untuk

membangun kapasitas dan kemandirian lebih diutamakan daripada bantuan secara langsung, walaupun hasilnya dapat dinikmati dalam jangka panjang. Dukungan dan bantuan yang diberikan secara langsung bisa menjadi motivasi masyarakat, tetapi sumber utama untuk peningkatan kapasitas dan kemandirian berasal dari masyarakat itu sendiri. Upaya pengembangan kompetensi dan kemandirian yang bersumber dari sumber daya masyarakat sendiri disebut dengan kesadayaan atau kemandirian. Proses pemberdayaan seharusnya berorientasi jangka panjang yakni memberdayakan masyarakat dalam hal kualitas pengetahuan dan keterampilan sehingga masalah yang dihadapi dapat diselesaikan secara mandiri. Menurut (Imran, 2022) pemberdayaan merupakan upaya untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan kemampuan personalnya guna memecahkan masalah mereka masing-masing khususnya dalam memanfaatkan potensi sumber daya lokal. Oleh karena itu, salah satu prinsip terpenting dalam pemberdayaan masyarakat adalah keswadayaan atau kemandirian.

5.5 Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan adalah tindakan tindakan yang secara bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dan sumberdaya manusia dalam pembangunan berkelanjutan dalam lingkungan masyarakat (Wadu et al., 2020). Proses pemberdayaan masyarakat bukanlah proses yang instan dan juga bukan sekedar pelaksanaan program pembangunan. Pemberdayaan masyarakat adalah proses yang terus-menerus, berkesinambungan dan berkelanjutan.

Hal ini penting untuk diperhatikan mengingat banyak kegiatan pemberdayaan masyarakat yang hanya berorientasi pada program pembangunan yang dibatasi waktu dan pendanaannya. Apabila program tersebut sudah selesai,

pelaksana program dan masyarakat tidak memikirkan bagaimana kelanjutannya.

Menurut (Mursalat & Irwan, 2021) upaya untuk mencapai hasil yang maksimal dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan adalah dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi serta terus membangun komunikasi dan koordinasi yang baik. Oleh karena itu, salah satu yang menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah agenda pemberdayaan yang sebenarnya adalah prinsip keberlanjutan.

Keempat prinsip tersebut diterapkan agar proses pemberdayaan dapat menciptakan masyarakat mandiri khususnya dalam meningkatkan kesejahteraannya secara berkelanjutan. Indikator keberhasilan penerapan prinsip pemberdayaan tersebut antara lain: (1) Masyarakat berperan sebagai aktor dalam pembangunan. (2) Program pembangunan yang dilaksanakan didasarkan pada partisipasi masyarakat yang dilibatkan mulai dari pembuatan kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan hingga pengelolaan hasil pembangunan. (3) Masyarakat berkontribusi sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya, baik berupa sumberdaya alam, sumberdaya manusia maupun keuangan. (4) Program pembangunan yang dilaksanakan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Agussani. 2021. Desain Pembersayaan Masyarakat Modern. In *PT RajaGrafindo Persada*. Depok : Rajawali Pers.

Azizah, I. S. 2020. Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa: Studi Implementasi Program Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung. *Journal of Maritime and Education (JME …*, *2*(2), 134–141. https://www.ejournal.poltek-amimedan.ac.id/index.php/jme/article/view/27

Dewi, M., & Nulul, N. A. 2018. Komunikasi Partisipatif Masyarakat Industri dalam Mendukung Branding Kota Madiun. *Jurnal ILMU KOMUNIKASI*, *15*(1), 75–90. https://doi.org/10.24002/jik.v15i1.1340

Haris, D., Jendrius, J., & Afrizal. 2019. Kesetaraan Gender dalam Industri Media: Studi Mobilitas Vertikal Karir Pekerja Perempuan di Riau Televisi. *Kafa`ah: Journal of Gender Studies*, *9*(2), 163–174. https://doi.org/10.15548/jk.v9i2.265

Imran, M. 2022. Peningkatan Kapasitas Perempuan Miskin Perkotaan Melalui Pendidikan Keterampilan Berbasis Kewirausahaan. *Robust: Research of Business and Economics Studies*, *1*(2), 20–56. https://doi.org/10.31332/robust.v1i2.3608

Lesnussa, J. U. 2019. Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Di Negeri Halong Baguala Ambon. *Jurnal Sosio Sains*, *5*(2), 91–107. https://doi.org/10.37541/sosiosains.v5i2.150

Meo, E. N., & Boro, V. I. A. 2021. Kesetaraan Gender dalam Perekrutan Aparatur Sipil Negara Menempati Jabatan Struktural di Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Perspektif*, *10*(1), 204–210. https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4274

Mursalat, A., & Irwan, M. 2021. Pembuatan Pakan Berbasis Bahan Lokal dan Saluran Distribusi Melalui E-Commerce Pada Usaha Peternakan Ayam Petelur Desa Teppo Kabupaten Sidenreng Rappang. *Madaniya*, *2*(2), 191–196.

Mursalat, A., Irwan, M., Razak, M. R. R., & Asra, R. 2022. Pemberdayaan Panti Asuhan Melalui E-Commerce Sebagai Media Bisnis Untuk Menunjang Kreativitas Dan Kemandirian Berwirausaha. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, *6*(2), 1228–1238. https://doi.org/doi.org/10.31764/jmm.v6i2.7146

Mustanir, A., Razak, M. R. R., & Mursalat, A. 2021. Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa Dengan Teknologi Informasi Dimasa Pandemi Covid-19 Dalam Pelayanan Publik Yang Less Contact. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, *5*(5), 2246–2258. https://doi.org/10.31764/jmm.v5i5.5250

Najiyati, S., Asmana, A., & Suryadiputra, I. N. N. 2014. Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut. Wetlands International – Indonesia Programme. Bogor.

Ndraha, T. 2003. Kronologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Direksi Cipta, Jakarta.

Nugraha, A. R., Perbawasari, S., Zubair, F., & Novianti, E. 2019. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Komunikasi Efektif Berbasis Potensi Wisata dan Kearifan Lokal. *JPPM (Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat)*, *3*(1), 123–132. https://doi.org/10.30595/jppm.v3i1.3546

Rachmawati, N., Siraj, N., & Bharoto, R. H. 2018. Implementasi Perencanaan Partisipatif Dalam Pembangunan Fisik di Desa Suci Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon. *Jurnal Publika Unswagati Cirebon*, *6*(2), 126–139. https://doi.org/10.33603/publika.v6i2.1550

Rahmadi, A. N., & Fitria, N. J. L. 2022. Pelaksanaan Webinar Makin Cakap Digital sebagai Bentuk Pemberdayaan Pandu Digital Daring untuk Masyarakat Indonesia. *Journal of Social and Policy Issues*, *2*(2), 77–81. https://journal.pencerah.org/index.php/jspi/article/view/113%0Ahttps://journal.pencerah.org/index.php/jspi/article/download/113/48

Sany, U. P. 2019. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Al Qur'an. *Jurnal Ilmu Dakwah*, *39*(1), 32–44. https://doi.org/10.21580/jid.v39.1.3989

Setiadi, M. B., & Pradana, G. W. 2022. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata Genilangit di Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan. *Publika*, *10*(3), 881–894. https://doi.org/10.26740/publika.v10n4.p881-894

Subekti, P., Setianti, Y., & Hafiar, H. 2018. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Lingkungan Hidup Di Desa Margalaksana Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Kawistara*, *8*(2), 148–159. https://doi.org/10.22146/kawistara.30379

Wadu, L. B., Gultom, A. F., & Pantus, F. 2020. Penyediaan Air Bersih Dan Sanitasi: Bentuk Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, *10*(2), 80–88. https://doi.org/10.20527/kewarganegaraan.v10i2.9318

Yazid, Y., & Alhidayatillah, N. 2018. Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Lingkungan. *Jurnal Dakwah Risalah*, *28*(1), 1–9. https://doi.org/10.24014/jdr.v28i1.5538

Zainal, A. G., & Sarwoprasodjo, S. 2018. Strategi Komunikasi Politik Pemerintahan Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pedesaan (Studi Program "Bupati Ronda" di Kabupaten Lampung Tengah). *Journal Of Communication Studies*, *3*(1), 54–66.

BAB 6
STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Oleh Iwan Henri Kusnadi

6.1 Pendahuluan

Gunanjar (1996:145) mengemukakan bahwa pemberdayaan berasal dari kata daya yang artinya kekuatan atau kemampuan. Pemahaman pemberdayaan bermakna sebagai upaya meningkatkan kemampuan sekaligus potensi yang dimiliki masyarakat sehingga mereka dapat mengaktualisasikan jati diri, hasrat serta martabatnya secara maksimal sehingga dapat bertahan sekaligus mengembangkan dirinya secara mandiri. Jadi dalam garis besarnya bahwa pemberdayaan sendiri lebih diarahkan untuk meningkatkan berbagai kemampuan ekonomi secara produktif agar mampu untuk menghasilkan nilai tambah yang tinggi sekaligus dapat meningkatkan pendapatan yang lebih besar dan bermanfaat. Untuk itu dalam upaya peningkatan kemampuan tersebut diarahkan agar dapat menghasilkan suatu nilai tambah atau paling tidak harus ada perbaikan akan empat hal, yakni terhadap aspek sumber daya, akses teknologi, akses akses terhadap pemintaan, dan termasuk pasar. Didalam pemberdayaan sendiri sesungguhnya tidak hanya terjadi pada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan, tetapi juga kepada masyarakat yang masih terbatas yang dapat dikembangkan bahkan hingga mencapai kemandirian.

Dalam pemberdayaan ini juga dikenal konsep Tri Bina. Tri Bina dimaksud yaitu: a) Bina manusianya; Bina manusia merupakan upaya dengan mengutamakan kapasitas diri masyarakat yang dibina karena masyarakat yang dibina tersebut harus mengerti apa sesungguhnya yang akan menjadi pemberdayaan yang ada di daerah dimaksud;t b) Bina usaha; Dalam Bina usaha merupakan upaya dibutuhkan atau sangat penting dalam pemberdayaan mengingat bina usaha merupakan langkah paling tepat atau paling cocok untuk jenis usaha yang dipilih dalam hal pemberdayaan itu sendiri; c) Bina Lingkungan; Makna Bina lingkungan ini merupakan suatu analisis manfaat serta dampak dari suatu lingkungan, aspek pelestarian lingkungan itu sendiri justru sangat erat kaitanya dalam menentukan keberlangsungan kegiatan suatu investasi termasuk dalam hal operasi (dimana terkaita dengan kesediaan bahan baku), termasuk didalam lingkup bina lingkungan didukung pula dengan kehidupan sosial, mengingat lingkungan sosial merupakan memiliki korelasi atau menjadi pengaruh utama dalam meningkatkan pemberdayaan.

6.2 Pengertian Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Pengertian masyarakat umumnya dipahami sekumpulan orang yang saling berinterkasi secara *continue*, sehingga terintegrasi sekaligus terdapat relasi sosial yang terpola dan terorganisisasi. Masyarakat juga sering dipahami sebagai sekumpulan manusia yang relatif mandiri yang hidup bersama cukup lama mendiami suatu wilayah tertentu, yang memiliki kebudayaan yang sama serta melakukan sebagian besar dari kegiatan dalam kelompok masyarakat tersebut. Dengan memperhatikan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat merupakan sekumpulan manusia atau orang-orang yang saling berinteraksi antar

sesama yang memiliki kawasan wilayah kekuasaan tertentu dengan aturan sekaligus budaya yang sama.

Husen Umar (2008:38) mengemukakan secara etimologi istilah "strategi" berasal dari bahasa Yunani Klasik, dari kata "*stratego*" (jeneral) yang berarti sebagai perencanaan dengan menggunakan cara yang efektif dengan berlandaskan pada sarana-sarana yang dimiliki untuk mencapai suatu tujuan yakni mempertahankan orientasi pada jangka panjang yang jauh untukmasa depan, dengan tujuan sarana interaksi secara efektif yakni sebagai langkah persaingan dalam lingkup sekaligus upaya mengoptimalikan yang diarahkan dalam rangka pencapaian keberlangsungan yang diharapkan. Puji Hadiyanti (2008:27) menyebutkan bahwa strategi sebagai cara untuk mengerahkan tenaga, dana, kemudian daya dan peralatan yang dimiliki untuk mencapai tujuan serta sasaran-sasaran yang ditetapkan. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat sebagai suatu proses yang mengembangkan serta memperkuat kemampuan masyarakat sehingga terus terlibat dalam proses pencapaian tujuan pembangunan yang berlangsung secara dinamis sehingga masyarakat tersebut dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya sekaligus dapat mengambil keputusan secara bebas (*independent*) serta mandiri sejalan dengan harapannya.

Strategi juga merupakan suatu kerangka kerja (*frame work*) yang sekaligus dapat digunakan dalam menyelesaikan setiap masalah dalam suatu organisasi atau perusahaan, apalagi yang berkaitan dengan persaingan organisasi atau perusahaan. Strategi yang disusun organisasi sesungguhnya memerlukan usaha-usaha intensif dalam meningkatkan posisi persaingan usaha melalui produk- produk sebagai output yang ingin dicapainnya.

Dalam konteks strategi intensif dikemukakan Husein Umar (2008:45) tentang sasaran tersebut yang mencakup : a)

Market Penetration Strategy. Strategi ini berusaha untuk meningkatkan market share suatu produk atau jasa melalui usaha- usaha pemasaran yang lebih besar. Strategi ini dapat diimplementasikan baik secara sendiri-sendiri atau bersama dengan strategi lain guna menambah jumlah tenaga penjual, biaya iklan, atau usaha-usaha promosi lainnya. Tujuan dari adanya strategi ini yakni untuk meningkatkan pangsa pasar dengan usaha pemasaran yang masimal; b) *Market Development Strategy; yang b*ertujuan untuk memperkenalkan produk-produk atau jasa yang ada ke daerah-daerah yang secara geografis merupakan daerah baru. Dalam perspektif global, pengembangan pasar berskala internasional sudah banyak dilakukan oleh perusahaan. Tujuan dengan adanya strategi ini yakni untuk memperbesar pangsa pasar. Hal ni dapat dilakukan jika memiliki distribusi terjadi kelebihan kapasitas produksi, pendapatan laba yang sesuai dengan harapan, serta adanya pasar baru atau pasar belum jenuh; c) *Product Development Strategy; dimana s*trategi ini merupakan strategi yang bertujuan agar perusahaan dapat meningkatkan penjualan dengan cara meningkatkan atau memodifikasikan produk-produk atau jasa-jasa yang ada. tujuan dari strategi ini adalah untuk memperbaiki dan mengembangkan produk yang sudah ada.

Jadi strategi pemberdayaan masyarakat adalah keseluruhan upaya untuk mendorong, dalam memotivasi serta membangkitkan kesadaran masyarakat tentang adanya potensi yang dimilikinya serta sebagai upaya yang terus menerus dalam pengembangannya. Jadi proses keseluruhan kegiatan sebagai usaha dalam mendorong percepatan perubahan struktur ekonomi rakyat dalam perekonomian serta produktivitas (pendapatan mereka). Pemberdayaan ekonomi pada dasarnya merupakan usaha untuk memperkuat, kemudian memiliki daya saing tinggi atau maksimal. Jadi

dengan adanya pemberdayaan ekonomi ini diharapkan masyarakat mampu sekaligus dapat mencukupi dan memenuhi kebutuhannya melalui pemberdayaan ekonomi.

6.3 Tujuan Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan strategi pemberdayaan masyarakat yaitu meningkatkan kualitas hidup untuk berdaya, memiliki daya saing dan mandiri. Untuk itu dalam melaksanakan pemberdayaan khususnya kepada masyarakat sasaran. Jadi pemberdayaan masyarakat bertujuan mendorong kolompok-kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik pada kondisi internal (dalam presepsi dari masyarakat itu sendiri) termasuk aspek ekseternal (yang ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil).

Tujuan utama strategi pemberdayaan masyarakat meliputi: a) Pemberdayaan menjadi sebuah proses penting dan harus maksimal serta memerlukan waktu; b) Sebagai proses pemberdayaan dimulai pada upaya menumbuhkan kesadaran kepada sasaran akan potensi serta berbagai kebutuhan yang dapat dikembangkan serta diberdayakan secara mandiri; c). Pemberdayaan sebagai pertumbuhan system nilai, budaya dan kearifan lokal sekaligus nilai-nilai wisdom (nilai-nilai bijak) yang memiliki nilai luhur didalam masyarakat berbudaya seperti kearifan local sekaligus gotong royong, membangun kerjasama, nilai hormat-menghormati kepada yang lebih tua, serta nilai-nilai kearifan lokal lainnya yang menjadi jati diri masyarakat suatu wilayah tertentu.

Pemberdayaan ini menjadi suatu proses yang memerlukan waktu sehingga dilakukan secara bertahap serta berkesinambungan. Tahapannya dilakukan secara logis dari sifatnya yang sederhana menuju yang komplek. Keseluruhan kegiatan pendampingan atau pembinaan ini dilakukan secara bijaksana, bertahap, dan berkesinambungan.

Dalam hal ini perlu kesabaran dan kehati- hatian agen pemberdayaan perlu dilakukan terutama dalam menghadapi keragaman karakter, kebiasaan dan budaya masyarakat yang sudah tertanam. Pemberdayaan inipun dilakukan terhadap kaum perempuan atau gender terutama remaja juga ibu-ibu muda sebagai asset sekaligus potensi besar dalam mendongkrak derajat kualitas kehidupan keluarga dan sekaligus dalam pengetasan kemiskinan. Upaya pemberdayaan diarahkan untuk menggerakkan partisipasi aktif individu dan masyarakat seluas-luasnya. Partisipasi ini dimulai dari tahap perencanaan, pengembagnan, pelaksanaan, evaluasi, termasuk dalam menikmati hasil aktivitas pemberdayaan

Bila kita perhatikan uraian diatas, maka tujuan utama pemberdayaan masyarakat ialah upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui potensi yang dimilikinya sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik lagi melalui berbagai kegiatan swadaya. Dalam hal ini pemberdayaan masyarakat sendiri sesungguhnya bertujuan untuk melahirkan masyarakat yang mandiri dengan menciptakan kondisi sehingga memungkinkan meningkat dan kuatnya potensi masyarakat agar lebih berkualitas, karena setiap daerah memiliki potensi yang bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin dan akan membantu upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus melepaskan diri dari keterbelakangan serta ketergantungan itu sendiri. Perlu dipahami bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat juga menjadi pilar agama yang memiliki karakteristik wasathiyah (seimbang), seperti kita ketahui bahwa pemberdayaan tidak hanyak fokus pada target pencapaian secara lahiriyah atau material belaka, tetapi juga mencakup target immaterial seperti halnya peningkatan akhlak, ibadah dan amaliah (berbuat untuk sesama).

Dalam agama Islam memandang pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu cara agar manusia dapat terhindar dari kejahiliyahan serta dapat secara mandiri berusaha untuk mengubah nasib kehidupannya. Dalam Surat Al-Anfal ayat 53 yang artinya: "(Siksaan) yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada suatu kaum, hingga kaum itu merubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri, dan sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS.Al-Anfal:53). Dengan ayat ini maka dapat dipahami bahwa Allah tidak sekali- kali akan mengubah suatu nikmat yang telah dianugrahkan-Nya kepada suatu kaum dengan cara menggantinya dengan siksa.

6.4 Proses dalam Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Telah dikemukakan dimuka bahwa strategi pemberdayaan masyarakat merupakan sarana untuk masyarakat dalam posisi atau pelaku serta peranan dalam pembangunan yang aktif, dan bukan penerima pasif. Konsep pemberdayaan ini merupakan upaya untuk menjadikan suasana dalam dinamika kemanusiaan yang adil serta beradab baik secara efektif dan structural. Adapun proses pemberdayaan masyarakat sendiri yakni:

1. Proses penyadaran, yakni tahap persiapan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti kegiatan penyuluhan atau sosialisasi, dll.
2. Proses pembinaan, yakni tahap dalam proses transformasi pengetahuan, peningkatan kecakapan serta keterampilan. Disini kegiatan masyarakat berupaya belajar tentang pengetahuan serta kecakapan yang baru, sehingga terdapat peningkatan sikapnya dapat mengambil peran di dalam pembangunan.

3. Proses kemandirian, yakni tahap pendampingan dalam upaya menyiapkan masyarakat sehingga benar-benar mampu dan terampil dalam mengelola kegiatan proses pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan faktor internal dan eksternal lingkungannya. Kondisi yang menyangkut hubungan faktor internal sangat perlu dan penting yang menjadi salah satu wujud selforganizing dalam masyarakat, tetapi dalam hal ini perlu juga upaya memberikan perhatian yang menyangkut faktor eksternal sebagai suatu proses pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan oleh suatu Tim fasilitator professional dengan berlatar belakang multi disiplin, bahkan saat ini kompetensi pendaping perlu ditunjang oleh sertifikasi kompetensi dari Lembaga sertifikasi resmi. Jadi peran tim ini terus berproses sangat aktif dan sabar dalam mendamping sasaran sehingga mampu memacu masyarakat yang diberdayakan.

6.5 Keberhasilan Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Dalam keberhasilan sebagai upaya pemberdayaan ekonomi apalagi menyangkut sektor pertanian yang menjadi mata pencaharian besar masyarakat Indonesia dialam agraris ini dibutuhkan faktor-faktor yang pendorong sekaligus dapat mendongkrak terjadinya atau terwujudnya pemberdayaan dalam reaalitas Pembangunan Nasional. Beberapa Faktor pendorong sebagai strategi terjadinya pemberdayaan ini, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut berikut:

1) Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM);

   Perhatian terhadap Sumber Daya Manusia menjadi prioritas sehingga pengembangan Sumber Daya Manusia mejadi salah satu prioritas dalam kebijakan organisasi. SDM ini merupakan salah satu komponen untuk berbagai

kegiatan pemberdayaan ekonomi. Jadi penting dan strategis pengembangan sumberdaya manusia dalam rangka pengutan pemberdayaan ekonomi sehingga harus mendapat penanganan yang yang tepa, konsisten dan terfokus.

2) Pendayagunaan Sumber Daya Alam

   Keberadaan Sumber Daya Alam merupakan salah satu sumber daya pembanguan yang cukup strategis dan penting yang perlu mendapat perhatian dalam menjalankan kegiatan-kegiatan pemberdayaan ekonomi terutama dapat dimanfaatkan dalam rangka memanuhi kebutuhan serta dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Sumber Daya Alam ini perlu terus dimanfaatkan karena sejak jaman dahulu dari masa kehidupan nomaden sampai sekarang di era industrialisasi manusia membutuhkan Sumber Daya Alam.

3) Penguatan Permodalan

   Penguatan permodalan menjadi prasyarat dalam pemberdayaan. Dalam hal ini permodalan merupakan kegiatan pemberian modal untuk kepentingan produktivitas masyarakat khususnya yang tidak menimbulkan ketergantungan itu sendiri kepada masyarakat sekaligus dapat mendorong kegiatan atau usaha mikro, kegiatan-kegiatan usaha kecil, termasuk usaha menengah supaya terus berkembang ke arah yang semakin maju.

4) Manajemen Sarana, Prasarana Produksi dan Pemasaran

   Pemberdayaan tidak akan berhasil bila tidak terkelola aspek sarana, prasarana termasuk pemasaran. Jadi pendorong produktifitas serta tumbuhnya usaha inin diperlukan sebagai bagian tak terpisahkan dari efektivitas pemberdayaan masyarakat. Misalnya apabila hasil produksi tidak dipasarkan dengan maksimal, maka usaha

yang dilakukan akan sia-sia. Dalam hal ini menjadi komponen penting dalam aktivitas pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi yakni tersedianya berbagai sarana dan prasarana produksi sekaligus tata Kelola pemasaran sebagai langkah penting dalam mendukung terlaksanan dan berhasilnya aktivitas pemberdayaan.

5) Para Pelaku Usaha

Pemahaman tentang pelaku usaha ini ada dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu "Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan kedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang Ekonomi".

Bila memperhatikan isi penjelasan undang-undang perlindungan konsumen tersebut, dikemukakan bahwa yang termasuk pelaku usaha ialah perusahaan secara normative, Pasal 1 ayat (3) UUPK yang memberi pengertian tentang pelaku usaha yakni setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum walaupun bukan badan hukum dimana didirikan dan berkedudukan atau melakukan aktivitas atau kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia (RI), baik itu sendiri maupun bersama-sama dimana melalui perjanjian yang menyelenggarakan kegiatan aktivitas usaha di berbagai bidang ekonomi. Kemudian ketentuan pelaku usaha yaitu bentuk ataupun wujud dari para pelaku usaha dengan bentuk indiividu atau perorangan termasuk kelompok, dalam setiap individu yang melakukan aktivitas atau kegiatan usaha baik secara individu maupun dalam bentuk badan usaha. Dalam hal ini pelaku usaha itu memiliki hak-hak dimana harus

diberikan serta dihormati oleh pihak-pihak lain dalam aktivitas usahanya. Kemudian hak tersebut terbagi-bagi pada sejumlah kewajiban bagi semua para pelaku usaha itu sendiri. Selain itu hak pelaku usaha sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 UUPK yakni:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan.
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang bertindak tidak baik.
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak di akibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan lainnya.

Pemberdayaan merupakan keseluruhan proses pemberian kekuasaan serta kemampuan untuk melakukan upaya sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta kewenangan yang dimiliki. Saat ini dalam kaitannya dengan pemberdayaan terhadap masyarakat, maka pemberdayaan masyarakat dimaksud adalah proses memberikan kemampuan dan kesanggupan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan pembangunan terutama umumnya dalam bidang ekonomi. Umumnya aktivitas atau kegiatan membangun masyarakat saat ini terkait erat dengan memberdayakan masyarakat. Memberdayakan masyarakat ini memiliki tujuan memerangi kemiskinan, kesenjangan, dan mendorong masyarakat menjadi lebih aktif serta penuh inisiatif termasuk merubah sikap individu, kelompok maupun masyarakat. Secara khusus upaya pemberdayaan

masyarakat ini merupakan proses menyeluruh dalam upaya untuk memandirikan masyarakat melalui perwujudan berbagai potensi kemampuan yang dimilikinya.

Dalam pemberdayaan membutuhkan strategi yang efektif. Salah satu pengembangan potensi manusia dapat diwujudkan melalui strategi pemberdayaan yang dibuat berdasarkan harapan, kebutuhan dan kepentingan system sosialnya. Strategi merupakan cara untuk mengerahkanberbagai sumber daya; tenaga, dana, daya, serta peralatan yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Makna pemberdayaan masyarakat itu sendiri yakni upaya manusia dalam kehidupan sosial, ekonomi, lingkungan dan yang lainnya yang terus menerus dan terarah. Hal ini berarti bahwa suatu proses dimaksud untuk mengembangkan serta memperkuat kemampuan masyarakat itu sendiri agar terus terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan dalam aktivitas yang berlangsung secara dinamis sehingga masyarakat dapat dan nanpu menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi serta dapat dan siap mengambil keputusan secara bebas (*independent*) serta mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

Bagja, Waluya. 2009. *Sosiologi: Menyelami Sosial Di Masyarakat*. Jakarta: PT. Pribumi Mekar.

Edi, Suharto. 2005. *Membangun Masyarakat Dan Memberdayakan Masyarakat.*Bandung: PT.Retika Ashitama.

Ginanjar, Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan,(Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo, 1996), hal. 145

Puji Hadiyanti. 2008. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keterampilan Produktif Di PKBM Rawasari Jakarta Timur,* Jurnal Perspektif Ilmu Pendidikan, Vol. 17

R. Wrihatnolo. 2007. *Manajemen Pemberdayaan : Sebuah Pengantar Dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*,. Jakarta: PT Elex Komputindo.

Oos M. Anwas. 2004. *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*. Bandung: Alfabeta

Mardi Yatmo Hutomo.2000. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi: Tinjuan Teoritik Dan Implementasi.* Dalam Naskah No.20

Miftah dan Ambok Pagiuk.2020. *Budaya Binis Muslim Jambi Dalam Perspektif Kearifan Lokal*. Malang : Ahlimedia Press.

Sudomo Sukirno. 2013. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perssada.

Richard G Lipsey. 1993. *Pengantar Makro Ekonomi,* . Jakarta: Erlangga.

BAB 7
ANALISIS TINGKAT KEBERDAYAAN MASYARAKAT

Oleh Rusydi Fauzan

7.1 Pendahuluan

Pemberdayaan berarti sebuah kegiatan untuk membantu dan menguatkan pihak-pihak yang kurang beruntung atau memiliki keterbatasan sumber daya agar bisa meningkatkan potensi mereka serta mampu mandiri dan menghadapi persaingan yang semakin ketat. Kegiatan pemberdayaan sudah dilaksanakan di berbagai belahan dunia semenjak tahun 60-an, yang banyak berorientasi ke daerah pedesaan. Kegiatan pemberdayaan secara umum mempunyai tujuan untuk membekali setiap individu dengan berbagai keahlian sehingga bisa mengembangkan diri sendiri dan meningkatkan perekonomian diri sendiri dan masyarakat disekitarnya.

Pemberdayaan masyarakat secara sederhana adalah sebuah proses dan kegiatan untuk memperkuat potensi masyarakat terutama masyarakat yang memiliki keterbatasan sumber daya. Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah bentuk keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan melalui program pengembangan yang diberikan oleh pemerintah atau institusi independen sehingga kelompok yang lemah bisa menjadi kuat dan mandiri serta terciptanya komunitas yang saling berintegrasi dan saling membantu satu sama lainnya. Sesuai pendapat Fauzan (2014) dimana sebuah organisasi harus memberikan dampak positif kepada lingkungannya.

Terdapat beberapa tujuan dari kegiatan pemberdayaan masyarakat yaitu: penguatan kepada masyarakat dan kelompok yang lemah agar menjadi lebih kuat, penanaman nilai dan budaya masyarakat maju yaitu kerja keras, hemat, terbuka, dan bertanggung jawab, mengurangi eksploitasi dimana pihak yang lemah semakin lemah dan kuat semakin kuat. Pemberdayaan mempunyai tujuan akhir agar setiap kelompok bisa sama-sama kuat dan saling berintegrasi dan mengisi satu sama lainnya, menjadikan masyarakat mandiri dan mampu membangun dan memajukan diri sendiri secara berkelanjutan, dan menciptakan komunitas dan masyarakat yang adil dan makmur.

7.2 Tingkat Keberdayaan Masyarakat

Tingkat keberdayaan masyarakat menunjukkan sejauh mana pengaruh dan dampak kegiatan pemberdayaan masyarakat kepada kesejahteraan masyarakat dan perubahan yang dialami oleh masyarakat.

Tingkat keberdayaan masyarakat terdiri dari lima tingkat seperti piramid yang menunjukkan perubahan yang telah terjadi pada masyarakat. Tingkat tertinggi keberdayaan masyarakat itu adalah dimana masyarakat bisa mandiri dan melaksanakan kegiatan pengembangan berkelanjutan serta bisa memberikan dampak terhadap pihak lain. Sebuah manajemen yang baik itu harus bisa memberikan dampak jangka panjang yang berkelanjutan sebagaimana yang disampaikan oleh Fauzan dan Sari (2016).

7.2.1 Tingkatan Pertama : Terpenuhinya Kebutuhan Dasar

Tingkatan pertama atau paling dasar adalah masyarakat sudah bisa memenuhi kebutuhan dasar atau kebutuhan hidup seperti makanan, tempat tinggal, pakaian dan kebutuhan dasar lainnya.

Ketika kebutuhan dasar sudah terpenuhi dengan baik, maka masyarakat dapat menjalani kehidupan dengan baik dan mulai melaksanakan peningkatan untuk pemenuhan kebutuhan yang lebih tinggi.

7.2.2 Tingkatan Kedua : Akses Terhadap Sumber Daya

Tingkatan kedua adalah masyarakat sudah bisa mengakses sumber daya untuk penunjang pekerjaan atau mata pencaharian dan juga bisa mengakses berbagai fasilitas publik yang menjadi hak mereka.

Selama ini banyak sekali masyarakat atau kelompok yang lemah tidak bisa mengakses berbagai sumber daya yang akan meningkatkan kesejahteraan mereka karena kekurangan informasi, kesadaran, dan keahlian untuk mengaksesnya.

Dengan kegiatan pemberdayaan maka masyarakat akan di ajarkan untuk menguasai keahlian untuk bisa mengakses seluruh sumber daya dan fasilitas yang bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

7.2.3 Tingkatan Ketiga : Kesadaran Terhadap Potensi Diri

Tingkatan ketiga adalah peningkatan potensi diri untuk mengambil berbagai peluang yang ada di sekitar mereka. Tentunya terlebih dahulu masyarakat harus mengetahui potensi diri atau kelebihan yang mereka miliki agar mereka bisa memaksimalkan peluang yang ada di sekitar mereka.

Kegiatan pemberdayaan juga bertujuan untuk memotivasi dan menggali potensi diri setiap individu. Dengan mereka mengetahui potensi diri mereka, maka mereka dapat dengan mudah untuk mengambil seluruh peluang yang tersedia.

7.2.4 Tingkatan Keempat : Partisipasi Aktif Dalam Kegiatan Masyarakat

Tingkatan keempat adalah partisipasi aktif dalam berbagai kegiatan masyarakat. Pada tahap ini setiap individu sudah mandiri dan memiliki pendapatan yang cukup sehingga mereka bisa terjun aktif dalam berbagai kegiatan untuk pengembangan masyarakat. Setelah diberikan berbagai pelatihan untuk pengembangan diri, maka setiap individu juga mempunyai kewajiban untuk memajukan pihak lain yang memerlukannya. Pada tahap ini individu tidak lagi menjadi pihak yang mendapat bantuan tetapi telah naik level dengan memberikan dampak terhadap masyarakat yang ada di sekitarnya.

7.2.5 Tingkatan Kelima : Menjadi Manajer yang mengembangkan lingkungannya

Tingkat kelima adalah menjadi manajer yang mampu mengembangkan lingkungannya dan menciptakan perubahan. Manajer sudah bisa menyelesaikan berbagai permsaalahan dan menciptakan perubahan yang meningkatkan kesejahteraan jangka panjang dari masyarakat. Pada tahap ini juga ditandai dengan telah makmur dan sejahteranya masyarakat yang ada di daerah tersebut dan mulai memberikan dampak kepada daerah lain yang masih kekurangan dan butuh kegiatan pemberdayaan.

7.3 Dimensi Pemberdayaan Masyarakat

Dimensi pemberdayaan masyarakat terdiri dari beberapa pembahasan yaitu aspek penilaian pemberdayaan, indikator kesuksesan kegiatan pemberdayaan dan elemen atau pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan. Dimensi ini menunjukkan keseluruhan faktor yang terlibat dan mempengaruhi terhadap kesuksesan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Sebuah organisasi harus mengetahui faktor-faktor

yang mempengaruhi kinerja perusahaannya seperti yang disebutkan oleh Fauzan dan Rahmadani (2018).

7.3.1 Indikator Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan pemberdayaan masyarakat bisa dikatakan berhasil jika masyarakat telah mampu untuk:

1. Memiliki kemampuan akses fasilitas
   Mampu untuk mengakses berbagai layanan publik seperti rumah sakit, bank, pasar, rumah ibadah dan lainnya. Mereka memahami bagaimana memaksimalkan seluruh fasilitas tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
2. Memiliki kemampuan membeli komoditas
   Mampu membeli komoditas primer seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, layanan kesehatan. Serta membeli komoditas sekunder dan tersier seperti pendidikan, kendaraan, alat elektronik, dan lainnya. Seluruh komoditas tersebut mereka beli tanpa perlu mendapat izin atau persetujuan dari orang lain.
3. Memiliki kemampuan mengambil keputusan
   Mampu membuat keputusan untuk rumah tangga baik keputusan jangka pendek maupun keputusan jangka panjang. Mampu membuat perencanaan renovasi rumah, pengembangan usaha pertanian/perternakan, dan keputusan pinjaman modal untuk pengembangan usaha dari bank.
4. Memiliki kesadaran hukum dan politik
   Mampu mengikuti berbagai kegiatan politik seperti pemilu, mengetahui calon yang baik, tidak mau menerima praktek sogokan ketika pemilu. Memahami dengan baik seluruh administrasi hukum seperti memiliki KTP dan Kartu Keluarga dan membayar kewajiban seperti membayar pajak.

5. Memiliki kemampuan menyampaikan aspirasi
   Mampu menyampaikan pendapat dan saran di ruang publik untuk kemajuan daerah dan berani memberikan kritikan jika terjadi penyalahgunaan tata kelola yang terjadi di lingkungan.
6. Memiliki kemampuan memiliki aset berharga dan produktif
   Mampu memiliki aset berharga dan produktif seperti tanah, tabungan, kendaraan, peralatan bisnis, dan berbagai peralatan pendukung karir jangka panjang.

7.3.2 Elemen Pemberdayaan Masyarakat

Di dalam pemberdayaan masyarakat akan ada banyak sekali elemen atau pihak-pihak yang secara aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yaitu:

1. Pemerintah
   Kegiatan pemberdayaan harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, daerah atau lokal, sehingga hasil akhirnya dapat lebih dimaksimalkan.
2. Lembaga Swadaya Masyarakat Eksternal
   Keikutsertaan lembaga swadaya masyarakat juga akan membuat kegiatan akan lebih sempurna dan komprehensif, karena akan ada berbagai masukan terkait pengembangan kegiatan yang lebih tepat sasaran.
3. Lembaga Internal Masyarakat
   Lembaga internal masyarakat sangat diperlukan untuk membuat kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik karena mereka lebih mengetahui karakter masyarakat, selain itu lembaga internal juga bisa terus melaksanakan kegiatan walaupun program sudah selesai.
4. Koperasi
   Koperasi masyarakat juga berperan besar terutama jika diadakan kerjasama, sehingga seluruh kebutuhan logistik

selama kegiatan bisa di kelola oleh koperasi yang nantinya juga berdampak pada ekonomi masyarakat tersebut.

5. Pendamping Pemberdayaan
   Pendamping pemberdayaan merupakan pemberi materi sekaligus pihak yang mengembangkan potensi masyarakat, sehingga mereka harus diberikan pelatihan atau pendidikan khusus agar kegiatan hasil akhir kegiatan dapat dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
6. Masyarakat
   Masyarakat yang merupakan objek dari kegiatan harus bisa berperan aktif dan memaksimalkan kegiatan ini, karena dampak jangan panjang kegiatan mereka sendirilah yang akan merasakannya.

Setiap elemen harus bisa duduk bersama dan bekerjasama dalam mensukseskan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Baiknya komunikasi dan pembagian peran akan membuat kegiatan pemberdayaan masyarakat bisa dilaksanakan dengan baik.

7.4 Pendekatan dan Metode Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah proses yang dilaksanakan secara sistematis dan berurutan. Menurut Fauzan dan Sari (2018) kegiatan yang tersistematis akan memberikan dampak yang lebih besar kepada organisasi. Untuk itu pihak pengelola kegiatan pemberdayaan masyarakat harus mengetahui fungsi dari setiap tahap agar hasil dari kegiatan pemberdayaan masyarakat bisa memberikan dampak yang besar.

Pendekatan dan metode digunakan agar proses pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan lancar. Pemilihan pendekatan dan metode yang tepat akan membuat

kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

7.4.1 Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Kartasasmita (1995) terdapat tiga pendekatan yang bisa dilaksanakan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yaitu:

1. Pendekatan langsung
   Program pemberdayaan langsung menjawab permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Program langsung memberikan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman dan praktek masyarakat dalam proses atau kegiatan yang penting tetapi tidak mereka pahami.
2. Pendekatan sasaran
   Program harus menjadikan masyarakat sebagai sasaran langsung kegiatan. Pada program ini seluruh sasaran kegiatan terkait dengan target-target yang harus dicapai oleh setiap individu sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.
3. Pendekatan kelompok
   Program ini membuat masyarakat menjadi beberapa kelompok. Hal ini dilaksanakan jika program ditujukan kepada individu maka masyarakat akan susah dalam menyelesaikan program yang telah direncanakan.

Pendekatan yang dipiliha harus menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan masyarakat. Pendekatan yang tidak tepat akan menyebabkan sasaran kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak akan tercapai dengan optimal. Untuk itu pihak pelaksana perlu untuk berdiskusi mengenai mekanisme yang paling tepat tidak saja dengan para ahli tetapi juga dengan masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan pemberdayaan secara aktif.

7.4.2 Metode Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Kartasasmita (1995) terdapat tiga pendekatan yang bisa dilaksanakan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yaitu:

1. Menciptakan suasana dan iklim untuk pengembangan potensi masyarakat.
   Sebelum kegiatan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan maka tim harus menciptakan suasana dan iklim kegiatan yang menyenangkan sehingga masyarakat memiliki persepsi positif dari kegiatan yang dilaksanakan dan program diharapkan dapat berjalan sesuai rencana tanpa halangan.
2. Memperkuat potensi masyarakat dengan langkah nyata.
   Masyarakat lebih menyenangi program yang langsung menjawab permasalahan harian mereka. Program yang berpengaruh langsung terhadap produktifitas kerja dan karir jangka panjang yang akan mereka tekuni.
3. Memberdayakan masyarakat dengan membela kepentingan mereka.
   Program yang diberikan tidak saja memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, tetapi masyarakat juga berharap sebuah program yang memiliki dampak jangka panjang yang sangat berarti.

Masyarakat sangat berharap program yang diberikan dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah atau pihak terkait sehingga bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dan menciptakan perubahan yang besar bagi kehidupan masyarakat. Sesuai dengan pendapat Fauzan dan Jayanti (2020) setiap strategi atau metode yang dilaksanakan harus mengacu kepada tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi. Maka metode yang dipilih harus bisa memberikan dampak dan menggerakkan banyak pihak di masa depan.

7.5 Pendamping dan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat

Setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat akan selalu ada tim ahli yang melaksanakannya, tim ini disebut sebagai pendamping atau fasilitator pemberdayaan masyarakat. Untuk menjadi pendamping dan fasilitator pemberdayaan masyarakat ada beberapa persyaratan yang harus dimiliki sehingga kegiatan pemberdayaan dapat berlangsung dengan lancar. Selain itu pendamping dan fasilitator harus memahami dengan baik perannya.

7.5.1 Sikap dan Kualitas Pendamping dan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat

Untuk menjadi pendamping dan fasilitator pemberdayaan masyarakat ada beberapa kualitas yang harus dimiliki yaitu:

1. *Problem Solver*
   Seorang pendamping dan fasilitator harus bisa menjawab seluruh permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Di dalam kegiatan pemberdayaan terkadang begitu banyak permasalahan yang dihadapi sehingga pendamping dan fasilitator harus bisa membuat prioritas dan menyelesaikannya satu persatu.
2. *Sense of Community*
   Seorang pendamping dan fasilitator harus memiliki kepedulian dan empati yang tinggi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan memberikan solusinya. Karena kegiatan pemberdayaan adalah kegiatan sosial dan tidak berorientasi pada keuntungan maka mereka harus siap dengan berbagai konsekuensi yang dihadapi.
3. *Strict to Purpose*

Pada kegiatan pemberdayaan masyarakat banyak sekali target yang harus dicapai oleh pendamping dan fasilitator, serta di saat yang sama masyarakat juga mengajukan berbagai permasalahan yang tidak terkait dengan program yang telah ditentukan. Untuk itu pendamping dan fasilitator harus fokus terlebih dahulu kepada target dan permasalahan utama. Jika sudah selesai baru bisa membantu terkait permasalahan yang lainnya.

4. *Integrity*
   Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan akan banyak sekali permasalahan yang dihadapi oleh pendamping dan fasilitator. Tidak semua masyarakat memberikan respon positif dalam kegiatan pemberdayaan dan akan ada banyak sekali kendala dan masalah yang akan dihadapi. Untuk itu pendamping dan fasilitator harus memiliki integritas yang tinggi dalam melaksanakan kegiatan tersebut.
5. *Accountable*
   Kegiatan pemberdayaan melibatkan banyak program dan juga anggaran dalam pelaksanaannya. Untuk itu pendamping dan fasilitator harus terbuka dengan seluruh pihak terkait teknik seluruh pekerjaan dan anggaran pelaksanaannya. Sehingga semua pihak bisa mendapatkan hak dan melaksanakan kewajibannya dengan baik.

7.5.2 Peran Pendamping dan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat

Pendamping dan fasilitator memiliki empat peran penting dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yaitu:

1. Peran Fasilitator
   Peran fasilitator terkait dalam memberikan dukungan dan semangat kepada peserta, memberikan teknis pengelolaan sumber daya yang baik, mengorganisasikan kegiatan, dan

melaksanakan evaluasi bersama untuk kegiatan perbaikan dan peningkatan.

2. Peran Edukator
   Peran edukator terkait dengan kegiatan membangkitkan kesadaran masyarakat, memberikan informasi, dan menambah pengetahuan dan keahlian masyarakat sehingga bisa mengambil keputusan untuk pengembangan masyarakat secara independen.
3. Peran Representatif
   Peran repreresentati terkait dengan kegiatan mengumpulkan berbagai sumber informasi, memaksimalkan fungsi media, menciptakan jaringan kerja untuk masyarakat, dan membuka kerjasama masyarakat dengan pihak eksternal.
4. Peran Teknis
   Peran teknis terkait dengan kegiatan dokumentasi kegiatan, melaksanakan riset, presentasi dan komunikasi, dan manajemen dan pengawasan kegiatan pemberdayaan.

Pendamping dan fasilitator harus memahami dengan baik multi peran yang harus dilaksanakan untuk memastikan kegiatan pemberdayaan dapat berlangsung dengan baik dan sesuai tujuan. Sesuai dengan pendapat Fauzan dkk (2020) fungsi sumber daya manusia dan manajer sangat besar terhadap keberhasilan atau tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Untuk itu untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan harus menggunakan SDM yang sesuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan.

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah kegiatan sosial yang mengembangkan masyarakat atau kelompok yang lemah sehingga mereka bisa mandiri serta menemukan potensi diri dan mengembangkannya. Kegiatan pemberdayaan masyarakat akan sangat berpengaruh besar bagi peningkatan

ekonomi jangka panjang di sebuah negara. Hal ini disebabkan karena dalam kegiatan ini yang pertama kali dikembangkan adalah pengembangan kualitas sumber daya manusia masyarakat.

Ini senada dengan yang disampaikan Fauzan dkk (2021) dimana organisasi yang memberikan pengembangan kompetensi akan mendapatkan peningkatan kinerja di masa depan. Diharapkan dengan pemahaman yang baik tentang pemberdayaan masyarakat maka akan semakin banyak pihak yang melaksanakan kegiatan pengembangan kepada masyarakat dan memberikan dampak positif yang besar untuk jangka waktu yang panjang.

DAFTAR PUSTAKA

Amanda, R. P., & Buchori, I. 2015. *Efektivitas Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (Pugar) Tahun 2014 Terhadap Tingkat Keberdayaan Petani Garam Rakyat di Kecamatan Kaliori*. Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota), 4(4), 553-564.

Fauzan, R. 2014. *Penilaian Kinerja Pada Lembaga Pendidikan Tinggi Dengan Menggunakan Metode Balanced Scorecard*. Studi Kasus: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Haji Agus Salim Bukittinggi. jurnal ekonomi, 16(2), 50-60.

Fauzan, R., & Jayanti, A. 2020. *Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Volume Penjualan Dengan Menggunakan Blue Ocean Strategy Model Pada Usaha Sanjai Nitta Bukittinggi*. Jurnal BONANZA: Manajemen dan Bisnis, 1(1), 1-12.

Fauzan, R., & Rahmadani, S. 2018. *Strategi Pengembangan Agrowisata dengan Menggunakan Blue Ocean Strategy Model*. Studi Kasus Perkebunan Kopi Green Sago Kabupaten 50 Kota. jurnal ekonomi, 21(1), 21-33.

Fauzan, R., & Sari, A. M. 2016. *Analisis Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Volume Penjualan (Studi Kasus di Cafe Texas Juice Cabang Tangah Jua Kota Bukittinggi)*. jurnal ekonomi, 20(2), 147-156.

Fauzan, R., & Sari, R. P. 2018. *Strategi Pengembangan Taman Marga Satwa dengan Menggunakan SWOT dan QSPM Model*. Studi Kasus Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan Kota Bukittinggi. jurnal ekonomi, 21(2), 120-131.

Fauzan, R., Nurhayati, N., & Novia, I. 2020. *Pengambilan Keputusan Strategis dalam Penentuan Harga Jual Produk dengan Menggunakan Pendekatan Activity Based Costing*. Studi Kasus UMKM Tia Konveksi. Jurnal PROFITA: Akuntansi dan Bisnis, 1(1), 35-46.

Fauzan, R., Supryanita, R., & Rahmatika, R. 2021. *Analisa Strategi Pemasaran untuk Peningkatan Daya Saing pada Bisnis Kafe di Kota Bukittinggi (Studi Kasus Kafe Teras Kota)*. MABIS: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah, 1(1).

Firmansyah, H. 2012. *Tingkat keberdayaan masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat di Kota Banjarmasin dan Kabupaten Tanah Laut*. AGRIDES: Jurnal Agribisnis Perdesaan, 2(1), 9264.

Garjita, I. P. 2013. *Tingkat Keberdayaan Sosial Ekonomi Kelompok Tani Desa Konservasi Sebagai Penyangga Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi*.

Jalieli, A., & Sadono, D. 2013. *Tingkat partisipasi dan keberdayaan petani alumni program SL-PTT (kasus Desa Gegesik Wetan Kabupaten Cirebon)*. Jurnal Penyuluhan, 9(2).

Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial. 2020. *Pemberdayaan Masyarakat*. Kementrian Sosial Republik Indonesia

Loany, H. A. 2021. *Hubungan Efektivitas Program Corporate Social Responsibility Dengan Tingkat Keberdayaan Masyarakat*. Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM], 5(3), 373-389.

Maani, K. D. 2011. *Teori ACTORS dalam pemberdayaan Masyarakat*. Jurnal Demokrasi, 10(1).

Sarwoprasodjo, S., Hubeis, M., & Sugihen, B. G. 2017. *Tingkat Keberdayaan Kelompok Tani pada Pengelolaan Usahatani Padi di Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah*. Jurnal Penyuluhan, 13(2), 166-180.

Setyaningrum, R., Anomsari, A., Hartini, E., & Suprijono, H. 2015. *Tingkat Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (Pugar) Ditinjau dari Aspek Produksi, Distribusi, Permintaan Pasar dan Sosial Budaya*. J@ ti Undip: Jurnal Teknik Industri, 10(1), 55-62.

Sulistyowati, S., & Zainuri, M. *Analisis Tingkat Keberdayaan Nelayan Jaring Arad di Kabupaten Batang. (Analysis of the Level Empowerment from Fishermen Arad Nets in the Batang District)*. Saintek Perikanan: Indonesian Journal of Fisheries Science and Technology, 10(1), 1-6.

Ticoalu, D. E., Reppie, E., & Telleng, A. T. 2013. *Analisis kebijakan pemberdayaan masyarakat perikanan tangkap di Kota Manado*. Jurnal Ilmu dan Teknologi Perikanan Tangkap, 1(3).

Zulkarnaen, M., Marsudi, E., & Agussabti, A. 2019. *Analisis Keberdayaan Masyarakat Pasca Dimulainya Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Aceh Besar*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian, 4(4), 131-140.

BAB 8
PROGRAM-PROGRAM PEMBERDAYAAN PETANI

Oleh Amruddin

8.1 Pendahuluan

Pemberdayaan diharapkan terjadi transformasi sosial pada keluarga dan masyarakat lokal. Kondisi ini dapat dilakukan apabila kebijakan yang melingkupinya memberikan perhatiaan terhadap tiga hal pokok (Fahrudin dkk, 2010), yaitu; *Enabling*, yaitu menciptakan iklim yang mendukung agar potensi berkembang. Iklim yang ada dapat mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan sumberdaya yang dimiliki agar dapat berupaya mengembangkannya. *Empowering*, yaitu meningkatkan kapasitas dengan memperkuat potensi yang dimiliki. Peningkatan kapasitas ini ditujukan untuk membuka akses pada peluang dan menyediakan berbagai masukan yang berkaitan dengan pasar *in put* dan *out put*. *Protecting*, yaitu melindungi kepentingan dengan me-ngembangkan sistem perlindungan bagi masyarakat yang menjadi subjek pengembangan. Sistem ini diarahkan untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan praktek-praktek eksploitasi.

Pemerintah dalam berbagai kebijakannya, diantaranya memberikan perhatian kepada masyarakat miskin atau masyarakat kecil yang umumnya berdomisili di perdesaan, yakni petani dengan berbagai program-program pemberdayaan.

8.2 Ruang Lingkup Pemberdayaan Petani

Pemberdayaan diharapkan masyarakat mampu berlaku mandiri (gambar 8.1) dengan demikian pemberdayaan masyarakat sesungguhnya ditujukan untuk masyarakat yang mandiri tidak hanya secara ekonomi tetapi juga menyangkut aspek lainnya dalam kehidupan bermasyarakat.

Gambar 8.1 : Pemberdayaan untuk Kemandirian Masyarakat

Dubois dan Miley dalam Nawawi (2009), memberi beberapa cara atau teknik yang lebih spesifik yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu;

a. Membangun relasi pertolongan yang merefleksikan respon empati, menghargai pilihan dan hak klien menentukan nasibnya sendiri, menghargai perbedaan dan keunikan individu, menekankan kerjasama klein.
b. Membangun komunikasi yang menghormati martabat dan harga diri klien, mempertimbangkan keragaman individu,

berfokus pada klien, merangkai tantangan-tantangan sebagai kesempatan belajar, dan menjaga kerahasian klien.

c. Terlibat dalam pemecahan masalah, dan
d. Mereflesikan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial.

Menurut Nawawi (2009), pemberdayaan merupakan upaya pemberian kuasa dan kemampuan kepada masyarakat terutama kepada kelompok marjinal. Pemberian kuasa diantaranya berupa; kuasa untuk menyampaikan pendapat dan kreativitas secara bebas, kuasa untuk merencanakan demi kepentingan pribadi, keluarga maupun masyarakat, kuasa untuk mengambil keputusan berdasarkan keyakinan tanpa tekanan dari pihak manapun, kuasa untuk disetarakan sebagai mitra pemerintah maupun dunia usaha, dan bentuk keadilan serta kesejahteraan sosial yang bisa diperoleh sebagai haknya. Dengan karakteristik tersebut maka dapat dikemukakan beberapa metoda dan teknik pemberdayaan masyarakat yakni metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA), metode Partisipasi *Assesment* dan Rencana, Metode Lokakarya, Teknik Brainstorming, serta Teknik *Community Organization* (CO) dan Teknik *Community Development* (CD).

Soetomo (2011) menambahkan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan tidak selalu harus membuat dikotomi antar komponen dalam masyarakat. Pemangku kepentingan untuk peningkatan kesejahteraan dapat berasal dari unsur negara, masyarakat maupun dunia usaha. Masing-masing sesuai karakteristiknya dapat memberikan konstribusi dalam upaya peningkatan kesejahteraan. Dengan demikian pendekatan yang digunakan adalah pendekatan holistik dan integratif.

8.3 Program Pemberdayaan Petani

Strategi penanganan kemiskinan pekerjaan sosial berfokus pada peningkatan kemampuan orang miskin dalam menjalankan tugas-tugas kehidupan sesuai dengan statusnya. Namun karena tugas-tugas kehidupan dan status merupakan konsepsi yang dinamis dan multi-wajah maka intervensi pekerjaan sosial senantiasa melihat sasaran perubahan tidak terpisah dari lingkungan dan situasi yang dihadapinya.

Beberapa bentuk program dalam penanganan kemiskinan, antara lain (1) pemberian bantuan sosial dan rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh panti-panti sosial, (2) program jaminan, perlindungan dan asuransi kesehatan sosial, (3) program pemberdayaan masyarakat yang meliputi pemberian modal usaha, pelatihan usaha eknomi produktif, pembentukan pasar sosial dan koperasi, pelatihan dan pembinaan keluarga muda mandiri, (4) program kedaruratan, seperti bantuan bagi korban bencana alam, (5) program pemberian kredit, pembentukn kelompok usaha bersama (KUBE), bantuan stimulan untuk usaha-usaha ekonomis produktif skala mikro.

Pengamatan Khoriri, Subekti dan Agustina (2018) tentang pemberdayaan petani dalam menerapkan program SRI menyimpulkan bahwa kemampuan petani memberdayakan dirinya dapat dilihat (1) pilihan petani karena dukungn sarana produksi , melihat keberhasilan petani awal dan hasil uji coba serta peluang kelompok tani sebagai penerima program karena adanya potensi lahan, irigasi dan dinamika kelompok, (2) kemampuan petani mengakses kebutuhan usahataninya dalam meningkatkan hasil produksi melalui prinsip tanam muda, tanam lebar, tanam satu-satu dan penggunaan pupuk organik, (3) kemampuan menyampaikan keluhan mengenai cepatnya pertumbuhan rumput dan serangan hama keong. (4) kemampuan menjangkau teknologi tanam SRI melalui peran kelompok tani, (5) peningkatan kemampuan sumberdaya petani, serta (6) pengelolaan

sumberdaya yang dimiliki untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Strategi kelompok dalam memberdayakan petani dilakukan dengan cara; (1) memotivasi tenaga tanam dengan memberi upah lebih tinggi, (2) pemberian materi dan pelatihan di lahan pertanian, (3) pengelolaan kelompok melalui kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, (4) memobilisasi petani dalam menggunakan benih padi hibrida dan (5) peningkatan usaha tani melalui penggunaan peralatan tanam SRI.

Gambar 8.2 : Pemberdayaan Kelompok Tani

Berdasarkan gambar tersebut di atas tampak pemberdayaan petani melalui eksistensi kelompok tani di perdesaan. Kelompok tani dalam persepsi Pusat Penyuluhan Pertanian (2012) adalah kelembagaan pertanian yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, dan sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya serta ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk petani yang saling mengenal, akrab, saling percaya, mempunyai kepentingan dalam

berusahatani, kesamaan baik dalam hal tradisi, pemukiman, maupun hambaran lahan usahatani.

Penelitian Laily, Ribawanto dan Nurani (2013) di Desa Betet Kecamatan Ngroggot Kabupaten Nganjuk tentang pemberdayaan petani dalam meningkatkan ketahanan pangan. Penelitian menyimpulkan bahwa pemberdayaan petani di desa tersebut dapat dikatakan sudah lebih baik, dimana produksi yang dihasilkan lebih baik dan meningkat. Faktor pendukung utama keberhasilan peningkatan ketahanan pangan di Desa Betet adalah berjalannya program dengan dukungan dari Pemerintah Daerah serta adanya bantuan subsidi dan benih. Hambatannya datang dari masalah rendahnya kualitas SDM serta keterbatasan alat pertanian. Hal ini diperlukan adanya sinergi diantara petani, masyarakat serta pemerintah untuk secara bersama-sama mendukung program pemberdayaan. Adapun program yang dilakukan melalui penyuluhan. Penyuluhan dilakukan dengan memberikan informasi tentang teknologi baru serta cara bercocok tanam dengan cara yang lebih baik kepada kelompok tani atau Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).

Pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten terhadap petani kopi di Desa Ramung Jaya sudah berjalan dengan baik namun masih terdapat beberapa hambatan baik bagi pemerintah mauun bagi petani kopi. Pemerintah agar dapat meningkatkan lagi kreativitas dan kualitas melalui penyuluhan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas petani dan lebih memperhatikan penyediaan sarana dan prasarana serta dapat memberikan bantuan modal usaha (Kasmita, Eviany dan Sutikno, 2021 dalam https://eprints.ipdn.ac.id).

Di lokasi berbeda, pemberdayaan masyarakat melalui program kelompok tani juga diamati oleh Woworuntu, Lengkong dan Londa (2021) di Desa Paringis, Kecamatan Langowan Barat Kecamatan Minahasa. Kelompok tani Immanuel merupakan kelompok tani terlama di desa tersebut. Kelompok tani ini sudah

terbilang cukup mandiri dikarenakan para anggota kelompok tani mampu menerima setiap program yang diberikan dan sudah mampu meningkatkan intelektual, kecakapan serta ketrampilan dalam mengelolah usaha tani. Hal ini dibuktikan dengan para anggota yang merasakan perbedaan setelah bergabung dalam kelompok tani, dimana yang tadinya tidak berdaya dan masih banyak mengalami kendala dalam bidang pertanian sekarang dengan adanya program-program kelompok tani, anggota merasa terbantu dan merasakan adanya peningkatan hasil produksi pertanian. Kekompakan kelompok tani selama ini terjalin baik dan telah menjadi kelompok yang mandiri.

Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan peningkatan kesejahteraan petani melalui tiga program strategis. Ketiga program ini adalah penyediaan layanan Kredit Usaha Rakyat (KUR), prgram Gerakan Tiga Kali Ekspor (Gratieks) dan pembentukan Komando Strategi Pembangunan Pertanian (Kostra Tani). Program KUR adalah program strategis yang diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja sektor pertanian dari hulu ke hilir melalui akses yang lebih mudah. Program ini diharapkan mampu menopang dan memperkuat potensi pertanian di daerah-daerah. Gratieks merupakan program sebagai ajakan pemerintah kepada seluruh pemegang kepentingan pembangunan pertanian agar bekerja dengan cara yang tidak biasa. Konstra Tani nantinya akan memperkuat fungsi penyuluh sebagai ujung tombak pemantauan kondisi lapangan di tiap kecamatan (https://www.pertanian.go.id, diakses 20/10/22).

DAFTAR PUSTAKA

Fahruddin, A. dkk. 2010. Pemberdayaan Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat. Bandung : Penerbit Humaniora.

Khoriri S, Subekti, S dan Agustina,T. 2018. Pemberdayaan Petani dalam Menerapkan Program Sytem of Rice Intensification (SRI) Berbasis Kegiatan Kelompok. Jurnal Agritexts, Vol.42. No.1

Laily, S.F,R., Ribawanto, H, dan Nurani, F. 2013. Pemberdayaan Petani dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan (Studi di Desa Betet, Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.2 No.1, Hal.147-153.

Nawawi, I. 2009. Pembangunan dan Problema Masyarakat, Kajian Konsep, Model, Teori dari Aspek Ekonomi dan Sosiologi. Surabaya : ITS Press.

Soetomo. 2011. Pemberdayaan Masyarakat, Mungkinkah Muncul Antitesisnya. Jakarta : Pustaka Pelajar.

Woworuntu, F.N, Lengkong, F.DJ dan Londa, V.Y. 2021. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kelompok Tani Immanuel di Desa Raringis Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa. JAP, Vol.VII, No.106

BAB 9
METODE PEMBERDAYAAN DALAM PENYULUHAN

Oleh Duwi Siswanto

9.1 Pendahuluan

Sistem penyuluhan pertanian di Indonesia telah diatur oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006. Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa penyuluhan pertanian merupakan proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong serta mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan (UU RI, 2006).

Harapan selanjutnya terdapat petugas penyuluhan pertanian yaitunya bisa membimbing dan membantu masyarakat petani untuk meningkatkan hasil produksi pertanian. Menekan biaya produksi dengan efesien dan tepat guna sehingga pendapatan petani menjadi lebih baik. Ketika pendapatan sudah membaik, maka kesejahteraan petani juga akan tercapai. Guna mencapai hal-hal tersebut maka petugas penyuluh pertanian dibekali dengan beberapa metode penyuluhan pertanian (Sutrisno, dkk., 2022).

Penyuluhan lebih diarahkan pada peningkatan *capacity building* atau membangun kemampuan masyarakat, guna mendukung pengembangan masyarakat berkelanjutan. Tugas penyuluh secara tidak langsung yaitu agar bisa menggerakkan masyarakat petani dan mendampingi petani, tujuannya yaitu 1) petani mampu menganalisa masalah sosial yang terjadi

dilingkungan tempat tinggalnya; 2) bisa menemukan inti permasalahan yang sedang terjadi dan dihadapi kelompok tani; 3) membantu mengetahui dan menguraikan masalah; (4) memberikan kesempatan kepada kelomp tani mengambil sikap dan keputusan guna menyelesaikan permasalahan, dan (5) menganalisis dan memahami resiko yang terjadi dengan keputusan yang telah disepakati bersama sesama anggota kelompok tani (Bahua, 2015). Anggota kelompok tani bisa berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan, karena perempuan di lingkungan pertanian memiliki peranan penting seperti saat menanam padi dan membersihkan rumput

Petani di Indonesia terkenal tangguh dan ulet, mereka mampu belajar dan bekerjsa selaras dengan alam. Sumber daya alam yang melimpah dapat dimanfaatkan dengan baik. Adanya pembangunan dan pola pikir modern hingga ke pelosok desa, merubah pola pikir dan cara kerja petani. Lahan pertanian di paksa untuk menghasilkan secara maksimal guna memenuhi kebutuhan dan keinginan petani modern. Kondisi tersebut mengakibatkan keseimbangan alam sedikit terganggu, maka muncullah berbagai permasalahan di bidang pertanian (Simarmata, 2021). Pemerintah berupaya untuk menyelaras-kan kembali antara SDM di bidang pertanian (petani) dengan lingkungan pertanian garapannya, maka dimunculkannya penyuluh pertanian guna mengingatkan kembali ke para petani agar melakukan pertanian yang ramah lingkungan dan memaksimalkan lahan sesuai Undang-Undang Nomor 16 tentang Sistem Penyuluhan, Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan tahun 2006.

9.2 Pendekatan kepada Petani, Langkah Awal Pemberdayaan dan Penyuluhan

Pemberdayaan dalam kegiatan penyuluhan lebih cenderung ke arah penyuluhan partisipatif, terencana dan menjadikan peserta sebagai pusat kegiatan sehingga terbentuklah suasana diskusi aktif (Madolan, 2022). Penentuan keputusan dilakukan oleh petani sendiri dengan arahan dari penyuluh agar keputusan tidak menyimpang atau tidak bertentangan dengan peraturan atau undang-undang yang berlaku.

Tugas penyuluh dalam proses pemberdayaan dan penyuluhan yaitu mengarahkan dan membuka pengetahuan petani tentang permasalahan yang sedang terjadi. Penyuluh membantu proses penggalian ide dan pencarian sumber masalah yang dialami kelompok tani diawali oleh penyuluh. Posisi petani dan penyu-luh adalah mitra, penyuluh tidak bisa memaksakan kehendak-nya, lembaganya (dinas pertanian) atau organisasi yang berafi-liasi dengan pemerintah. Berawal dari sinilah proses ”belajar” dan berdaya di mulai sehingga para kelompok tani dan petani mampu melaksanakan sendiri hingga berhasil, baik secara cepat atau lambat.

Petugas penyuluh pertanian harus bisa berimprovisasi serta berinovasi dalam proses penyampaian program-program pemerintah tetapi membebaskan kepada kelompok tani untuk menindaklanjuti program sesuai hasil musyawarah desa. Tidak semua wilayah di Indonesia cocok dan bagus hasil pertaniannya, sehingga partisipasi aktif masyarakat petani sangat diharapkan. Berdasar ada gambar 9.1, bisa diketahui bahwa proses penyuluhan harus berpatokan pada kelompok tani. Kenapa harus ke kelompok tani? Karena yang mempunyai masalah adalah kelompok tani, yang mengetahui keadaan dan lingkungan juga kelompok tani.

Masalah yang telah teridentifikasi dikelompokkan ke masalah khusus dan umum, hal tersebut karena akan menghasilkan cara penanganan yang berbeda. Kelompok tani belajar tentang tujuan yang ingin di capai, memprediksi keadaan sekarang dan masa depan guna menyelesaikan masalah. Misalnya yaitu permasalahan serangan hama tikus di sawah. Penyuluh bersama kelompok tani mengurai masalah dari mengapa banyak tikus? Jawabannya bisa beragam, misalnya homogennya jenis tanaman petani sehingga makanan tikus melimpah dan serangga atau predator tikus tidak ada.

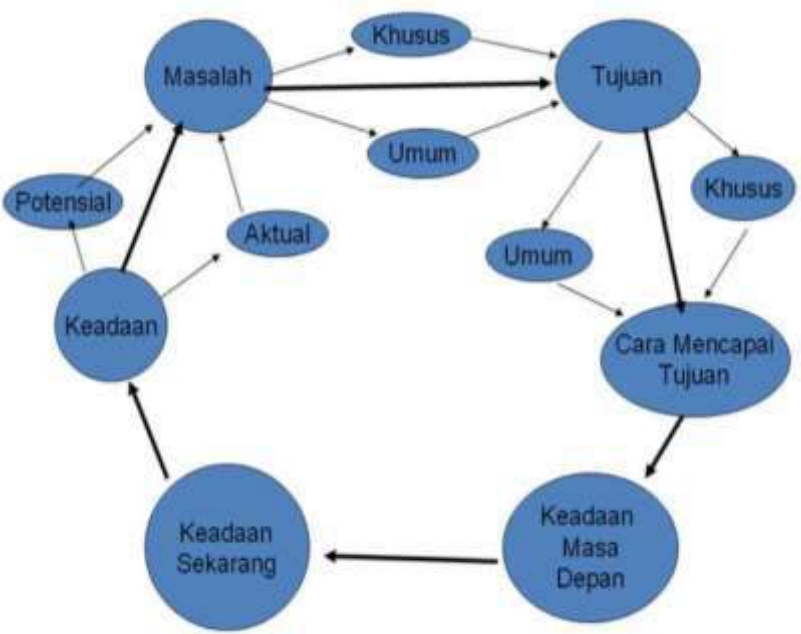

Gambar 9.1 : Alur Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
Sumber : (Slamet, 2003)

9.3 Teknik dan Metode Penyuluhan Pertanian

Metode penyuluhan pertanian adalah cara-cara yang digunakan pada saat dilakukan penyuluhan, yang bersifat belajar bersama antara petani dan petugas penyuluh. Terdapat proses mendidik, membimbing, bekerjsa sama sehingga dapat mengubah sikap, pemahaman dan perilaku petani agar lebih mandiri dan mampu menolong dirinya sendiri (*self help*). Kegiatan penyuluhan merusakan salah satu media komunikasi antara pihak pemerintah dengan masyarakat petani guna menjelasakan program-program pemerintah yang berkaitan dengan pertanian, ketahanan pangan dan pertanian ramah lingkungan serta beberapa program lainnya.

Menurut (Slamet M. , 2000) kegiatan yang disebut sebagai penyuluhan intinya adalah untuk memberdayakan masyarakat.

Masyarakat dikatakan sudah berdaya jika masyarakat tersebut tahu, mengerti, faham termotivasi, dan bisa memanfaatkan peluang, berani mengambil keputusan dan mengambil resiko sesuai dengan situasi lingkungan sekitar. Menurut (Sumardjo, 1999), ciri-ciri warga masyarakat yang berdaya yaitu: 1) memahami diri dan potensinya, sehingga mampu mengarahkan drinya sendiri; 2) memiliki perencanaan dan mampu mengan-tisipasi kondisi perubahan; 3) Memiliki kemampuan bernego-siasi, baik pada diri pribadi atau pada orang lain; dan 4) Memiliki kemampuan berkomunikasi untuk menjalin bekerjsama dengan berbagai pihak.

Guna mencapai tujuan tersebut seorang penyuluh lapang dapat menggunakan beberapa metode, agar maksud dan tujuan tersampaikan (Suriatna, 1987) (Rasyid, 2012). Prinsip media dan metoda penyuluhan, dapat digolongkan bermacam-macam, antara lain:

1. Komunikasi

   Berdasar pada tata cara komunikasi, maka metode penyuluhan dari segi komunikasi dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu.

   a. Komunikasi secara langsung (*direct communication face to face communication*). Penyuluh lapang bertemu secara langsung dengan petani guna menyampaikan pesan dan berdiskusi, misalnya cara memanfaatkan air hujan di lahan sawah tadah hujan dan proses membendung sungai guna pengairan (Sutrisno, dkk., 2016) (Sutrisno dan Sari, 2017).
   b. komunikasi secara tidak langsung (*indirect communi-cation*). Penyuluh Lapang tidak bertemu secara langsung dengan petani, tetapi penyampaian pesan dilakukan melalui perantara seperti media televisi dan radio, youtube dan media sosial lainnya.

   Pengunaan kedua metode tersebut memiliki kelemahan yaitu respon dari petani atau kelompok tani sasaran. Jika bertemu secara langsung penyuluh dapat mengetahui respon dari kelompok tani, sehingga penyuluh dapat mengambil keputusan atau tindakan dengan cepat. Saat menggunakan media komunikasi tidak langsung, respon yang diterima oleh penyuluh lambat

Tabel 9.1 : Media yang digunakan dalam proses penyuluhan pertanian

No	Metode	Media	Hubungan penyuluh-petani	Pendekatan
1	Kontak Tani	Lisan, media cetak	Langsung	perseorangan
2	Surat menyurat	Media cetak	Tak langsung	perseorangan

No	Metode	Media	Hubungan penyuluh-petani	Pendekatan
3	Karyawisata/ Anjangsana	Lisan, media cetak	Langsung	Perseorangan, kelompok
4	Demonstrasi	Lisan, media cetak, media terproyeksi	Langsung	Kelompok
5	Ceramah	Lisan, media cetak, media terproyeksi	Langsung	Kelompok
6	Kelompencapir	Lisan, media cetak, media terproyeksi	Langsung, tak langsung	Kelompok
7	Pertemuan umum	Lisan, media cetak, media terproyeksi	Langsung	Massal
8	Pameran	Lisan, media cetak, media terproyeksi	Langsung	Massal
9	Pertunjukan	Lisan	Langsung, tak langsung	Massal
10	Video	Lisan	Tak langsung	Massal
11	Media cetak	Media cetak	Tak langsung	Massal
12	Kampanye	Lisan, media cetak, media terproyeksi	Langsung, tak langsung	Massal

2. Pendekatan Kepada petani
   Metode pendekatan kepada kelompok tani dapat dilakuakn dengan tiga cara, yaitu.
   a. Perorangan

Penyuluh pertanian berhubungan langsung dengan petani secara pribadi. Kegiatan bisa kunjungan penyuluh ke rumah petani, atau sebaliknya petani berkunjung ke rumah penyuluh pertanian. Selain itu kegiatan belajar bersama, praktek dan evaluasi bisa dilakukan memanfaatkan media sosial.

b. Kelompok
Penyuluh mengumpulkan petani atau kelompok tani dalam satu ruangan dalam waktu yang sama. Kegitan bisa berupa praktek bersama, demontrasi atau diskusi.

c. Massal
Penyuluh memanfaatkan media sosial yang ada sehingga kegiatan penyuluhan dapat disaksikan atau tersampaikan kepada khalayak secara umum dengan jumlah yang banyak. Misalnya penggunaan media zoom, youtube, selebaran/flayer di media sosial, spanduk atau iklan-iklan di radio dan media cetak lainnya.

3. Indra manusia
   a. Indra penglihatan.
   Penyuluh pertanian melakukan kegiatan penyuluhan menggunakan berbagai media yang dapat di lihat oleh kelompok petani atau kelompok sasaran. Beberapa contoh media tersebut yaitu baliho, flyer dan film
   b. Indra pendengaran.
   Penyuluh menyampaikan pesan kepada petani melalui media radio/tv, telepon secara langsung, atau ceramah yang direkam sehingga dapat di dengarkan oleh kelompom petani sasaran.

   c. Kombinasi antara pendengaran, peraba dan penglihatan.
   Penyuluh mengadakan demonstrasi secara langsung dihadapan petani dan kelompok tani. Pesan yang ingin

disampaikan oleh penyuluh dapat dlihat, di dengar dan di raba bahkan di cium baunya.

9.4 Hal yang perlu Diperhatikan dalam Memilih Metode

Pemilihan metode yang tepat merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan kegiatan penyuluhan. Jadi pemilihan metode harus tepat, sesuai dengan kondisi lingkungan petani. Permasalahan antara kelompok tani satu dengan kelompok tani lainnya bisa berbeda, sehingga solusi yang digunakan guna mengatasi permasalahan juga berbeda. Menurut (Harijati, 2014), (Effendi, 2017), (Pintakami, 2021) terdapat beberapa faktor dasar dalam proses pemilihan metode penyuluhan:

1. Sasaran; penyuluh harus tahu kondisi lingkungan dan kebisaan dari kelompok sasaran, hal ini diperlukan karena agar penyampaian maksud penyuluhan lebih bisa diterima oleh kelompok tani. Tingkat pendidikan kelompok sasaran juga ikut berpengaruh serta seberapa banyak masalah dan potensi yang dihadapi oleh kelompok petani.

Tabel 9.2 : Ragam Karakteristik Metode Pemberdayaan Masyarakat

No	Karakteristik Metode pemberdayaan	Media					
		Media massa	Percakapan	Demonstrasi	Media rakyat	Diskusi kelompok	Dialog
1	Menumbuhkan kesadaran terhadap inovasi	XXO	X	XX	XX	O	O
2	Menumbuhkan kesadaran terhadap masalahnya sendiri	O	X	XX	XXX	XXX	XXX
3	Transfer pengetahuan dan teknologi	XXX	XX	XX	XX	X	XX
4	Perubahan perilaku	O	O	XX	X	XXX	XX
5	Penerapan pengetahuan dari masyarakat lainnya	O	O	X	XX	XXX	X
6	Mengaktifkan proses belajar	O	O	X	XXX	XXXX	XX
7	Pemecahan masalah di masyarakat	O	O	X	XX	XX	XXX
8	Tingkat abstraksi	XXX	XX	O	O	X	X

Ket: O – tidak diharapkan
X – tingkat manfaat yang dapat diharapkan (tergantung jumlah X)

2. Sumberdaya Penyuluhan; kemampuan penyuluh menjadi salah stau pertimbangan, apabila tidak menguasai permasalahan yang ada di desa atau kelompok tani, sebaiknya tenaga penyuluh bisa mengajak orang lain yang paham. Tenaga penyuluh yang tidak menguasai permasalahan, akan menimbulkan prasangka tidak baik terhadap kemampuan tenaga penyuluh.
3. Kondisi lingkungan wilayah dampingan atau daerah; penyuluh harus memahami tentang waktu yang sesuai dengan pembahasan masalah, misalnya, saat akan musim tanam dan hujan sudah berkali-kali, masalah yang dihadapi oleh petani dan kelompok tani yaitu mahalnya bibit dari dinas pertanian dan kelangkaan pupuk subsidi, maka jangan membicarakan masalah hama tikus, belalang dan sibuk memprediksi harga panen.
4. Kebijaksanan pembangunan pertanian; Kebijakan juga mempengaruhi metode yang diambil nantinya. Kebijakan tersebut dapat berasal dari pemerintah pusat dan daerah ataupun masyarakat petani.
5. Tahapan dan kemampuan Adopsi; Tahapan adopsi inovasi pada diri pelaku utama dan atau pelaku usaha berlangsung melalui serangkain pengalaman mental psikolog secara bertahap

9.5 Indikator Keberhasilan

Kegiatan penyuluan berdampak positif terhadap pengetahuan mitra (Muspitasari, 2019). Menurut (Notoatmodjo, 2007), keberhasilan dari kegiatan penyuluhan terdapat beberapa kriteria, yaitu:

1. Tahap sadar (*arwarness*), petani atau kelompok tani memiliki pemahaman baru tentang kegiatan pertanian, bahwa apa yang selama ini dilakukan sebenarnya kurang

tepat, misalnya cara menanam cabai, pemupukan dan cara panen dan pasca panennya.
2. Tahap minat (*interest*), setelah mengetahui hal yang baru, seorang petani sering bertanya kepada tenaga penyuluh, pada tahap ini terjadi diskusi dan tukar pengalaman antara pelaku (petani) dengan tenaga penyuluh guna menghasilkan sesuatu pengetahuan baru bagi petani.
3. Tahap mencoba (*trial*), petani mau mencoba mempraktekkan pengetahuan baru dalam skala kecil, guna mengetahui hasilnya. Jika berhasil maka pada musim tanam selanjutnya akan dilakukan dengan skala yang lebih besar serta tetap konsultasi dengan tenaga penyuluh tentang hal hal yang perlu dipersiapkan dan dilakukan dalam proses bertani.

Menurut (Sunyoto, 2004) kegiatan pemberdayaan dilakukan guna meningkatkan derajat baik secara ekonomi maupun secara pengetahuan kelompok sasaran. Beberapa indikator keberhasilan kegiatan penyuluhan pertanian antara lain:
1. Bertambahnya pengetahuan kelomppok tani tentang tata cara bertani modern dan pola berpikirnya.
2. Pendapatan petani menjadi lebih baik, dikarenakan hasil panen bisa lebih banyak dari sebelumnya
3. Meningkatnya kepedulian petani tentang tata cara bertani modern dan ramah lingkungan.
4. Kelompok tani makin mandiri karena tertatanya administrasi kelompok tani, modal meningkat, dan bervariasinya usaha yang dikembangkan petani.

DAFTAR PUSTAKA

Amirudin, Mashur, S. U. Lestari, A. Amiroh, F. Ahmad, E. Sutrisno, Suwardi, Muzafri. 2022. *Membangun Pertanian dan Peternakan Berwawasan Lingkungan: Upaya Menjaga Ekosistem Alam di Tengah Perubahan Iklim Global*. Surabaya. Global Aksara Press.

Bahua, M. I. 2015. *Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani Indonesia.* Gorontalo: ideas Publishing.

Effendi, I. 2017. *Dasar-Dasar penyuluhan pertanian.* Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.

Harijati, I. S. 2014. *Sejarah dan Pengertian Penyuluhan Pertanian. Dasar Dasar Penyuluhan Pertanian. 1st edn. .* Banten: Repositori Universitas Terbuka.

Madolan, A. 2. Oktober 2022. Von https://www.mitrakesmas.com/2018/04/pemberdayaan-masyarakat-melalui.html. abgerufen

Muspitasari, D. 2019. Pengaruh Peran Penyuluh Pertanian Terhadap Pemberdayaan Kelompok Tani Padi Di Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang. *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, 19(1), 19-23.

Notoatmodjo, S. 2007. *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku.* Jakarta: Rineka Cipta.

Pintakami, L. B. 2021. *Dasar-Dasar Komunikasi untuk Penyuluhan Pertanian.* Malang: Universitas Brawijaya Press.

Rasyid, A. 2012. Metode Komunikasi Penyuluhan Pada Petani Sawah. *Jurnal Ilmu Komunikasi (JKMS)*, 1(01).

Simarmata, M. M. 2021. *Ekonomi Sumber Daya Alam.* Medan: Yayasan Kita Menulis.

Slamet, M. 2000. *Penyuluhan Pembangunan.* Bogor: Institut Pertanian Bogor. Tidak dipubliksikan.

Slamet, M. 2003. *Pemberdayaan Masyarakat. Dalam Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan.* Bogor: IPB Press.

Sumardjo. 1999. *Transformasi Model Penyuluhan Pertanian Menuju Pengembangan Kemandirian Petani: Kasus di Propinsi Jawa Barat.* Bogor : Disertasi Doktor. Bogor: Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. .

Sunyoto, U. 2004. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suriatna. 1987. *Metode Penyuluhan Pertanian.* Jakarta: Mediatama Sarana Prakarsa.

Sutrisno, E. dan P. D. Sari 2016. Analysis Of Women'S Participation In Rainfed Rice Agricultural Systems In Gebangangkrik Village Of Ngimbang Lamongan, East Java. . *Muwazah: Jurnal Kajian Gender*, 8(2). hal: 155 - 162.

Sutrisno, E. dan P. D. Sari. 2017. Pengembangan Sistem Pemanenan Air Hujan Untuk Penyediaan Air Irigasi (Study Kasus Desa Gebangangkrik Ngimbang Lamongan Jawa Timur Dan Sekitarnya). *Agrika*, 11 (1).

Sutrisno, E. dkk., 2022. *Pengantar Pertanian Organik.* Jogjakarta: Nuta Media.

Sutrisno, E. Y. I. Siregar dan Nofrizal. 2016. Pengembangan Sistem Pemanenan Air Hujan untuk Penyediaan Air Bersih di Selatpanjang Riau. *Dinamika Lingkungan Indonesia*, Vol. 3. (1): 1 - 8.

UU RI. 2006. *Nomor 16 Tahun 2006. Tentang. Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan.*

BAB 10
MEDIA PENYULUHAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Oleh Rina Widiyawati

10.1 Pendahuluan

Media berasal dari bahasa Latin medius yang berarti tengah, perantara atau pengantar. Media merupakan perantara atau pengantar pesan dari pemberi pesan kepada penerima pesan. Semua sarana atau upaya dalam menyampaikan pesan dari pemberi pesan ke penerima pesan adalah media atau alat peraga.

Media Penyuluhan adalah semua sarana atau upaya dalam menyampaikan atau menampilkan pesan atau informasi yang disampaikan oleh komunikator melalui berbagai media atau alat peraga dengan tujuan dapat meningkatkan pengetahuan sasaran penyuluhan dan selanjutnya terjadi perubahan perilaku sesuai dengan tujuan penyuluhan.

Media penyuluhan disusun berdasarkan prinsip bahwa pengetahuan seseorang diperoleh dari penangkapan dan penerimaan panca indranya. Semakin banyak panca indra yang terlibat dalam proses penyuluhan maka akan semakin mudah pengetahuan atau informasi diserap oleh sasaran penyuluhan. Penggunaan media penyuluhan diharapkan dapat memaksimalkan keterlibatan panca indra sehingga mempermudah terbentuknya pemahaman dan persepsi dari sasaran penyuluhan. Kemudahan dalam memahami akan mempermudah meningkatkan pengetahuan dan sikap sasaran penyuluhan, yang nantinya diharapkan dapat terjadi perubahan perilaku ke arah positif. Dengan adanya pengetahuan dan sikap yang lebih baik dan

perubahan perilaku kearah yang positif, masyarakat diharapkan mampu secara mandiri untuk mengenali masalah yang sedang terjadi dan dapat menemukan solusi atas masalah tersebut. Oleh karena itu media penyuluhan sangat berperan penting dalam pemberdayaan masyarakat (Susilowati, 2016).

Dalam proses pendidikan seseorang atau masyarakat dapat memperoleh informasi atau pengetahuan melalui berbagai media atau alat peraga. Masing-masing media atau alat peraga memiliki kelebihan dan kelemahan dalam membentuk pemahaman dan persepsi sasaran penyuluhan. Menurut Elgar Dale, dalam kerucut Elgar Dale terdapat 11 macam alat peraga dan masing-masing memiliki tingkat intensitas dalam membentuk pemahaman dan persepsi sasaran penyuluhan (Dale, 1969).

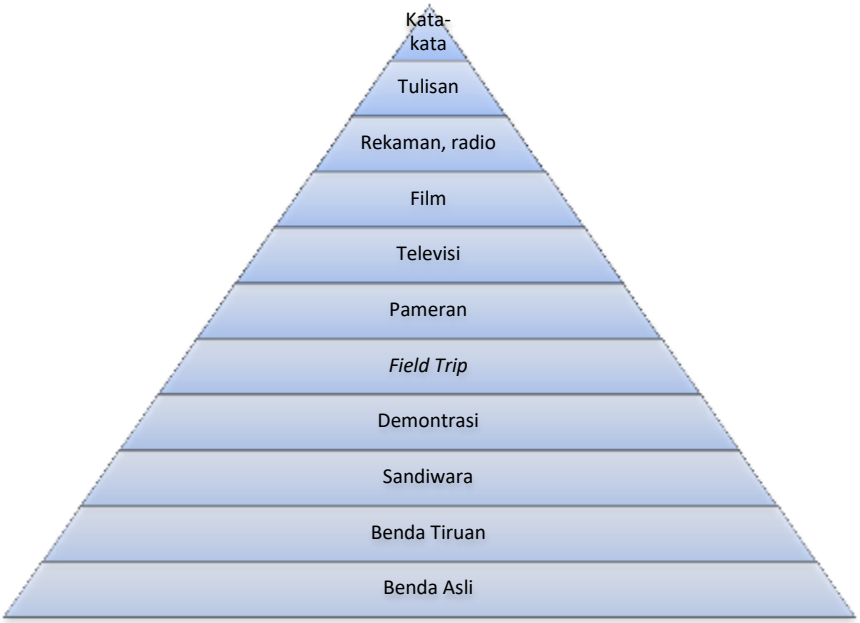

Gambar 10.1 : Kerucut Pengalaman Edgar Dale
Sumber : (Dale, 1969)

Menurut kerucut Edgar Dale bahwa lapisan bawah memiliki kekuatan intensitas tertinggi dalam membentuk pemahaman dan persepsi dan selanjutnya mengerucut sampai dengan lapisan paling atas yang memiliki intensitas terendah. Penggunaan media penyuluhan yang hanya berupa kata-kata terbukti kurang efektif dalam membentuk persepsi sasaran penyuluhan dikarenakan intensitasnya yang sangat rendah.

Pemilihan media atau alat peraga dalam penyuluhan sangat mempengaruhi hasil dalam proses pendidikan. Tingkat keterlibatan dimulai dari lapisan atas yaitu verbal kemudian visual dilanjutkan dengan terlibat dan lapisan terakhir dengan berbuat. Efektifitas media terhadap pemahaman materi secara:

1. Verbal : 1x
2. Visual : 3,5x
3. Verbal dan visual : 6x

Berdasarkan perbedaan kemampuan daya ingat seseorang secara :

Sesudah 3 jam	**Sesudah 3 hari**
Verbal 10%	Verbal 70%
Visual 20 %	Visual 72 %
Verbal dan Visual 65%	Verbal dan Visual 85%

Media atau alat peraga yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan dapat membantu pemberi pesan dalam menyampaikan pesan-pesannya secara jelas, begitu pula dengan sasaran penyuluhan sebagai penerima pesan bahwa media atau alat peraga akan mempermudah mereka untuk memahami informasi secara jelas. Diharapakan dengan pemahaman dan persepsi yang mereka miliki dapat membentuk perilaku mandiri dan terbentuk pemberdayaan masyarakat.

10.2 Tujuan dan Peranan Media Penyuluhan

Media penyuluhan merupakan salah satu upaya untuk menyampaikan informasi yang ingin disampaikan oleh komunikator baik melalui media cetak, media elektronik ataupun media luar ruangan. Dengan adanya media penyuluhan diharapkan sasaran dapat dengan mudah menerima dan memahami pesan yang diterimanya(Pakpahan dkk., 2021). Tujuan media penyuluhan diantaranya :

1. Media dapat mengurangi kesalahpahaman persepsi.
2. Media dapat mempermudah komunikator menyampaikan informasi.
3. Media dapat mempermudah pengertian.
4. Media dapat memperjelas informasi yang disampaikan.
5. Media dapat mengurangi komunikasi yang verbal.
6. Media dapat membantu menampilkan obyek yang sulit ditangkap oleh mata.
7. Media dapat memperlancar proses komunikasi antara komunikator dengan sasaran.

10.3 Syarat-syarat Media Penyuluhan

Dalam proses pembuatan media penyuluhan terdapat hal-hal yang harus diperhatikan agar media penyuluhan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Syarat-syarat media penyuluhan yang baik diantaranya :

1. Mudah dimengerti, mudah dikenal dan sederhana.
2. Menyampaikan sebuah ide khususnya ide baru.
3. Menarik perhatian sasaran.
4. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami sasaran.
5. Memerlukan ketelitian.
6. Mampu mengajak sasaran penyuluhan untuk memperhatikan, mengingat, memahami, mencoba dan menerima ide-ide baru yang disampaikan.

10.4 Keterbatasan Media Penyuluhan

Dalam praktiknya kegiatan penyuluhan dapat terkendala oleh berbagai keterbatasan. Keterbatasan yang dimaksud antara lain keterbatasan jumlah penyuluh, keterbatasan dari sasaran penyuluhan, keterbatasan waktu dan keterbatasan sarana prasarana. Penggunaan media merupakan salah satu upaya mengatasi keterbatasan-keterbatasan tersebut. Penggunaan media yang tepat disertai dengan peningkatan peranan media diharapkan dapat memaksimalkan hasil kegiatan penyuluhan. Peranan media penyuluhan dapat ditinjau dari berbagai segi yaitu proses komunikasi, proses belajar dan proses peragaan.

1. Peranan media penyuluhan sebagai saluran komunikasi
   a. Menyalurkan pesan/informasi dari komunikator kepada sasaran, sehingga sasaran dapat menerapkan pesan sesuai kebutuhan
   b. Memberikan umpan balik dari sasaran kepada komunikator sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan dan pengembangan.
   c. Menyampaikan pesan yang diperoleh sasaran kepada masyarakat luas, hal ini bertujuan dalam mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera.
   d. Memungkinkan dilaksanakannya penyuluhan secara teratur dan sistematis.
2. Peranan media penyuluhan sebagai media belajar
   Dalam tahap awal penyuluhan peranan penyuluh sangat dominan dalam kegiatan belajar sasaran penyuluhan. Namun seiring dengan waktu maka sasaran dapat menjadi lebih fleksibel, dapat belajar dari pengalaman sehingga penyuluh dapat menjadi mitra kerja yang berfungsi sebagai pendamping dan memberikan solusi dalam memecahkan masalah.
   a. Memberi pengalaman belajar yang integral dari hal konkrit ke hal abstrak.

b. Kegiatan proses belajar dapat berlangsung secara terus menerus dan berkelanjutan.
c. Kegiatan proses belajar mandiri.

3. Peranan media penyuluhan sebagai peragaan
   Salah satu faktor penting dalam mencapai keberhasilan kegiatan penyuluhan adalah peragaan. Kegiatan peragaan sangat erat hubungannya dengan keterlibatan panca indera, sehingga membuka peluang lebih besar dalam keberhasilan kegiatan penyuluhan. Media penyuluhan dengan alat peraga dapat memberikan hasil yang lebih efektif karena sasaran belajar dengan cara melihat, mendengar dan mengerjakan/praktik.
   a. Media penyuluhan dapat mempertinggi efektivitas belajar.
   b. Media penyuluhan dapat meningkatkan interaksi sasaran dengan lingkungannya.
   c. Media penyuluhan dapat meningkatkan ketrampilan.

10.5 Jenis Media Penyuluhan

Jenis media penyuluhan yang digunakan sangat beragam sesuai dengan tujuan penyuluhan dan kondisi sasaran penyuluhan. Berbagai jenis media penyuluhan dikelompokkan sesuai dengan kriteria masing-masing(Sudiman, 1990). Adapun dasar dari pengelompokan media penyuluhan diantaranya :

1. Perkembangan media pendidikan dimulai dari peranan awalnya sebagai alat bantu mengajar (*teaching aids*). Penggunaan alat bantu audio visual, misalnya gambar, model, monster, benda sesungguh nya, telah lama terbukti dapat memberi pengalaman kongkrit, memberi motivasi belajar, mempertinggi daya serap dan tretensi belajar. Penggolongan media pendidikan dapat digolongkan berdasarkan stimulus atau rangsangan yang ditambahkannya. Bermacam-macam media pendidikan dapat dikelompokkan berdasarkan rangsangan terhadap pancaindera seperti indera penglihatan,

indera pendengaran, indera penciuman, indera perasa dan indera peraba.

2. Timbulnya teori komunikasi memberi pengaruh dan menyebabkan perubahan pandangan terhadap alat audio-visual. Alat audio-visual tidak hanya dipandang sebagai alat bantu melainkan juga sebagai alat menyalurkan pesan (*channel*), yang berasal dari pemberi pesan. Alat audio visual sebagai penyalur pesan dapat dikelompokkan berdasarkan jangkauannya. Jangkauan audio visual dapat bersifat massal seperti media cetak, siaran radio, siaran televisi dan lain-lain. Disamping itu digunakan untuk kegiatan pendidikan yang bersifat kelompok dan individual.
3. Perkembangan berikutnya dalam proses belajar timbul pandangan bahwa perubahan tingkah laku merupakan komponen yang menentukan dalam mengukur keberhasilan proses belajar. Teori tingkah laku (*behavior theory*) memandang agar lebih memperhatikan perubahan tingkah laku dalam proses belajar. Bahkan memberi dorongan agar dapat menciptakan media pendidikan sebagai media belajar yang dapat mengubah tingkah laku sesuai dengan tujuan belajar. Peranan media pendidikanmenjadi lebih panjang agar dapat memberi dorongan untuk belajar secara mandiri tanpa hadirnya pemberi pesan secara fisik misalnya melalui media terekam, media tercetak dan media terproyeksi. Bentuk dan karakteristik media tersebut dapat pula dijadikan dasar dalam pengelompokkan media pendidikan.

Dasar-dasar pengelompokkan media penyuluhan di atas selanjutnya dapat diklasifikasikan berdasarkan rangsangan penerimaan / indera penerimaan, daya liput/jumlah sasaaran, pengalaman belajar dan bentuk/karakteristik, media sebagai berikut (Adventus dkk., 2019):

1. Klasifikasi media penyuluhan berdasarkan panca indera.
    a. Media benda sesungguhnya, rangsangan melalui seluruh panca indera antara lain: spesimen, monster, sample.
    b. Media audio-visual rangsangan melalui indera pendengaran dan indera penglihatan antara lain film, siaran televisi, video.
    c. Media Visual, melalui indera penglihatan antara lain : film, slide, foto, poster.
    d. Media Audio, rangsangan melalui indera pendengaran antara lain : kaset rekaman, siaran radio.
2. Klasifikasi media penyuluhan berdasarkan daya liput/jumlah sasaran.
    a. Media Massal antara lain: siaran radio, siaran televisi danmedia cetak.
    b. Media Kelompok antara lain: film, slide, kaset rekaman, transparansi.
    c. Media individual antara lain : benda sesungguhnya, spesimen.
3. Klasifikasi media penyuluhan berdasarkan tingkat pengalam belajar terdiri dari:
    a. Media yang memberikan pengalaman belajar secara kongkritmelalui kehidupan masyarakat antara lain benda sesunguhnya, petak percontohan, spesimen.
    b. Media yang memberi pengalaman belajar melalui benda/situasi tiruan antara lain: simulasi, permainan, model.
    c. Media yang memberi pengalaman belajar melalui audio-visual aids (AVA) antara lain : film,slide, kaset dan rekaman.
    d. Media yang memberi pengalam belajar melalui kata-kata baik lisan atau tertulis antara lain : buku, majalah, ceramah.
4. Klasifikasi media penyuluhan berdasarkan bentuk/ karakteristik media :
    a. Media benda/situasi sesungguhnya antara lain : percontohan tanaman/ternak
    b. Media berupa/situasi tiruan antara lain: model, simulasi, permainan simulasi.

c. Media terproyeksi antara lain : film, siaran TV, film slide.
d. Media tercetak misalnya poster, leaflet, folder, liptan.
e. Media terekam misalnya : kaset, siaran radio, CD, VCD, DVD.

5. Klasifikasi media penyuluhan pertanian berdasarkan cara produksinya, media penyuluhan dibagi menjadi 3 yaitu :
   a. Media cetak, yaitu suatu media statis dan mengutamakan pesan-pesan visual. Media cetak pada umumnya terdiri dari gambaran sejumlah kata, gambar atau foto dalam tata warna. Fungsi utama media cetak ini adalah memberi informasi dan menghibur Adapun macam-macamnya adalah: poster, leaflet, brosur, majalah, surat kabar, lembar balik, stiker, dan pamlet.

      Kelebihan dan kelemahan media cetak

      1) Kelebihannya: Tahan lama, mencakup banyak orang, biaya tidak tinggi, dapat dibawa kemana – mana, dapat mengungkit rasa keindahan, mempermudah pemahaman, meningkatkan gairah belajar.
      2) Kelemahan: Media ini tidak dapat menstimulir efek suara dan efek gerak dan mudah terlipat

   b. Media elektronika, yaitu suatu media bergerak dan dinamis, dapat dilihat dan didengar dalam penyampian pesannya melalui alat bantu elektronika. Adapun macam-macam media tersebut adalah: TV, Radio, Film, Video film, Cassete, CD dan VCD.

      Kelebihan dan kelemahan media elektronika

      1) Kelebihannya: Sudah dikenal masyarakat. mengikutsertakan semua panca indra, lebih mudah dipahami, lebih menarik karena ada suara dan gambar bergerak, bertatap muka, penyajian dapat dikenadalikan, jangkauan relatif lebih besar dan sebagai alat diskusi dan dapat diulang-ulang.
      2) Kelemahannya atara lain : biaya lebih tinggi, sedikit rumit, perlu listrik, perlu alat canggih untuk produksinya, perlu

persiapan matang, peralatan selalu berkembang dan berubah perlu ketrampilan penyimpanan dan perlu terampil dalam pengoperasian

c. Media luar ruang yaitu media yang menyampaikan pesannya diluar ruang secara umum melalui media cetak dan elektronika secara statis, misalnya: Papan rekalme yaitu poster dalam ukuran besar yang dapat dilihat secara umum di perjalanan, dpanduk yaitu suatu pesan dalam bentuk tulisan dan disertai gambar yang dibuat di atas secarik kain dengan ukuran tergantung kebutuhan dan dipasang di suatu tempat strstegi agar dapat dilihat oleh semua orang pameran, Banner, TV layar lebar.

Kelebihan dan kelemahan media luar ruang

1) Kelebihannya: sebagai infromasi umum dan hiburan, mengikutsertakan semua panca indralebih mudah dipahami, lebih menarik karena ada suara dan gambar bergerak, bertatap muka, penyajian dapat dikendalikan dan jangkauan relatif lebih besar.
2) Kelemahannya: biaya lebih tinggi, sedikit rumit, ada yang memerlukan listrik, ada yang memerlukan alat canggih untuk produksinya, perlu persiapan matang, peralatan selalu berkembang dan berubah, perlu ketrampilan dalam pengoperasian

10.6 Dasar Pemilihan Media Penyuluhan

Dalam kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, banyak media penyuluhan yang dapat digunakan. Namun terdapat hal penting yang harus diperhatikan yaitu bukan pada banyak tidaknya media penyuluhan yang tersedia, namun bagaimana merencanakan dan membuat media yang tepat untuk digunakan dalam kegiatan pelatihan dan penyuluhan sesuai dengan sasaran, kebutuhan dan tujuan penyuluhan. Penentuan jenis media penyuluhan yang efektif merupakan langkah pertama yang perlu

dilakukan dalam perencanaan suatu pelatihan atau penyuluhan (Saadah dkk., 2022). Terdapat beberapa contoh pertanyaan yang dapat diajukan berkaitan dengan penentuan jenis media yang digunakan, antara lain:

1. Siapa yang akan dilatih?
2. Apa yang diharapkan dan mampu dilakukan oleh peserta didik?
3. Dimana pelatihan akan diadakan dan berapa lama?
4. Metode belajar apa yang digunakan?
5. Media penyuluhan apa yang akan digunakan ?
6. Bagaimana mengetahui efektifitas pelatihan/penyuluhan ?

Dalam menentukan jenis media penyuluhan yang akan digunakan, terdapat hal-hal yang harus diperhatikan diantaranya adalah:

1. Tetapkan pesan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan sasaranyakni kebutuhan petani.
2. Rumuskan tujuan yang hendak dicapai yakni perubahan prilaku petani dengan aspek pengetahuan keterampilan dan sikap.
3. Lakukan pemilihan terhadap media penyuluhan yang tersedia, potensi lingkungan petani yang dapat dimanfaatkan sebagai media penyuluhan dan penilaian terhadap tahap adopsi sasaran
4. Perhitungan biaya yang diperlukan untuk persiapan pembuatan atau pengadan media penyuluhan.
5. Tetapkan media penyuluhan sesuai dengan metode penyuluhan yang telah ditetapkan.
6. Lakukan evaluasi pemilihan dan penggunaan metode

Evaluasi sangat perlu dilakukan agar kita dapat mengetahi sejauh mana efektivitas media penyuluhan yang telah kita dipilih dan digunakan. Evaluasi dapat kita gunakan sebagai perbaikan dalam menentukan media penyuluhan yang akan digunakan berikutnya. Pemilihan media penyuluhan yang tepat tentunya

akan memberikan dan meningkatkan efektivitas penggunaan media dalam mencapai tujuan penyuluhan.

Tidak ada satupun media penyuluhan yang dapat digunakan untuk mencapai semua tujuan, sehingga tidak mungkin menggunakan media penyuluhan yang sama untuk setiap kegiatan penyuluhan dan tidak mungkin satu media penyuluhan dapat mencapai berbagai macam tujuan penyuluhan. Media tidak dapat dipilih dan digunakan asal saja, tetapi harus dipilih dengan seksama dan digunakan dengan benar.

Dalam melaksanakan penyuluhan, pemilihan jenis media yang digunakan perlu dipertimbangkan pada kesesuaian antara metode belajar mengajar, tujuan dan situasi penyuluhan. Beberapa kriteria yang digunakan dalam pemilihan media penyuluhan pertanian adalah:

1. Tujuan penyuluhan
   Tujuan Kegiatan penyuluhan adalah terjadinya perubahan perilaku sasaran penyuluhan sesuai dengan tujuan penyuluhan dan perkembangan teknologi yang ada.
2. Tahap adopsi sasaran
   Pemilihan media disesuaikan dengan tahap adopsi sasaran penyuluhan. Tahap kesadaran, minat penilaian, mencoba dan menerapkan, masing-masing memerlukan media yang efektif misalnya untuk tahap adopsi penilaian dan mencoba, dipilih media sesungguhnya melalui metode demonstrasi.
3. Jangkauan media penyuluhan
   Pemilihan disesuaikan dengan jangkauan media, untuk pendekatan perorangan dan kelompok dipilih media sesungguhnya melalui metode demonstrasi cara, kunjungan sedangkan untuk pendekatan massal dipilih media sesungguhnya melalui metode pameran, media terekam melalui siaran radio dan terproyeksimelalui siaran televisi.
4. Karakteristik
   Karkteristik media berkaitan dengan rangsangan terhadap

indera sasaran. Penggolongan media menurut kelompok audio-visual misalnya adalah untuk memudahkan memilih tingkat pendidikan formal sasaran yang sangat bervariasi.

5. Pertimbangan dana
   Sedapat mungkin media yang dipilih adalah media dengan biaya relative terjangkau namun efektivitasnya tinggi. Pemilihan media sesungguhnya yang dapat dibuat sendiri dengan harga relative murah merupakan alternatif yang perlu di tempuh apabila dana yang tersedia sangat terbatas.
6. Pemilihan beberapa media penyuluhan untuk digunakan secara terpadu

Penggunaan media penyuluuhan lebih dari satu jenis atau macam juga dapat dilakukan oleh tenaga penyuluhan. Dapat dipilih antara beberapa kelompok media: misalnya media tercetak dikombinasikan dengan media terekam dan media terproyeksi. Penggunaan kombinasi dari beberapa jenis media penyuluhan secara prinsip harus tetap mengacu pada efektivitas dan efesiensi pelaksanaan penyuluhan dalam mencapai tujuan penyuluhan.

10.7 Pembuatan Media Penyuluhan Pertanian

10.7.1 Persiapan Pembuatan Media Penyuluhan

1. Beberapa pemikiran berkaitan dengan pembuatan media penyuluhan pertanian (Padmo, 2000)
   a. Pemanfaatan benda sesungguhnya yang bersumber dari tranaman/Ternak di pedesaan sebagai media penyuluhan pertanian.Misalnya pohon mangga jenis ungul dikebu petani yang telah memenuhi syarat untuk menjadi pohon induk dan telah memperoleh sertifikat dari instansi terkait, begitu pula jenis unggul ternak milik petani yang memenuhi syarat dijadikan petani sebagai induk dan percontohan penyuluh Pertanian dapat memanfaatkan

sebagai media penyuluhan pertanian dan mendorong petani untuk mengembangkan menjadi penangkar benih.

b. Partisipasi petani dalam pembuatan media Penyuluhan Pertanian misalnya petani yang senang mengumpulkan berbagai hama tanaman dapat dimanfaatkan dalam membuat insektarium.

c. Penampilan lembaga-lembaga yang terkait dengan kegiatan penyuluhan pertanian misalnya Balai Benih dan lain-lain, apabila penataan lingkungannya baik maka sekaligus dapat berfungsi sebagai percontohan/sebagai media penyuluhan pertanian.

d. Bahwa tidak semua media penyuluhan pertanian dapat dibuat sendiri oleh penyuluh, namun pembuatan media penyuluhan pertanian yang sederhana dan praktis untuk digunakan adalah perlu. Untuk itu Penyuluh Pertanian harus kreatif, mempunyai kemampuan dan keterampilan membuat media penyuluhan pertanian tersebut.

2. Beberapa Petunjuk Umum dalam persiapan pembuatan media penyuluhan pertanian.
   a. Memenuhi persyaratan media antara lain :
      1) Adanya pesan yang jelas, menarik perhatian
      2) Mudah dimengerti, mendorong untuk menerapkannya.
   b. Keterampilan merancang antara lain : membuat gambar, skets, grafik, bagan dan sebagainya.
   c. Keterampilam menata gambar dengan memperhatikan.
      1) Kesederhanaan, tonjolkan gambar/hal yang penting saja.
      2) Keseimbangan antara gambar dan kata-kata.
      3) Keserasian/harmonis.
      4) Menonjolkan pusat perhatian.
      5) Irama atau aliran gerak yang serasi.

d. Keterampilan menyusun naskah dan membuat skenario.
    1) Naskah ilmiah semimpopuler, ilmiah populer dan tulisan populer.
    2) Skenario pembuatan slide, rekaman dan lain-lain. Sebaiknya menggunakan bahasa indonesia yang baik dan benar.
e. Menyediakan alat dan bahan yang diperlukan antara lain
    1) Alat gambar.
    2) Alat pembuat huruf, alat dan bahan khusus menurut jenis media yang akan dibuat.

10.7.2 Membuat Media Penyuluhan Pertanian Siaran Radio

Siaran Radio adalah Media Audio yang hanya mengandalkan bunyi dan suara untuk menyampaikan informasi dan pesan. Program audio akan sangat efektif bila dengan menggunakan bunyi dan suara kita dapat merangsang pendengar untuk menggunakan daya imajinasinya sehingga ia dapat menvisualkan pesan-pesan yang ingin disampaikan.

1. Tujuan dari Siaran Radio untuk :
    a. Menyebarluaskan inovasi/teknologi kepada masyarakat secara luas.
    b. Menarik perhatian masyarakat adanya teknologi atau inovasi.
    c. Mendorong petani dan masyarakat luas untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya.
    d. Memberikan hiburan kepada masyarakat khususnya petani dan keluarganya.
2. Prosedur pembuatan Siaran Radio.
    a. Tahap Pra – Produksi
        1) Pemilihan topik yang tepat
        2) Penentuan bentuk siaran yang sesuai
            a) Uraian
            b) Reportase

c) Dialog
d) Wawancara
e) Diskusi
f) Laporan Pembangunan
g) Dinamika Pembangunan
h) Sandiwara Dll.

3) Studi pustaka/survei lapangan (bila diperlukan)
4) Pembagian tugas dan tanggung jawab tim (organisasi produksi)
   a) Produser
   b) Sutradara
   c) Asisten Sutradara
   d) Kameramen
   e) Penulis Skenario
   f) Narator, Pemain Dsb.
5) Pengumpulan data
6) Persiapan perangkat-perangkat untuk produksi / penayangan (live)

b. Tahap Produksi
   1) Pengolahan data
   2) Pengambilan suara (untuk rekaman)
   3) Penyusunan naskah jadi

c. Tahap Pasca Produksi
   1) Editing
   2) Packing
   3) Penyerahan ke bagian penyiaran (Radio, Studio)

3. Tindak lanjut
   a. Bimbingan penyuluh untu menumbuhkan kelompok pendengar/pemirsa.
   b. Mendorongan anggota kelompok untuk membiasakan mendengar/melihat siaran radio.
   c. Mendorong anggota kelompok untuk melakukan diskusi.

d. Memberikan bahan penunjang kepada kelompok misalnya bahan cetak.
e. Melakukan acara kunjungan.
f. Mengikutsertaan kelompok untuk mengisi siaran
g. Mengadakan lomba / kontes, sayembara, dsb.
h. Mebimbing petani dan keluarganya untuk menetapkan inovasi/teknologi yang disiarkan lewat radio.
i. Mendorong sasaran untuk memberikan umpan balik terhadap siaran radio, misalnya mengirim surat, telephon, sms, e_mail, face book, dsb.

DAFTAR PUSTAKA

Adventus, I. M. M. Jaya, dan D. Mahendra. 2019. *Buku Ajar Promosi Kesehatn*. Jakarta: Universitas Kristen Indonesia.

Dale, E. 1969. *Audio Visual Methods in Teaching*. New York: Holt, Rinerhart and Winston Inc. The Dryden Pres.

Padmo, S. 2000. *Media Penyuluhan Pertanian Dan Komunikasi*. Jakarta: Departemen Pertanian.

Pakpahan, M., D. Siregar, A. Susilawaty, T. Mustar, R. Ramdany, E. I. Manurung, E. Sianturi, M. R. G. Tompunu, Y. F. Sitanggang, dan Maisyarah.M. 2021. *Promosi Kesehatan & Prilaku Kesehatan*. Edisi 1. Medan: Yayasan Kita Menulis.

Saadah, N., E. Winarti, N. A. Fajar, S. Muthoharoh, Y. A. Lestari, R. Widiyawati, I. Julianti, R. Maharani, E. Leonita, F. Etrawati, wilma H. Daniel, W. Lionita, dan S. Arifin. 2022. *Promosi Kesehatan*. Bandung: Media Sains Indonesia.

Sudiman, A. S. 1990. *Media Pendidikan*. Jakarta: CV. Rajawali Citra.

Susilowati, D. 2016. *Modul Bahan Ajar Cetak Keperawatan: Promosi Keperawatan*. Edisi Pertama. Jakarta Selatan: Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.

BAB 11
MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Oleh Abdurohim

11.1 Pendahuluan

Pemahaman monitoring dan evaluasi dalam pemberdayaan masyarakat (Abdurohim, 2022; Doyan, 2019; Doyan *et al.,* 2019), dalam program pemberdayaan masyarakat seperti LSM, Pihak Kampus, dilakukan secara rutin dalam waktu tertentu, sehingga antara program dan realisasi terkendali.

Evaluasi (Abdurohim, 2021e; A. Hidayat, 2019; W, 2021) merupakan aktivitas yang dilakukan oleh Masyarakat, pihak lain yang telah diberikan kewenangan untuk melaksanakan kegiatan membantu pemerintaj untuk memperbayakan masyarakat, sehingga masyarakat memiliki kemampuan baik dalam berusaha, meningkatkan kapsitasnya sebagai petani, peternak, perikanan dan kehutanan untuk membandingkan antara program yang telah dibuat diperbandingkan dengan realisasinya seberapa besar pencapaiannya apakah masih rendah, sudah memenuhi apa yang telah ditetapkan dalam program atau seluruhnya tercapai dalam waktu yang ditetapkan. Untuk penilaiannya biasanya dilakukan setiap tiga bulan atau dikenal dengan sebutan triwulanan (ARLINDA, 2016; Nur Muhammad *et al.,* 2018; Ramadhani & Andriani, 2021; Subiyanto, 2013; Suradisastra, 2016).

Dalam melakukan evaluasi terhadap program pemberdayaan masyarakat (Faqih, 2020; Sudaryanto *et al.,* 2014; Sulaiman *et al.,* 2020), setiap pihak yang diserahkan

tanggungjawab akan melakukan evaluasi terhadap aktivitas yang telah dirundingkan bersama dengan masyarakat atas program-program yang disepakati, meliputi 4 (empat) langkah yang harus diikuti oleh pihak yang memiliki program pemberdayaan masyarakat (Abdurohim, 2021b, 2022; Azizah et al., 2015; Sukesi et al., 2018; Wirawan, 2019), meliputi: Melakukan evaluasi (Jain *et al.,* 2020) harus memiliki topik yang jelas disesuaikan dengan rencana program yang menjadi target untuk dilaksanakan, hal ini penting guna sinkronisasi antara program yang direncanakan dengan evaluasi tepat.

Evaluasi atas program (Nalukwago *et al.,* 2020; Suparno, 2019) yang telah direncanakan tentunya harus disusun dengan baik, sehingga alur pelaporannya dilakukan secara sistimatis, berurtan dan satu sama lain tidak tumpang tindih, sehingga yang menerima laporan memahami atas aktivitas yang telah dilakukan serta melihat hasilnya. Untuk menyususn laporan evaluasi (Mahmudah, 2018; Tenggara Strategics, 2022) memerlukan data pendukung yang akurat dan kridibel, sehingga pihak-pihak yang telah menerima amanah untuk menlaksanakan kegiatan harus mengumpulkan data yang terperinci dan lengkap.

Bila data yang diperlukan telah lengkap sesuai dengan tahapan program yang telah dilakukan, barulah pihak-pihak yang telah menerima mandat melaksanakan program, maka dilakukan analisis data sesuai dengan metode yang telah dipilih, dalam melakukan analisis data harus benar-benar melakukannya sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah dilakukan, jangan sampai data yang dianalisis memiliki keakuratan yang lemah, sehingga akan merugikan semua pihak (Abdurohim, 2021e; Finthariasari et al., 2020; Wirawan, 2019).

Kegiatan terakhir dari tahap evaluasi adalah membuat laporan sesuai dengan format baku yang telah dietapkan oleh pemberi program untuk membantu pemberdayaan masyarakat

(Abdurohim, 2021a; Ramadhani & Andriani, 2021). Kegiatan evaluasi (Abdurohim, 2021e; Wulan *et al.,* 2019) ini sangat lah penting, dalam rangk mendukung kesuksesan langkah selanjutnya, sebab dari hasil evaluasi yang dihasilkan akan mampu menetapkan program selanjutnya baik untuk perbaikan, maupun sukses yang dicapai dari pengalaman yang diperoleh dari kegiatan sebelumnya. Hasil evaluasi bisa memberikan gammbaran sejauhmana tahap pertama,kedua dan selanjutnya dilaksanakan, mengkoordinasikan pencapaian atas hasil yang dicapai, sebab melaksanakan kegiatan program pemberdayaan masyarakat membutuhkan effort yang besar terutama pada awal kegiatan, mengingat yang dihadapi oleh pelaksana program ketidakpahaman masyarakat terhadap program, pihak-pihak yang menentang, serta pihak-pihak lin yang ingin menggagalkan program pemberdayaan masyarakat (Alfret Goraph, 2021; Masrul, 2018; Sudaryanto *et al.,* 2014; Sulaiman *et al.,* 2020; Wahyuni & Prasetyaningsih, 2020).

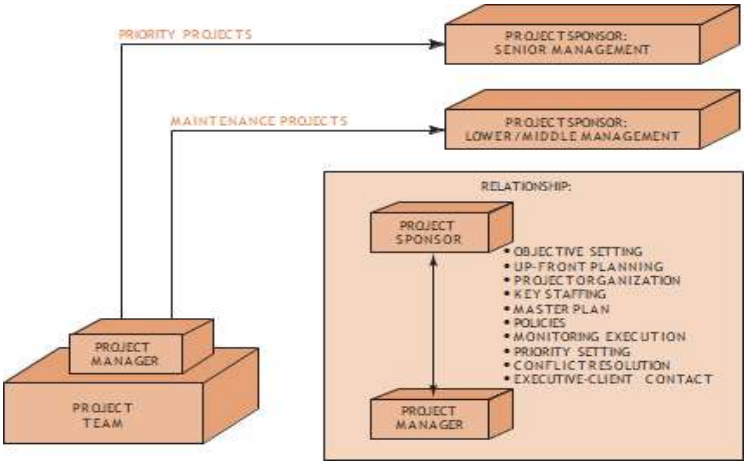

Gambar 11.1 : Proses Pelaksanaan Project
Sumber: (Harold, 2017)

11.2 Kriteria Utama Dalam Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi

Melakukan monitoring dan evaluasi pada kegiatan pemberdayaan masyarakat harus didasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan sesuai dengan kaidah-kaidah secara umum dilakukan pada tahap monitoring dan evaluasi, jangan sampai dalam melakukannya hanya didasarkan pada eforia karena telah terjadi degredasi moral yang membolehkan segala aktivitas monitr dan evaluasi menyimpang atau tidak sesuai dengan etika pada umumnya (Buryakov & Sysoeva, 2021; Manfreda *et al.,* 2018; Sparrow *et al.,* 2020).

Untuk menjaga *fair play* dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap program pemberdayaan masyarakat (Alfret Goraph, 2021; Azizah *et al.,* 2015) yang telah dilakukan, maka pelaporannya harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Masyarakat memberikan dukungan (Niode, 2009; Sukirman & Indaryani, 2014) atas laporan mengingat pemberdayaan yang dilakukan sesuai dengan apa yang menjadi keinginan masyarakat setempat.
2. Dalam penggunaan dana bantuan (Setiawati, 2019) untuk memperdayakan masyarakat sesuai dengan peruntukannya
3. Melaksanakan kegitan pelaporan atas moitoring dan evaluasi yang dilakukan secara bersama, serta penghargaan yang tidak membeda-medakan antar anggota (Mu'am & Nurdin, 2021).
4. Menggunakan pendekatan yang mengedepankan kejujuran dan memiliki integritas dalam menyusun pelaporan baik yang dilakukan (Suparno, 2019).
5. Selalu memiliki saifat berkoloborasi untuk membuat pelaporan, sehingga tidak terjadi gejolak perpecahan (Chandrasekaran & Narayanan, 2020).

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh pihak yang mendapatkan kepercayaan dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan, serta mendapat dukungan dari semua anggota, karena adanya tujuan bersama dalam menangani permasalahan yang terjadi.

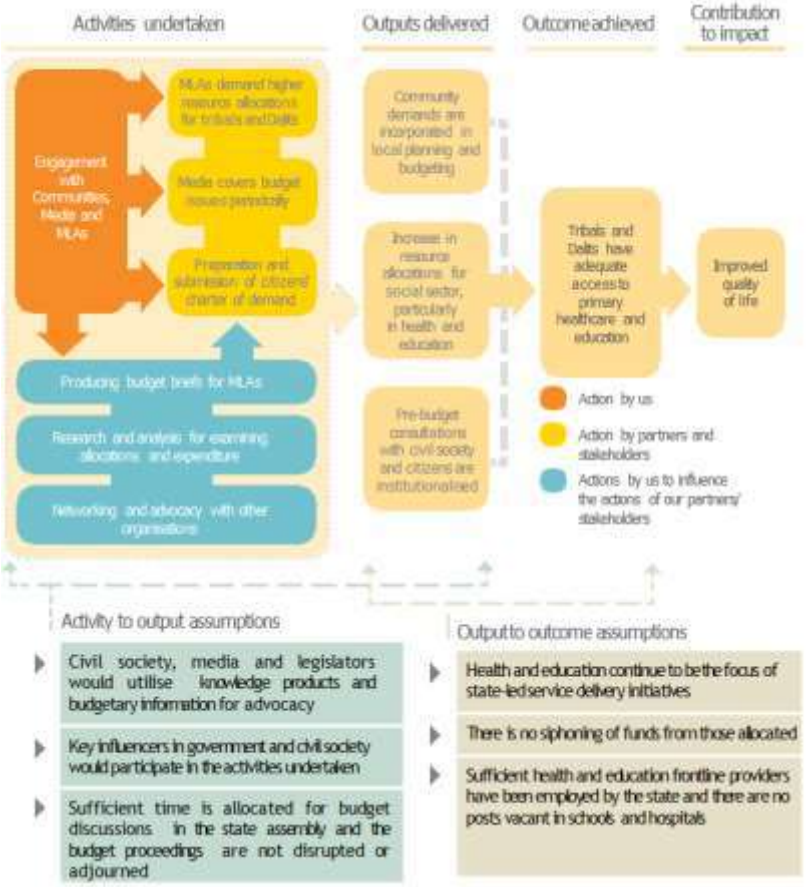

Gambar 11.2 : Proses kegiatan Monitoring dan Evaluasi Proyek
Sumber: (Chandurkar & Sen, 2014)

11.3 Implementasi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat

Pelaksanaan kegiatan monitoring merupakan aktivitas pelaksana kegiatan yang telah diberikan kepercayaan oleh Pemerintah harus dijalankan dengan sungguh-sungguh dan fokus (Abdurohim, 2021d; Wulandari & Rasipan, 2017), karena bila cacat dalam pelaksanaanya maka akan menyebabkan ketidakpercayaan dari pemilik program, pada tahun berikutnya atau bisa terkena *blacklist*. Karena itu dalam melakukan monitoring perlu dilakukan langkah-langkah sistimatis, yaitu:

1. Membuat design atas penilaian program (logical program),
2. Membuat tek,ik dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi
3. Melakukan pengukuran monev sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sehingga dalam melakukan evaluasi berdasarkan norma yang berlaku.
4. Mengolah hasil dari penilaian yang diperoleh baik dari data maupun observasi

Setiap pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Abdurohim, 2021c; Lohman, 2021) merupakan bagian yang harus dilaksanakan, diperuntukan untuk menilai apa yang belum dilaksanakan dan apa yang harus dilaksanakan, sehingga program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan yang semula dicanangkan, kegagalan dalam pelaksanaan program pemberdayaan disebabkan karena para pengelola membiarkan pelaksanaanya dilakukan tanpa pengawasan, sehingga ketika telah melangkah terlalu jauh dari program yang semula ditetapkan, maka susah untuk dilakukan perbaikan.

11.4 Klasifikasi Monitoring Dan Evaluasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Seiring dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat (Abdurohim, 2021c; Leddy *et al.,* 2020), diperlukan adanya monitoring dan evaluasi guna mengawal hasil yang diperoleh, sebab banyak program pemberdayaan masyarakat yang bias dalam hasil yang dicapai, disebabkan pada setiap pelaksaan tidak dilakukan koordinasi antar anggota serta pemangku kepentingan. Diperlukan adanya sinergitas dalam meramu kepentingan masing-masing pihak, untuk menuju pada tujuan yang sama.

Pada kegiatan monitoring dan evaluasi (DJATI, 2021; Margie *et al.,* 2020), bisa dilaksanakan oleh para pemilik program pemberdayaan, seperti:

a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi difokuskan pada tujuan akhir (*Goal Oriented Evaluation Model*) (Fathoni, 2017). Model ini merupakan type yang pertama kali dikembangkan pada tahun 1961, melakukan penguraian pada program pemberdayaan masyarakat pada hasil akhir yang diinginkan.
b. Mnitoring dan evaluasi yang dilakukan tidak mendasri pada tujuan (*Goal Free Evaluation Model*) (Zurqoni et al., 2018) model ini tidak menekankan pada hasil yang sesuai ditetapkan.
c. Model Evaluasi Formatif-summatif (Fetrianto, 2017), model ini memiliki 2 type, sehingga yang melaksanakan program pemberdayaan memiliki banyak pilihan
d. Evaluasi didasari pada program yang ingin dicapai (*Countenance Evaluation Model*) (Tompong & Jailani, 2019)
e. Evaluasi yang dilaksanakan untuk merekam tanggapan dari pengelola program untuk terus menerus melakukan penelahaan, sehingga setiap problem dapat diatasi dengan segera.

f. Model evaluasi yang didasarkan pada kontek, input dan proses dan produk, sehingga memberikan kesempatan untuk menetapkan keputusan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program pemberdayaan.
g. *CSE UCLA* (Divayana *et al.,* 2019) evaluasi model yaitu merupakan model evaluasi yang lengkap. Mendasari pada setiap aktivitas pemberdayaan masyarakat dimulai dengan perencanaan, pengembangan, pelaksanaan dan hasil serta pengaruhnya.
h. *Discrepancy Evaluation Model* (DEM) (SetyaNingsih et al., 2021) yang membahas evaluasi dilaksanakan untuk mengukur antara pencapaian dengan standar yang sederhana, apakah aktivitas yang dilaksanakan sesuai dengan rencana program

Setiap monitoring dn evaluasi ditentukan dari kesunguhan para pihak yang akan melaksanakan kegiatan, memilih pada model yang mana, tentunya disesuaikan dengan keahlian serta permasalahan yang terjadi. Tidak perlu dipaksakan atas monitoring dan evaluasi tersebut tanpa memahami makna dan tujuan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan program (Abdurohim, 2022; Azizah et al., 2015; Finthariasari et al., 2020; Sukesi et al., 2018).

11.5 Pelaporan Atas Monitoring dan Evaluasi dalam Pemberdayaan Masyarakat

Setiap pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Anwas, 2011; R. A. L. Hidayat et al., 2020) harus dilakukan pelaporan untuk kepentingan pengelola program pengabdian masyarakat, juga diperuntukan sebagai dokumen bila pada masa yang akan datang diminta pertanggungjawaban oleh pihak yang memberikan dana, sehingga dalam pembuatan laporan juga

harus sesuai dengan *platform* yang telah diseiakan oleh pemberi dana.

Dalam melaksanakan kegiatan pelaporan sebagai tindaklanjut hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan (ASTAWA *et al.,* 2019; Suot, 2020; Yayuk Sri Rahayu, 2020), maka laporan yang dibutuhkan tersebutmeliputi:

a. Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi, laporan ini sangat diperlukan dalam kegiatan yang dilakukan, sehingga pada laporan dapat disampaikan kondisi proyek program pemberdayaan (Margie et al., 2020).
b. Laporan yang dibuat untuk merekomendasikam program pemberdayaan (Fionalita, 2020; Junaid, 2020).
c. Laporan atas kegiatan pemberdayaan yang sampai batas tertentu tidak bisa lagi diselesaikan mengingat tujuan dalam melaksanakan kegiatan program bertumpu pada hasil (Abdurohim, 2021e; Pangestu & Sukardi, 2019).

Pelaporan ini sangt penting, untuk bagian yang dipergunakan untuk bagian lain perlu ada informasi yang secara berkala, tidak boleh diabaikan, semuanya dilakukan secara rutin. Keberhasilan tidk akan terjadi jika berkutat pada masalah spele, perlu ada kelanjutan untuk memperbaiki performance dalam menglola program pemberdayaan masyarakat (Doyan *et al.,* 2019; Suot, 2020).

Aktivitas yang harus dilakukan dalam pelaksanaan pelaporan monitoring dan evaluasi tentunya harus didasarkan antara kegiatan yang dilaksankan dibadingkan dengan program yang direalisasikan, sehingga dalam pelaporan yang dilaksanakan oleh tim pemberdayaan, dapat terpenuhi secara formal, sesuai dengan regulasi yang ada (Abdurohim, 2021b; Hatneny *et al.,* 2019; Reiza Macella e*t al.,* 2021).

Pemberdayaan masyarakat (Rachmadi *et al.,* 2021)yang berhasil adalah kemampuan dari para pengelola dana dan program yang harus diciptakan serta mampu memenuhi harapan masyarakat yang sudah lama ingin direalisasikan (Abdurohim, 2021a). Pemberdayaan masyarakat bukan hanya membangun fisik yang sangat dibutuhkan masyarakat tetapi dibutuhkan juga pengembangan pengetahuan (Suharto & Suryoko, 2017).

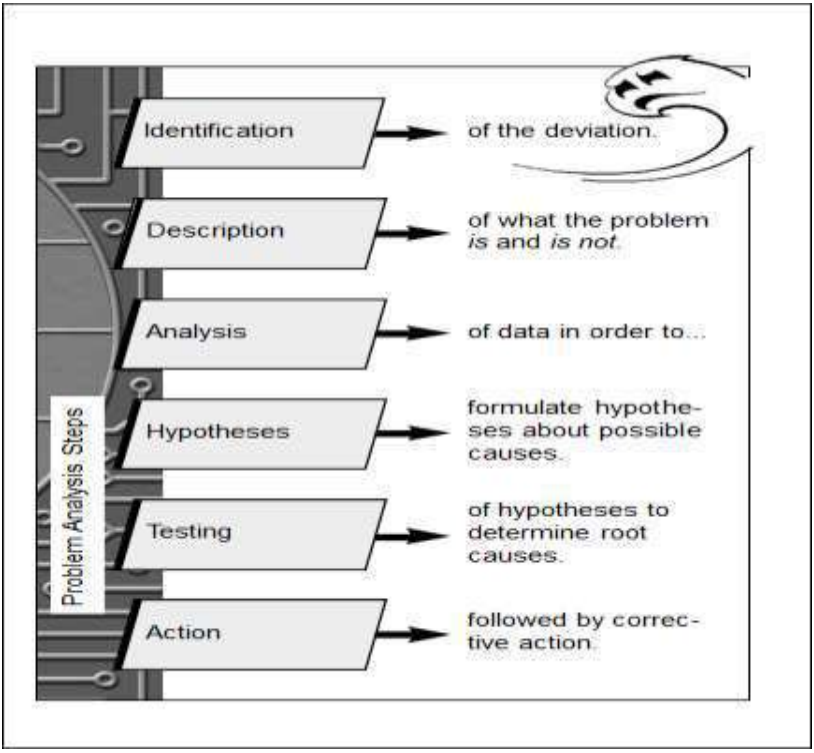

Gambar 11.3 : Proses Implementasi Monitoring dan Evaluasi
Sumber: (Lewis et al., 2001)

DAFTAR PUSTAKA

Abdurohim. 2021a. BAB 2: MENJAGA SUSTAINABLE BUSINESS DALAM MEMASUKI ERA NEW NORMAL. In *Books.Google.Com*. https://isbn.perpusnas.go.id/Account/SearchBuku?searchTxt=978-623-6995-21-1&searchCat=ISBN

Abdurohim. 2021b. *BAB 6: PERENCANAAN DAN STRATEGI* (D. U. Sutiksno & D. Ratna, Eds.; 1st ed., Vol. 1). ZAHIRPUBLISHING. https://www.google.com/search?tbm=bks&q=knowlwdge+management

Abdurohim. 2021c. *BAB 7: KONSEP SEGMENTING, TARGETING, POSITIONING PEMASARAN JASA PARIWISATA* (A. Sudirman, Ed.; 1st ed., Vol. 1). MEDIA SAINS INDONESIA. https://www.google.com/search?tbm=bks&q=knowlwdge+management

Abdurohim. 2021d. *BAB 10: BISNIS DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN* (E. Kurniawati & L. S. Indarto, Eds.; 1st ed., Vol. 1). INSIANA. http://insaniapublishing.com

Abdurohim. 2021e. *BAB 12: ANALISA KINERJA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)* (P. N. B. Malau & E. Sudarmanto, Eds.; 1st ed., Vol. 1). INSANIA. http://insaniapublishing.com

Abdurohim. 2022. *BAB 15: ANALISIS SENSITIVITAS-PENGAMBILAN KEPUTUSAN INVESTASI* (Suwandi, Ed.; 1st ed., Vol. 1). MEDIA SAINS INDONESIA. https://www.google.com/search?tbm=bks&q=knowlwdge+management

Alfret Goraph, F. 2021. Pemberdayaan Desa Wisata Pantai Dalam Memasuki Era New Normal. *BAKTI (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, *1*(1). https://doi.org/10.51135/baktivol1iss1pp41-48

Anwas, O. M. 2011. Kuliah Kerja Nyata Tematik Pos Pemberdayaan Keluarga Sebagai Model Pengabdian Masyarakat Di Perguruan Tinggi. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, *17*(5). https://doi.org/10.24832/jpnk.v17i5.49

Arlinda, Y. L. 2016. *EVALUASI KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA*. eprints.perbanas.ac.id. http://eprints.perbanas.ac.id/1038/

Astawa, I. P. A., Suriadi, I. G. A. K., & Atmika, I. K. A. 2019. PENINGKATAN PARTISIPASI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN POTENSI DESA BERBASIS IPTEK DI DESA BALUK. *Buletin Udayana Mengabdi*, *18*(2). https://doi.org/10.24843/bum.2019.v18.i02.p23

Azizah, R. N., Zauhar, S., & Soeaidy, M. S. 2015. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengurangi Angka Pengangguran di Kabupaten Sampang. *Wacana, Jurnal Sosial Dan Humaniora*, *18*(03). https://doi.org/10.21776/ub.wacana.2017.018.03.7

Buryakov, G., & Sysoeva, E. 2021. Monitoring of Russian banking system in terms of digital transformation. *E3S Web of Conferences*. https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2021/49/e3sconf_interagromash2021_08087/e3sconf_interagromash2021_08087.html

Chandrasekaran, S., & Narayanan, S. M. 2020. TRANSFORMING AND EMPOWERMENT OF DIGITAL BANKING IN INDIA. In *Journal of Analysis and …*. ijaconline.com. http://www.ijaconline.com/wp-content/uploads/2019/11/12-M.-Narayanan.pdf

Chandurkar, D., & Sen, N. 2014. *Monitoring And Evaluation Framework for Budget Work Projects* (Vol. 1).

Divayana, D. G. H., Suyasa, P. W. A., & Abadi, I. B. G. S. 2019. Digital library evaluation application based on combination of CSE-

UCLA with weighted product. *Journal of Engineering and Applied Sciences*, *14*(4). https://doi.org/10.3923/jeasci.2019.1318.1330

Djati, S. G. 2021. LAPORAN INDIVIDU KULIAH KERJA NYATA DARI RUMAH BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (KKN-DR SISDAMAS). *PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI TENGAH ….*

Doyan, A. 2019. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGOLAHAN BANK SAMPAH DI DESA MONTONG BAAN KECAMATAN SIKUR KABUPATEN LOMBOK TIMUR. *Jurnal Warta Desa (JWD)*, *1*(1). https://doi.org/10.29303/jwd.v1i1.17

Doyan, A., Putri, F. A., Ekayanti, S. S., & Harummiswari H, V. 2019. Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengolahan Bank Sampah di Desa Montong Baan Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, *2*(1). https://doi.org/10.29303/jpmpi.v1i2.260

Faqih, A. 2020. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PEMANFAATAN DAN PENATAAN PEKARANGAN. *Abdimas Galuh*, *2*(1). https://doi.org/10.25157/ag.v2i1.3298

Fathoni, A. F. 2017. Analisis Program PJOK Berdasarkan Pendekatan Goal-Oriented Evaluation Model. *Seminar Nasional Profesionalisme Tenaga Profesi PJOK, Pendidikan Olahraga Pascasarjana UM*.

Fetrianto, F. 2017. Penerapan Formative Summative Evaluation Model Dalam Penelitian Tindakan. *Seminar Nasional Pendidikan Olahraga*, *1*(1).

Finthariasari, M., Febriansyah, E., & Pramadeka, K. 2020. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PELANGKIAN MELALUI EDUKASI DAN LITERASI KEUANGAN PASAR MODAL MENUJU MASYARAKAT CERDAS BERINVESTASI.

Jurnal Pengabdian Masyarakat Bumi Raflesia, *3*(1). https://doi.org/10.36085/jpmbr.v3i1.763

Fionalita, S. 2020. Analisis Common Size Laporan Laba Rugi pada Bank BNI Periode 2017-2019. *Jurnal Akuntansi*.

H a r o l d, K. e r z n e r. 2017. *Project ManageMent* (Vol. 12).

Hatneny, A. I., Mahardani, A. S., & Saraswati, E. 2019. Pemberdayaan Masyarakat Pada UKM Depo Air Minum Tirta Barokah Dan Bakso Tuna Cintaku. *JIPEMAS: Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat*, *2*(1). https://doi.org/10.33474/jipemas.v2i1.1604

Hidayat, A. 2019. Evaluasi Perencanaan Umum Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah pada Universitas Brawijaya. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, *5*(1). https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2019.005.01.12

Hidayat, R. A. L., Juitania, J., Suharna, S., Indrawan, I. G. A., & Syahputra, A. 2020. Pemanfaatan Aplikasi Keuangan SI APIK Dalam Pembuatan Laporan Keuangan UMKM Rumah Pemberdayaan Masyarakat Tanggerang Selatan. *JAMAIKA: Jurnal Abdi Masyarakat*, *1*(3).

Jain, N., Burman, E., Robertson, C., Stamp, S., Shrubsole, C., Aletta, F., Barrett, E., Oberman, T., Kang, J., Raynham, P., Mumovic, D., & Davies, M. 2020. Building performance evaluation: Balancing energy and indoor environmental quality in a UK school building. *Building Services Engineering Research and Technology*, *41*(3). https://doi.org/10.1177/0143624419897397

Junaid, M. T. 2020. DETERMINAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR. *Jurnal Ekonomika*, *11*(1). https://doi.org/10.35334/jek.v11i1.1247

Leddy, A. M., Mantsios, A., Davis, W., Muraleetharan, O., Shembilu, C., Mwampashi, A., Beckham, S. W., Galai, N., Likindikoki, S.,

Mbwambo, J., & Kerrigan, D. 2020. Essential elements of a community empowerment approach to HIV prevention among female sex workers engaged in project Shikamana in Iringa, Tanzania. *Culture, Health and Sexuality*, *22*(sup1). https://doi.org/10.1080/13691058.2019.1659999

Lewis, J. P., San, N. Y., Washington, F., Auckland Bogotá, D. C., Lisbon, C., Madrid, L., City, M., New, M. M., San, D., & Singapore, J. 2001. *PROJECT PLANNING, SCHEDULING, AND CONTROL A Hands-On Guide to Bringing Projects in On Time and On Budget McGraw-Hill*. https://doi.org/10.1036/0071368388

Lohman, L. 2021. Evaluation of university teaching as sound performance appraisal. *Studies in Educational Evaluation*, *70*, 101008. https://doi.org/10.1016/J.STUEDUC.2021.101008

Mahmudah, S. 2018. AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (STUDI KASUS: BUMDES DESA SUNGON LEGOWO BUNGAH GRESIK). *Ecopreneur.12*, *1*(2). https://doi.org/10.51804/econ12.v1i2.376

Manfreda, S., McCabe, M. F., Miller, P. E., Lucas, R., Madrigal, V. P., Mallinis, G., Dor, E. ben, Helman, D., Estes, L., Ciraolo, G., Müllerová, J., Tauro, F., de Lima, M. I., de Lima, J. L. M. P., Maltese, A., Frances, F., Caylor, K., Kohv, M., Perks, M., … Toth, B. 2018. On the use of unmanned aerial systems for environmental monitoring. In *Remote Sensing* (Vol. 10, Issue 4). https://doi.org/10.3390/rs10040641

Margie, L. A., Afridayani, A., Cahyani, Y., & Sadiyah, K. 2020. PENDAMPINGAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERBASIS EMKM MELALUI SI APIK. *Jurnal Lokabmas Kreatif : Loyalitas Kreatifitas Abdi Masyarakat Kreatif*, *1*(2). https://doi.org/10.32493/jlkklkk.v1i2.p41-46.6372

Masrul, E. 2018. Manajemen Pemberdayaan Masyarakat. *De La Macca*, *01*(1).

Mu'am, A., & Nurdin, N. 2021. Ketepatan Waktu Penatausahaan Anggaran Pemerintah Daerah Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *GEOGRAPHY: Jurnal Kajian, Penelitian …*, *9*(2).

Nalukwago, J., Alaii, J., van den Borne, B., Bukuluki, P. M., Kimbowa, M., Bockh, E., Coutinho, S. M., & Crutzen, R. 2020. A process evaluation of the Communication for Healthy Communities adolescent health program in Uganda. *Health Education Research*, *35*(1). https://doi.org/10.1093/her/cyz032

Niode, I. Y. 2009. Sektor UMKM Di Indonesia: Profil, Masalah, dan Strategi Pemberdayaan. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis OIKOS-NOMOS*.

Nur Muhammad, F., Suprapto, & Herlambang, A. D. 2018. Evaluasi Desain Antarmuka Aplikasi Mobile BPJS Ketenagakerjaan Menggunakan Heuristic Evaluation. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer (J-PTIIK) Universitas Brawijaya*, *2*(1).

Pangestu, F., & Sukardi, S. 2019. Evaluation of the implementation of workshop and laboratory management on vocational high school. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, *9*(2). https://doi.org/10.21831/jpv.v9i2.25991.

Rachmadi, T. R., Wakhid Yuliyanto, Nurhayatun, & Ari Waluyo. 2021. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Penularan COVID-19 Melalui Sosialisasi Protokol Kesehatan di Pasar Rantewringin, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen. *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, *2*(1). https://doi.org/10.37339/jurpikat.v2i1.503

Ramadhani, S. T. A., & Andriani, R. (2021). Evaluasi Manajemen Risiko Layanan Perpustakaan Menggunakan Kerangka Kerja Cobit 5. *JURNAL TECNOSCIENZA*, *5*(2). https://doi.org/10.51158/tecnoscienza.v5i2.407

Reiza Macella, A. D., Najamudin, N., Handayani, S. W., & Juraida, I. 2021. Inovasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Aceh Kreatif Untuk Mengurangi Kemiskinan di Aceh. *Jurnal Public Policy*, *7*(1). https://doi.org/10.35308/jpp.v7i1.3095

Setiawati, S. 2019. Evalusi Prosedur Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Menilai Efektifitas Dana Pada Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Bina Auladi Depok. *JURNAL LENTERA AKUNTANSI*, *4*(2).

SetyaNingsih, U., Mawardi, & Ismanto, B. 2021. Evaluasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMP Negeri 6 Salatiga Menggunakan Discrepancy Evaluation Model (DEM). *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, *11*(2).

Sparrow, B. D., Edwards, W., Munroe, S. E. M., Wardle, G. M., Guerin, G. R., Bastin, J. F., Morris, B., Christensen, R., Phinn, S., & Lowe, A. J. 2020. Effective ecosystem monitoring requires a multi-scaled approach. *Biological Reviews*, *95*(6). https://doi.org/10.1111/brv.12636

Subiyanto, B. S. 2013. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. *E-Magazine Warta BP2SDM*.

Sudaryanto, Ragimun, & Wijayanti, R. R. 2014. Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas Asean. *Www.Kemenkeu.Go.Id*.

Suharto, G. P., & Suryoko, Dra. S. 2017. Pengaruh Gaya Hidup, Suasana Toko dan Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan Pembelian pada Giggle Box Cafe & Resto Semarang. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, *6*(1), 118–129.

Sukesi, T. Y., Supriyati, S., & Satoto, T. T. 2018. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengendalian Demam Berdarah Dengue (Literature Review). *Jurnal Vektor Penyakit*, *12*(2). https://doi.org/10.22435/vektorp.v12i2.294

Sukirman, S., & Indaryani, M. 2014. Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Menuju Kemandirian Usaha dengan Menerapkan

Manajemen Profesional. *Jurnal Ilmu Manajemen*. https://doi.org/10.32502/jimn.v4i1.252

Sulaiman, A. I., Masrukin, M., & Suswanto, B. 2020. Pemberdayaan Masyarakat Pesantren Dalam Kewirausahaan Dan Koperasi. *Prosiding*, *5*(November).

Suot, H. L. 2020. PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT (PKM) PEMBERDAYAAN KELOMPOK PEREMPUAN MELALUI PEMBINAAAN KEWIRAUSAHAAN DI KELURAHAN TARA-TARA TOMOHON. *ABDIMAS: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, *13*(2). https://doi.org/10.36412/abdimas.v13i2.2158

Suparno, S. 2019. Evaluation of the National Urban Community Empowerment Program. *KOMUNITAS: INTERNATIONAL JOURNAL OF INDONESIAN SOCIETY AND CULTURE*, *11*(1). https://doi.org/10.15294/komunitas.v11i1.15703

Suradisastra, K. 2016. Strategi Pemberdayaan Kelembagaan Petani. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. https://doi.org/10.21082/fae.v26n2.2008.82-91

Tenggara Strategics. 2022. *Laporan Akhir Beyond Lending: Membangun resiliensi UMKM di masa pandemi COVID-19*. https://tinyurl.com/3yad2jdv.

Tompong, B. N. K. J., & Jailani, J. 2019. An evaluation of mathematics learning program at primary education using Countenance Stake Evaluation model. *Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, *23*(2). https://doi.org/10.21831/pep.v23i2.16473

W, R. W. A. 2021. MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSBILITY BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen*, *2*(1). https://doi.org/10.15575/jim.v2i1.12476

Wahyuni, E. S., & Prasetyaningsih, R. H. 2020. The Pemberdayaan Masyarakat dengan Aktivitas Leisure. *Jurnalempathy.Com*, *1*(2). https://doi.org/10.37341/jurnalempathy.v1i2.19

Wirawan, R. 2019. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MENUJU LINGKUNGAN BERSIH DUSUN DASAN DAYA DESA LEMBAR. *Jurnal Warta Desa (JWD)*, *1*(1). https://doi.org/10.29303/jwd.v1i1.12

Wulan, N. A., Dewi, T., Nandra, G., & Wiguna, H. 2019. Evaluasi Penerapan Performance Based Budgeting pada Pemerintah Provinsi di Indonesia. In *Jurnal Ilmiah Akuntansi* • (Vol. 4, Issue 2).

Wulandari, A., & Rasipan. 2017. Peran Reputasi Dalam Membangun Kepercayaan Konsumen. *Jurnal Manajemen Kewirausahaan*, *14*(2), 121–132.

Yayuk Sri Rahayu, A. 2020. Tantangan Pencegahan Stunting pada Era Adaptasi Baru "New Normal" melalui Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI*, *9*(3).

Zurqoni, Retnawati, H., Apino, E., & Anazifa, R. D. 2018. Impact of character education implementation: A goal-free evaluation. *Problems of Education in the 21st Century*, *76*(6). https://doi.org/10.33225/pec/18.76.881

BIODATA PENULIS

Afriansyah, S.Psi., S.Sos., S.P., M.Si., M.H., M.Agr., CIIQA
Dosen Tetap di Sekolah Kedinasan Kementerian Pertanian
Program Studi Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan
Jurusan Pertanian
Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari

Penulis merupakan putra ketiga dari enam bersaudara dari pasangan Bapak Syamsu Udaya, S.H. dan Ibu Firdarisa, S.Pd., S.H., M.Pd dilahirkan di Muara Enim, 19 April 1986. Penulis saat ini menjadi dosen tetap di Sekolah Kedinasan Kementerian Pertanian di Program Studi Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan Jurusan Pertanian Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari. Riwayat Pendidikan penulis yaitu S-1 Psikologi di Universitas Muhammadiyah Malang, S-1 Ilmu Administrasi di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Waskitadharma Malang, S-1 Agribisnis Bidang Minat Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian di Universitas Terbuka, S-2 Magister Ilmu Administrasi di Universitas Islam Malang, S-2 Magister Ilmu Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang, S-2 Magister Ekonomi Pertanian di Universitas Tribhuwana Tungga Dewi Malang, dan saat ini fokus menyelesaikan disertasi di S-3 Sosiologi Universitas

Muhammadiyah Malang. Penulis aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan yang sedang penulis tekuni saat ini adalah menjadi Koordinator Assosiasi Dosen Pengabdian kepada Masyarakat (ADPI) Wilayah Papua Barat, Pengurus Komisariat Daerah Perhimpunan Agronomi Indonesia (PERAGI) Prov. Papua Barat, Ketua Umum Komunitas Relawan Tenaga Kesejahteraan Sosial (KORTEKS) Indonesia, Sekretaris Umum Himpunan Usaha Kecil Menengah Indonesia (HIKMI) Provinsi Papua Barat, Pengurus di Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Wilayah Manokwari, Mentor Ilmuwan Muda Papua (IMP), Pengurus Daerah Muhammadiyah Manokwari Provinsi Papua Barat, Pengurus MUI Kabupaten Manokwari sertamenjadi Founder Komunitas Enterpreneur Muda Papua Barat. Selain itu, penulis aktif menjadi editor dan reviewer pada dewan redaksi di beberapa OJS. Penulis juga aktif menjadi pemakalah diberbagai kegiatan ilmiah, menjadi narasumber di Radio Republik Indonesia (RRI), serta *plenary* di workshop /seminar /pelatihan /lokakarya lokal, nasional dan internasional. Penjelasan detail tentang penulis, dapat dilakukan dengan mengunjungi alamat berikut ini :
https://scholar.google.co.id/citations?user=eNgl39MAAAAJ&hl=id

Alamat Email Penulis :
afriansyah@pertanian.go.id
afriansyah@polbangtanmanokwari.ac.id

Alamat Sosmed Penulis :
Instagram : @afriansyahsyamsu
Facebook : Afriansyah Syamsu
Twitter : @afriansyahsyamsu
Path : Afriansyah Syamsu
Youtube : afriansyahsyamsu
Tiktok : @afriansyahsyamsu

BIODATA PENULIS

Afdhal, M.Si
Dosen Sosiologi Universitas Pattimura
Sekretaris Nasional P2G

Penulis lahir di Tanah Datar, Sumatera Barat pada tanggal 17 Juli 1992. Beliau kemudian merantau ke Jakarta untuk melanjutkan studi. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 di prodi Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2016 sebagai lulusan terbaik serta gelar cumlaude. Kemudian melanjutkan program studi S2 di Magister Sosiologi Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 2019. Saat ini penulis merupakan dosen tetap di Universitas Pattimura Program Studi Sosiologi. Selain sebagai dosen, penulis juga aktif dalam organisasi gerakan guru yaitu Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) sebagai Sekretaris Nasional P2G.

Alamat Email Penulis : afdhal@fisip.unpatti.ac.id

BIODATA PENULIS

Ahmad Mustanir, S.I.P., M.Si
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)
Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Lahir di Rappang Kab. Sidrap 06 Januari 1974. Menempuh dan menyelesaikan pendidikan TK Aisyiyah Palu Tahun 1980, SD Negeri 6 Rappang dan SD Negeri 3 Palu Tahun 1986, SMP Negeri 3 Toli-Toli Tahun 1989, SMA Negeri 1 Toli-Toli dan SMA Negeri 8 Makassar Tahun 1992, S1 Fisip UNHAS Tahun 1997 Prodi Ilmu Politik. S2 UNHAS Tahun 2003 Prodi Administrasi Pembangunan. Sekarang sedang menyelesaikan Disertasi S3 di Prodi Administrasi Publik UNM Makassar.

Pengalaman kerja penulis pernah menjadi Dosen Luar Biasa di Universitas Tadulako, Universitas Muhammadiyah Palu dan STIE Panca Bhakti Palu. Saat ini menjadi DosenTetap di Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang dan pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan sejak tahun 2016-2019, dan sekarang sebagai Kepala LP3M Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang 2019-2023. Sebelumnya juga pernah bekerja di Konsultan baik sebagai Team Leader maupun Tenaga Ahli dalam berbagai proyek APBN dan Bank Dunia.

Pengalaman penelitian – Dalam beberapa tahun terakhir memperoleh Hibah Penelitian antara lain dari Kemendikbud Ristek/Kemenristekdikti, PP Muhammadiyah juga internal Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang. Selain itu secara aktif melakukan riset secara mandiri dan bantuan Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang. Dari hasil penelitian ini telah melahirkan banyak tulisan dalam bentuk Article Jurnal dan Prosiding baik Nasional maupun Internasional bereputasi, lebih dari 35 Buku Ajar/Referensi/Monograph/Chapter serta memiliki lebih dari 70-an Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Hak Cipta. Di bidang Abdimas juga beberapa kali memperoleh Hibah dari Kemendikbud Ristek/Kemenristekdikti, Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah dan Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang.

Pengalaman Pemberdayaan Masyarakat – Dalam berbagai proyek APBN dan Bank Dunia, Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM), Hibah PKM & PKMS Kemendikbud Ristek/ Kemenristek dikti dan Hibah internal Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang.

Penulis juga adalah seorang Researcher, Trainer, Reviewer Journal Scopus Q1, Reviewer beberapa Jurnal Internasional dan Nasional lainnya, Editorial Board & Editor in Chief di beberapa jurnal internasional & nasional. Penulis juga tercatat sebagai ilmuan dan masuk dalam Rangking Scientists Top 5000 Di Indonesia Versi Ad Scientific Index 2023 Version 1 tepatnya urutan 134. Saat ini menempati peringkat 630 SINTA versi 3 years dari 255.279 dosen/peneliti tingkat Nasional H-Index 33, i10-Index 59.

Saat ini penulis aktif di Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) Cabang Sidrap, Himpunan Indonesia. Untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial (HIPIIS) Komisariat Daerah (Komda) Kab. Sidrap, Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia (ADIPSI) dan Kesatuan Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia (KAPSIPI)

serta Pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Orda Sidrap 2022-2027.

BIODATA PENULIS

Annisa Ilmi Faried, S.Sos., M.SP
Dosen di Fakultas Ilmu Sosial
Program Studi Ekonomi Pembangunan
Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan

Sejak tahun 2012 hingga saat ini, saya telah bekerja sebagai anggota staf pengajar di Fakultas Ilmu Sosial, Program Studi Ekonomi Pembangunan di Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) di Medan. Pada tahun 2018, saya bekerja sebagai Staf Ahli di BALITBANG Provinsi Sumatera Utara dengan berbagai kajian permasalahan daerah. Mengirimkan artikel ke jurnal nasional dan internasional secara teratur. Ini telah menerbitkan berbagai macam buku dan kelompok kolaboratif dengan judul yang sesuai dengan banyak masalah yang telah muncul sejak tahun 2018 hingga saat ini. Ini adalah harapan tulus saya bahwa pembaca akan berkontribusi pada kekayaan yang terkandung dalam buku ini.

BIODATA PENULIS

Aksal Mursalat, S.P., M.Si.
Dosen Program Studi Agribisnis Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Penulis lahir di Masamba pada tanggal 9 Juni 1990. Anak pertama dari pasangan Drs. Samukin dan Yohana. Menempuh dan menyelesaikan pendidikan S1 pada Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Cokroaminoto Palopo dan pendidikan S2 di Prodi Agribisnis Universitas Hasanuddin. Penulis merupakan dosen tetap dan Ketua Prodi Agribisnis Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Sidrap periode 2019-2023. Penulis aktif melakukan riset dan hasil penelitian yang telah melahirkan banyak tulisan dalam bentuk Artikel Jurnal dan Prosiding baik Nasional maupun Internasional bereputasi, beberapa Buku serta memperoleh beberapa HAKI. Selain itu penulis juga aktif sebagai anggota pada organisasi profesi seperti Perkumpulan Internasional Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi (IPEST), Forum Publikasi Ilmiah Indonesia (FUBLIN), Pemuda Tani Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), dan Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI).

BIODATA PENULIS

Dr. H. Iwan Henri Kusnadi, S. Sos, M.Si
Dosen di Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Penulis merupakan Dosen Bidang Ilmu Administrasi Publik dan Kebijakan Publik Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang.

Sebagai seorang yang sepenuhnya mengabdikan dirinya sebagai dosen, selain pendidikan formal yang telah ditempuhnya penulis juga mengikuti berbagai pelatiha untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang Pengajaran, Penelitian Dan Pengabdian. Beberapa buku yang penulis telah hasilkan, di antaranya Ilmu Administrasi Publik, Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Strategi, Sistem Administrasi Negara Republik Indonesiaa, Ekonomi Kreatif, dan lain-lain. Selain itu, penulis juga aktif melakukan penelitian yang diterbitkan di berbagai jurnal nasional maupun internasional. Penulis juga aktif menjadi pemakalah diberbagai kegiatan dan menjadi narasumber pada Workshop/Seminar/Lokakarya tertentu.

Alamat Email Penulis : iwanhenri01@gmail.com

BIODATA PENULIS

Rusydi Fauzan, SE, MM
Dosen Prodi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Penulis lahir di Lubuk Aur tanggal 28 Mei 1986. Penulis merupakan dosen tetap Prodi Manajemen Bisnis Syariah UIN SMDD Bukittinggi. Penulis sudah menulis sejak tahun 2010. Penulis menyukai kegiatan membaca, menulis, dan *traveling*. Seputar kegiatan penulis dapat di follow pada akun instagram @rusydifauzan.

BIODATA PENULIS

Amruddin
Dosen Tetap Yayasan di Fakultas Pertanian
Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar

Lahir, besar dan bersekolah di Makassar. Penulis merupakan dosen tetap Yayasan di Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar Fakultas Pertanian, dan 2014-2018 menjadi ketua program studi Agribisnis. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Peternakan UNHAS, S2 di UNM Program Studi Sosiologi dan UIM Program Studi Agribisnis serta menyelesaikan S3 di UNM Program Ilmu Sosiologi. Penulis gemar menulis, buku yang diterbitkan adalah Kota Tanpa Maksiat (1995), Mengapa Memilih Pemimpin Islam (2001), Pokok-Pokok Sosiologi Pertanian (2010), serta Kelembagaan, Organisasi dan Kepemimpinan (2011) yang diterbitkan Lembaga Penerbitan Unismuh. beberapa buku kolaborasi diterbitkan oleh Global Eksekutif Teknologi adalah Pengantar Manajemen, Manajemen SDM di Era Sociaty 5.0, Pertanian Organik, Dasar-Dasar Bisnis dan Sosiologi Pertanian. Sehari-hari sebagai dosen matakuliah, Dasar-Dasar Manajemen, Sosiologi Pertanian, Manajemen Agribisnis, Modal Sosial, Agribisnis Peternakan, Manajemen Strategi Agribisnis.

BIODATA PENULIS

Duwi Siswanto
Tenaga Penyuluh Pertanian Lapang
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan

Duwi Siswanto, lahir dan menetap di sebuah desa kecil wilayah pinggiran Kabupaten Lamongan Jawa Timur. Menyelesaikan kuliah di Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang 2014. Saat ini penulis mengabdikan diri sebagai tenaga penyuluh pertanian lapang di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan. Wilayah binaan penulis mencakup 2 desa dengan jumlah 15 kelompok tani binaan. Penulis bisa dihubungi melalui nomor 085257520360.
Alamat Email Penulis : duwisiswanto@gmail.com

BIODATA PENULIS

Rina Widiyawati
Dosen di STIKes Dian Husada Mojokerto

Penulis lahir di Probolinggo tanggal 23 Pebruari 1982 dan dikaruniai 2 putra. Penulis menempuh Pendidikan S1 di Institut Pertanian Bogor jurusan Gizi Masyarakat dan Sumberdaya Keluarga pada tahun 2000 dan lulus pada tahun 2004. Pernah bekerja di perusahaan bidang makanan olahan jamur dan daging di Probolinggo sebagai Quality Control sampai dengan tahun 2006. Tahun 2007 penulis pindah ke Mojokerto dan bekerja di STIKes Dian Husada Mojokerto sejak awal berdiri sampai dengan saat ini. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan Pendidikan S2 dengan Beasiswa BPPDN di Universitas Sebelas Maret Surakarta Program Pasca Sarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat Jurusan Perilaku dan Promosi Kesehatan dan lulus tahun 2017.

Penulis memiliki ketertarikan di bidang promosi kesehatan, khususnya pendidikan kesehatan untuk remaja dan kesehatan reproduksi.

Selain sebagai Dosen pendamping UKM PIK-M Mahkota (Pusat Informasi & Konseling Mahasiswa Mahkota), penulis juga aktif melakukan penelitian yang didanai oleh internal perguruan tinggi.

Dalam mengembangkan kemampuan diri, penulis juga aktif melakukan kegiatan entrepreneur dengan melibatkan secara aktif mahasiswa. Tulisan dalam buku ini merupakan tulisan ketiga penulis dengan harapan dapat memberikan kontribusi yang baik untuk pengembangan ilmu media promosi pada khususnya.

Alamat Email Penulis : gugik.rina@gmail.com

BIODATA PENULIS

Dr. Abdurohim, SE, MM.
Dosen di Universitas Jendral AhmadYani Cimahi

Kelahiran Cirebon (Jawa Barat) 12 April 1964, berkecimpung sebagai praktisi Perbankan selama 31 tahun pada PT. Bank Papua, dengan jabatan terakhir *Vice President* pada Divisi Perencanaan Strategis (Renstra). Keahlian yang dimiliki adalah Audit Perbankan, Perencanaan Strategis, Pemasaran, Managemen *Human Capital,* Penyusunan BPP & SOP dan Struktur Organisasi Perusahaan Perbankan. Riwayat pendidikan penulis yaitu Pendidikan Sarjana (S1) Manajemen Keuangan & Perbankan dari STIE YPKP Bandung (1989). Pendidikan Magister Manajemen (S2)-Manajemen Keuangan, dari Universitas Hasanudin (2003), dan Pendidikan Doktor (S3) Ilmu Manajemen dari Universitas Cendrawasih (2017).

Saat ini penulis aktif sebagai dosen Lektor di Universitas Jendral AhmadYani, Cimahi, Jawa Barat. Dan telah Bersertifikat Dosen Profesional (Serdos) dan sudah menulis Book Chapter (BC) sebanyak 38 Buku Ber ISBN & HKI. Manajemen Keuangan Dasar, Dasar-Dasar Pemasaran, Bank dan Fintech Ekstensi Bank kini dan esok, HRM 5.0 Digitalisasi SDM, Bunga Rampai

Kebijakan Perpajakan di Indonesia di masa pandemi Covid-19, Implementasi pengelolaan keuangan daerah tata kelola menuju pemerintahan yang baik, Manajemen pemasaran Implementasi Strategi Pemasaran Di Era Society 5.0, Keuangan syariah Konsep, Prinsip Dan Implementas, *Operation Management*, Anggaran Operasionall, *The Art Of Branding*, *E-Commerce* Strategi Dan Inovasi Bisnis Berbasis Digital, Analisa Laporan Keuangan, Isu-Isu Kontemporer Akuntansi Manajemen Sebagai Alat Perencanaan, Pengendalian Dan Pengambilan Keputusan, Tantangan pendidikan Indonesia di masa depan, Teori dan praktek manajemen Bank Syariah Indonesia, Kesehatan lingkungan suatu pengantar, Etika bisnis suatu pengantar, Bank dan lembaga keuangan lainnya, Knowledge Management, Marketing tourism service, New Normal Era Jilid 2, Menakar ekonomi di era pandemi covid-19 & new normal, HRM In Industry 5.0, Teori pemasaran pendekatan manajemen bisnis, *Business and digital economy*, Konsep dan implementasi manajemen strategi, Mengukur kinerja perusahaanmelalui analisa laporan keuangan, Akuntansi keuangan tingkat menengah, Konsep dan sistim akuntansi biaya, Study kelayakan rencana bisnis, Prilaku dalam organisasi, Tinjauan Hubungan Manajemen Risiko Dan Asuransi, Dasar Kepemimpinan Dan Pengambilan Keputusan, Sistem dan Strategi dalam Konteks Pengendalian Manajemen, Pengetahuan Dasar Pasar Modal dan Investasi, Manajemen Sumber Daya Manusia (Era Transformasi Digital), Akuntansi Manajemen.

Penulis telah mengikuti pendidikan/Lulus pada Sekolah Pimpinan Bank (Sespibank), Sekolah Pemimpin Cabang, Manajemen Risiko level 4, Keuangan Berkelanjutan (SDGs). Saat ini penulis aktif sebagai anggota *Project Managemen Office* Indonesia (PMOPI)

Alamat Email Penulis : abdurrohim@mn.unjani.ac.id